



LAKIP

(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

TAHUN 2025



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis DLH Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi tentang prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan merupakan kewajiban setiap SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan ditahun mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2025, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan tersebut, semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi DLH Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Malili, 31 Januari 2026



Kepala Dinas

IMAR HASAN DALLE, S.STP.,M.Si

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19810204 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas dan Fungsi.....	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Isu Strategis.....	8
1.4 Sistematika Laporan.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 Rencana Strategis	17
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	32
3.2 Realisasi Anggaran	177
BAB IV PENUTUP.....	214

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur	2
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025	3
Tabel 1. 3 Jumlah Pejabat Struktural/Eselon Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025	4
Tabel 1. 4 Jumlah Pejabat Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Dan Jenis Kelamin Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.....	5
 Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur	 20
 Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	 33
Tabel 3. 2 Target dan Realisasi	36
Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	38
Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	38
Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah (2025-2029)	39
Tabel 3. 7 Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026)	40
Tabel 3. 8 Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan Target dan Capaian Kabupaten/Kota	40
Tabel 3. 9 Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan Target dan Capaian Kabupaten/Kota	41
Tabel 3. 10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	44
Tabel 3. 11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	44
Tabel 3. 12 Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.....	46
Tabel 3. 13 Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan	51
Tabel 3. 14 Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan	55
Tabel 3. 15 Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan	60
Tabel 3. 16 Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan	64
Tabel 3. 17 Target dan Realisasi	72
Tabel 3. 18 Target dan Realisasi.....	73
Tabel 3. 19 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	73
Tabel 3. 20 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	74
Tabel 3. 21 Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah (2025-2029)	75

Tabel 3. 22 Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah(2021-2026)	76
Tabel 3. 23 Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan Target dan CapaianKabupaten/Kota	77
Tabel 3. 24 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	80
Tabel 3. 25 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	80
Tabel 3. 12 Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.....	81
Tabel 3. 27 Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan	86
Tabel 3. 14 Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan	90
Tabel 3. 29 Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan	95
Tabel 3. 16 Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan	100
Tabel 3. 31 Target dan Realisasi.....	105
Tabel 3. 32 Target dan Realisasi.....	105
Tabel 3. 33 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	106
Tabel 3. 34 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	107
Tabel 3. 35 Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah	108
Tabel 3. 36 Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026)	109
Tabel 3. 37 Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan Target dan CapaianKabupaten/Kota	110
Tabel 3. 38 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	112
Tabel 3. 39 Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	112
Tabel 3. 12 Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.....	113
Tabel 3. 27 Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan	119
Tabel 3. 42 Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan	122
Tabel 3. 43 Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan	124
Tabel 3. 45 Target dan Realisasi	128
Tabel 3. 46 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	129
Tabel 3. 47 Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026)	129
Tabel 3. 48 Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan Target dan Capaian Kabupaten/Kota	130
Tabel 3. 49 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	133
Tabel 3. 16 Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan	134
Tabel 3. 52 Capaian Indikator Kinerja Program Teknis	142
Tabel 3. 53 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung	147
Tabel 3. 54 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya	148
Tabel 3. 55 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target JangkaMenengah (2025 - 2029)	149
Tabel 3. 56 Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	151
Tabel 3. 57 Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung	152

Tabel 3. 58 Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025
Kabupaten Luwu Timur..... 177

Tabel 4. 1 Tindak lanjut terhadap hasil rekomendasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur
Tahun 2024..... 217



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Capaian Kinerja Dokumen Kualitas Air Tahun 2025	34
Grafik 3. 2 Capaian Kinerja Dokumen Kualitas Udara Tahun 2025	34
Grafik 3. 3 Capaian Kinerja Dokumen TutupanLahan Tahun 2025	34
Grafik 3. 4 Capaian Kinerja Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2025	35
Grafik 3. 5 Capaian Kinerja Sasaran Penunjang Tahun 2025	35
Grafik 3. 6 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran	47
Grafik 3. 7 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium.....	49
Grafik 3. 8 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV Sub Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3.....	53
Grafik 3. 9 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV Sub Kegiatan Fasilitasi izin PPLH	57
Grafik 3. 10 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub Kegiatan Pengawasan perizinan berusaha.....	58
Grafik 3. 11 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan	61
Grafik 3. 12 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub Kegiatan Penyelesaian sengketa	62
Grafik 3. 13 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub Kegiatan Penanganan sampah	65
Grafik 3. 14 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	68
Grafik 3. 15 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub Kegiatan Peningkatan Peran serta.....	69
Grafik 3. 16 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub Kegiatan Pencegahan Pencemaran.....	82
Grafik 3. 17 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium	84
Grafik 3. 18 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan RTH	87
Grafik 3. 19 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan fasilitasi izin PPLH	92
Grafik 3. 20 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV	93
Grafik 3. 21 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan Filantropi.....	96
Grafik 3. 22 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub Kegiatan Penanganan sampah	101
Grafik 3. 23 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan Pencegahan Pencemaran.....	114
Grafik 3. 24 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi.....	117
Grafik 3. 25 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan RTH	119
Grafik 3. 26 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan	

Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	123
Grafik 3. 27 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan MHA.....	125
Grafik 3. 28 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub Kegiatan Penanganan sampah	135
Grafik 3. 29 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV Sub Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan ...	138
Grafik 3. 30 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan peningkatan peran serta.....	139
Grafik 3. 31 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan.....	155
Grafik 3. 32 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan penyusunan RKA	156
Grafik 3. 33 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan penyusunan RKA	157
Grafik 3. 34 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	158
Grafik 3. 35 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan penyediaan gaji	160
Grafik 3. 36 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	160
Grafik 3. 37 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan penatausahaan BMD.....	161
Grafik 3. 38 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan Administrasi Kepegawaian	162
Grafik 3. 39 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan tugas dan fungsi	164
Grafik 3. 40 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan BIMTEK	165
Grafik 3. 41 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas.....	166
Grafik 3. 42 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan pengadaan mesin	167
Grafik 3. 43 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik	168
Grafik 3. 44 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan penyediaan bahan logistik.....	169
Grafik 3. 45 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan penyediaan barang cetakan	169
Grafik 3. 46 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan penyediaan bahan bacaan.....	170
Grafik 3. 47 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan fasilitas kunjungan tamu	171
Grafik 3. 48 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan Rakor	171
Grafik 3. 49 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan surat menyurat.....	172
Grafik 3. 50 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan jasa komunikasi.....	173
Grafik 3. 51 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan	

jasa pelayanan umum	174
Grafik 3. 52 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan jasa pemeliharaan	175
Grafik 3. 53 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan pemeliharaan peralatan.....	176
Grafik 3. 54 Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan rehabilitasi gedung	176

BAB I PENDAHULUAN

1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Lingkungan Hidup yang semula bernama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Noor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang secara spesifik tugas pokok dan rincian tugas jabatan struktural diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengendalian dan Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pada Tahun 2016 diterbitkan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 39 tahun 2016 yang kemudian disusul dengan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 37 tahun 2018 tentang dengan Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 39 tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, dan pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Fungsi :

- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan dan penataan lingkungan
- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah,

- limbah B3 dan kebersihan;
- Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
 - Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 318 orang, sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur terdiri dari tenaga ASN dan tenaga upah jasa. Tenaga ASN berjumlah 82 orang yang terdiri dari laki-laki 38 orang dan perempuan 44 orang, sedangkan tenaga upah jasa berjumlah 236 orang yang terdiri dari laki-laki 90 orang dan perempuan 146 orang. Ditinjau dari segi kuantitas, jumlah sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1
Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Luwu Timur

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	ASN	38	44	82
2	Upah Jasa	90	146	236

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 318 orang, sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur terdiri dari tenaga ASN dan tenaga upah jasa. Tenaga ASN berjumlah 82 orang yang terdiri dari laki-laki 38 orang dan perempuan 44 orang, sedangkan tenaga upah jasa berjumlah 236 orang yang terdiri dari laki-laki 90 orang dan perempuan 146 orang.

Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1. 2
Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan
Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	GOL	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan														TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SMA / SEDERAJAT		SMP / SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT		TIDAK SEKOLAH		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	IX	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
2	V	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	6	1
3	IV	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
4	III	1	2	13	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	15	21
5	II	-	-	-	-	-	-	5	8	-	-	-	-	-	-	5	8
6	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
7	Paruh Waktu	-	-	-	-	-	-	5	3	-	-	-	1	-	-	5	4
8	Upah Jasa	-	-	-	6	-	-	28	41	20	28	31	65	11	6	90	146
Jumlah																126	192

Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur sebanyak 318 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 4 orang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan dan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 1 orang laki-laki untuk golongan IV; S2 sebanyak 3 orang terdiri dari 1 laki-laki dan 2 perempuan, S1 sebanyak 30 orang terdiri dari 13 laki-laki dan 17 perempuan, D3 sebanyak 3 orang terdiri dari 1 laki-laki dan 2 perempuan untuk golongan III; SMA/Sederajat sebanyak 13 orang terdiri dari 5 laki-laki dan 8 perempuan

untuk golongan II; S1 sebanyak 11 orang perempuan untuk golongan IX; SMA/Sederajat sebanyak 7 orang terdiri 6 laki-laki dan 1 perempuan untuk golongan V; dan kualifikasi pendidikan SD sebanyak 1 orang laki-laki.

Jumlah PPPK Paruh Waktu sebanyak 9 orang dengan kualifikasi pendidikan SMA sebanyak 8 orang terdiri dari 5 laki-laki dan 3 perempuan; SD sebanyak 1 orang perempuan.

Jumlah tenaga Upah Jasa Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 236 orang yang terdiri dari upah jasa pelayanan umum : 7 orang dan upah jasa tenaga kebersihan 229 orang. Upah jasa tenaga umum dengan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 4 orang; SMA/Sederajatnya sebanyak 2 orang dan SD sederajat sebanyak 1 orang. Upah jasa tenaga kebersihan sebanyak 229 orang dengan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 2 orang; SMA sebanyak 69 orang terdiri dari 28 laki-laki dan 41 perempuan; SMP sebanyak 48 orang terdiri dari 20 laki-laki dan 28 perempuan; SD sebanyak 67 orang terdiri dari 31 laki-laki dan 36 perempuan; dan tidak sekolah sebanyak 17 orang terdiri dari 11 laki-laki dan 6 perempuan.

Tabel 1. 3
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	PEJABAT STRUKTURAL/ ESELON	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP / SEDERAJAT		SD / SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	II A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	III A	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	III B	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
5	IV A	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2
6	IV B	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
JUMLAH		2	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	4

Jumlah Pejabat Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur sebanyak 10 orang, yang terdiri dari:

- Eselon III.A dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang (laki-laki);
- Eselon III.B dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 2 orang (1 laki-laki dan 1 perempuan), S1 sebanyak 1 orang (laki-laki).

- Eselon IV.A dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang (perempuan), S1 sebanyak 1 orang laki-laki, dan D3 sebanyak 2 orang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan
- Eselon IV.B dengan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 2 orang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan.

Tabel 1. 4

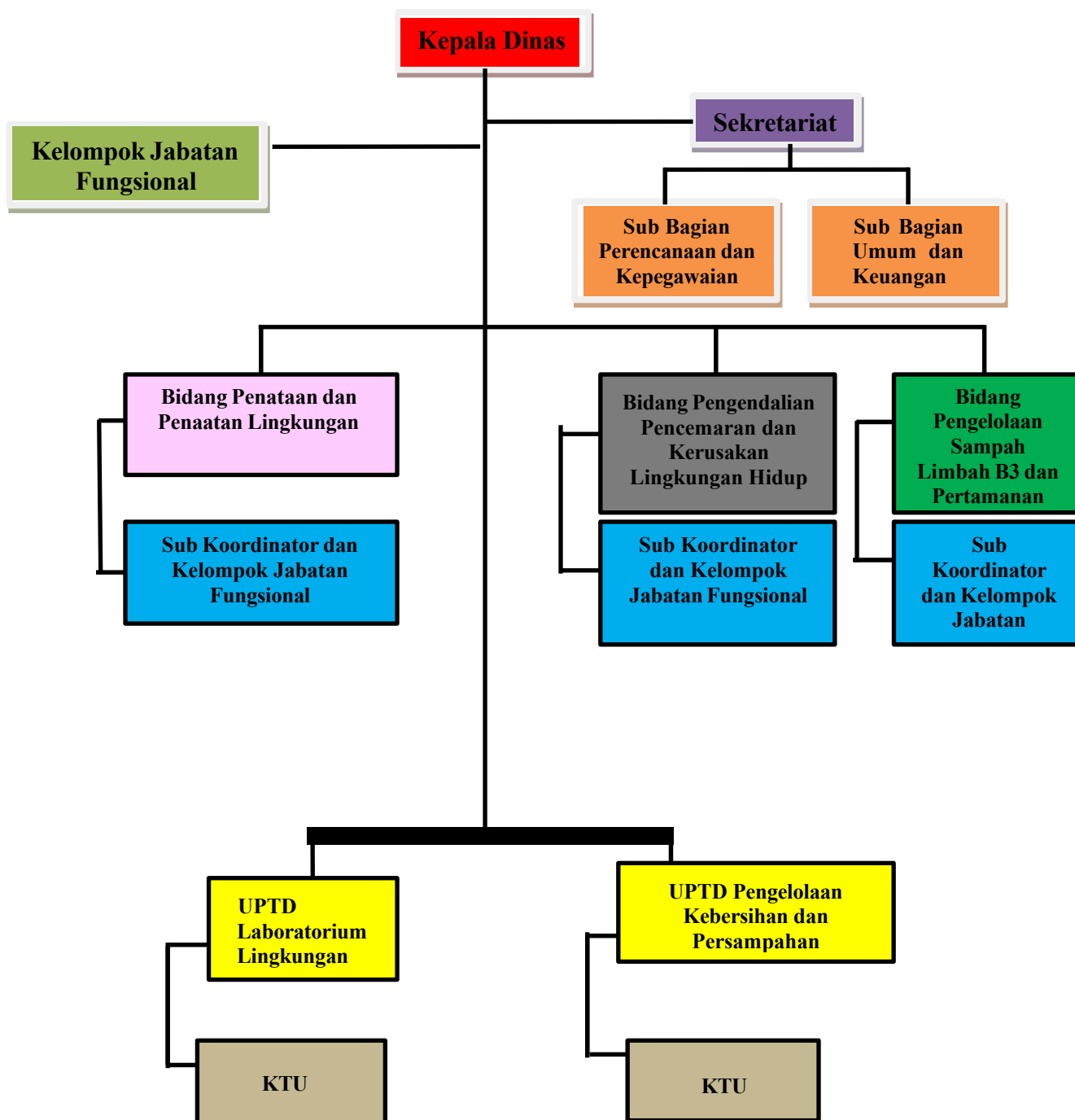
**Jumlah Pejabat Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Dan Jenis Kelamin
Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025**

NO	PEJABAT FUNGSIONAL	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP / SEDERAJAT		SD / SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Fungsional Pengendali dampak Lingkungan	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
2	Fungsional Pengawas Lingkungan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
JUMLAH		2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1

Jumlah Pejabat Fungsional Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur sebanyak 6 orang, yang terdiri dari:

- Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang (laki-laki) , S1 sebanyak 3 orang (Laki-Laki); dan
- Fungsional Pengawas Lingkungan dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang (laki-laki) dan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 1 orang (perempuan).

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur



1.3 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaah terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Isu-isu strategis lingkungan yang berkembang saat ini adalah sebagai berikut:

1) Pemanfaatan lahan secara berkelanjutan

Pemanfaatan lahan secara berkelanjutan diartikan sebagai cara pengelolaan sumber daya lahan seperti tanah, air, dan keanekaragaman hayati, yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia saat ini sambil menjaga kemampuan lahan untuk memproduksi secara jangka panjang dan lestari bagi generasi mendatang. Produktivitas dan keberlanjutan suatu sistem tata guna lahan ditentukan oleh interaksi antara sumber daya lahan, iklim, dan aktivitas manusia. Terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan variabilitasnya, pemilihan tata guna lahan yang tepat untuk kondisi biofisik dan sosial-ekonomi tertentu, serta penerapan SLM, sangat penting untuk meminimalkan degradasi lahan, merehabilitasi lahan terdegradasi, memastikan pemanfaatan sumber daya lahan yang berkelanjutan (yaitu tanah, air, dan keanekaragaman hayati), dan memaksimalkan ketahanan.

Penggunaan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan (aktivitas manusia) menentukan keberlanjutan/ketahanan atau degradasi/kerentanan sumber daya lahan. isu ini diharapkan dapat mengatasi hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan yang belum optimal. Selain itu isu ini diharapkan dapat mengatasi isu perubahan iklim dan pelestarian ekosistem darat.

2) Optimalisasi pengelolaan sampah

Optimalisasi pengolahan sampah adalah serangkaian strategi untuk mengurangi timbunan sampah dan meningkatkan efisiensi pengelolaannya, bertujuan menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan berkelanjutan. Caranya melalui pemilahan sampah berdasarkan jenisnya (organik dan anorganik), penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pemanfaatan teknologi pengolahan sampah seperti kompos dan pirolisis, peningkatan infrastruktur pengolahan sampah, serta edukasi dan partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan, mulai dari pengurangan sampah di sumber, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penguatan sarana dan prasarana persampahan sangat penting untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tanpa infrastruktur yang memadai, upaya pemilahan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir sampah tidak akan berjalan optimal. Penguatan sarana dan prasarana persampahan berupa:

1) Sarana Pengumpulan dan Pengangkutan seperti:

- Tempat sampah terpilah (organik, anorganik, B3) di setiap rumah, fasilitas umum, dan perkantoran.
- Penambahan armada pengangkut sampah yang sesuai jenisnya (misal, khusus organik, daur ulang, dll).
- Kontainer sampah di TPS (Tempat Penampungan Sementara) dengan kapasitas dan frekuensi angkut yang memadai.
- Sistem GPS dan manajemen armada untuk efisiensi rute dan pemantauan pengangkutan.

2) Fasilitas Pengolahan Sampah

- TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di tingkat kelurahan atau desa.
- Bank sampah berbasis komunitas yang didukung alat timbang, rak penyimpanan, dan fasilitas daur ulang sederhana.
- Unit pengomposan komunal (komposter, biodigester).

- Fasilitas Refuse-Derived Fuel (RDF) dan teknologi pengolahan modern lainnya.
- 3) Teknologi digital pendukung untuk pelaporan dan pemantauan sistem persampahan (aplikasi, dashboard data).
- 4) Prasarana di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)
 - Pembangunan dan peningkatan TPA yang ramah lingkungan (sanitary landfill), bukan open dumping.
 - Pemisahan zona di TPA (zona timbunan, zona daur ulang, zona kompos).
 - Unit pengolahan air lindi dan gas metana.
- 5) Infrastruktur Pendukung Komunitas
 - Penyediaan pusat edukasi lingkungan dan pelatihan pengelolaan sampah.
 - Workshop daur ulang skala kecil untuk UMKM.
 - Sarana promosi seperti papan informasi, mural edukatif, dan fasilitas kreatif berbasis daur ulang.
- 6) Pendanaan dan Kemitraan
 - Penguatan dana operasional kebersihan di tingkat kelurahan/desa.
 - Dukungan CSR dari swasta untuk pembangunan sarana persampahan.
 - Skema kemitraan pemerintah – masyarakat - swasta untuk pembangunan fasilitas skala lokal.
- 3) Pemanfaatan air secara berkelanjutan

Pemanfaatan air secara berkelanjutan adalah pendekatan yang memastikan ketersediaan air bersih untuk generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini mencakup konservasi, efisiensi, dan pengelolaan sumber daya air yang bijak. Salah satu caranya dengan melakukan edukasi seperti:

 - Kampanye kesadaran pentingnya konservasi air di masyarakat dan sekolah.
 - Pelibatan komunitas dalam pengawasan sumber air (seperti sungai dan danau).
- 4) Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kesiapan sumber daya manusia (SDM) sangat krusial dalam upaya

pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Tanpa SDM yang kompeten dan peduli, program atau kebijakan lingkungan tidak akan berjalan efektif. Adapun aspek penting dalam kesiapan SDM untuk pengendalian pencemaran lingkungan hidup:

1. Pengetahuan dan Kompetensi Teknis

- SDM perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang jenis-jenis pencemaran (udara, air, tanah, dll) dan dampaknya terhadap lingkungan serta kesehatan.
- Penguasaan terhadap teknologi dan metode pengendalian pencemaran, seperti IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), filter udara, atau bioremediasi.
- Kemampuan dalam pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan (menggunakan alat ukur dan analisis data).

2. Pendidikan dan Pelatihan

- Pendidikan formal di bidang lingkungan hidup, teknik lingkungan, biologi, kimia, atau sejenisnya.
- Pelatihan berkelanjutan bagi aparatur pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat umum dalam hal Manajemen lingkungan, Audit lingkungan dan Regulasi dan kebijakan lingkungan (AMDAL, PROPER, dll)

3. Etika Lingkungan dan Kesadaran Sosial

- SDM harus memiliki kepedulian dan etika lingkungan, tidak hanya menjalankan tugas formalitas.
- Menumbuhkan budaya green mindset: bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama.
- Kesiapan untuk melibatkan masyarakat dan membangun kolaborasi lintas sektor (pemerintah, swasta, LSM, komunitas).

4. Regulasi, Sertifikasi, dan Insentif

- Adanya sistem sertifikasi kompetensi lingkungan hidup.
- Insentif bagi SDM yang aktif dalam inovasi dan implementasi pengendalian pencemaran.
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh SDM yang lalai atau tidak bertanggung jawab.

5) Partisipasi masyarakat , pelaku usaha dan/atau kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan sangat penting karena sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga dan aktivitas komunitas. Tanpa keterlibatan aktif warga, sistem pengelolaan sampah tidak akan berjalan optimal. Berikut adalah beberapa bentuk dan strategi partisipasi masyarakat:

- a) Pemilahan sampah dari sumbernya, dimana masyarakat diminta untuk memisahkan sampah organik, anorganik, dan B3 sejak di rumah serta melakukan edukasi untuk pelabelan tempat sampah yang jelas untuk memudahkan memisahkan sampah dan penerapan sistem reward (insentif) untuk warga yang konsisten melakukan pemilahan.
- b) Pendidikan dan pelatihan kepada Masyarakat terkait dengan tata cara pengelolaan lingkungan
- c) Keterlibatan masyarakat dalam Bank Sampah. Hal ini bisa menyetorkan sampah anorganik yang masih bernilai ekonomi ke bank sampah sehingga masyarakat bisa mendapatkan keuntungan finansial sekaligus menjaga lingkungan. dan bank sampah juga dapat menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan ekonomi lokal.
- d) Pengelolaan Kompos Rumah Tangga, dimana sampah organik (sisa dapur, daun) bisa diolah menjadi kompos untuk pupuk tanaman. Komunitas bisa menyediakan pelatihan pembuatan komposter di skala rumah tangga.
- e) Kegiatan Gotong Royong dan Kampanye sampah, bisa berupa kerja bakti membersihkan lingkungan secara rutin, kampanye kreatif seperti lomba kebersihan RT/RW, mural edukasi sampah, atau gerakan bebas plastik dan berupa Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional serta kegiatan serupa lainnya.
- f) Kolaborasi dengan Pemerintah dan Swasta berupa Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah lingkungan atau perumusan kebijakan lokal, Kemitraan warga dengan sektor swasta dalam pengumpulan dan daur ulang sampah, dan aplikasi pelaporan sampah ilegal atau TPS liar oleh masyarakat.

- g) Inovasi dan Kreativitas Lokal seperti pembuatan produk daur ulang dari limbah (tas dari plastik bekas, ecobrick, kerajinan) dan Komunitas daur ulang kreatif bisa jadi inspirasi dan motor penggerak perubahan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur memiliki permasalahan utama (Strategic Issued) antara lain :

1. Pencemaran Air

Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah industri tambang disamping itu juga memiliki 3 Danau besar, beberapa sungai besar dan garis pantai yang panjang sehingga Kabupaten Luwu Timur termasuk daerah yang rawan pencemaran air.

Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat (dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur), Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan.

Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

- Meningkatnya kandungan nutrisi dapat mengarah pada eutrofikasi.
- Sampah organik seperti air comberan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem.
- Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrisi dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air.
- Seperti limbah pabrik yg mengalir ke sungai
- Pencemaran air oleh sampah
- Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan

2. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah suatu peristiwa masuk atau tercampurnya polutan (unsur-unsur berbahaya) ke dalam lapisan udara (atmosfer) yang bisa mengakibatkan menurunnya kualitas udara. Pada dasarnya, secara alamiah alam itu mampu mendaur ulang berbagai macam jenis limbah yang dihasilkan oleh makhluk hidup, akan tetapi jika konsentrasi limbah yang dihasilkan sudah tidak sebanding dengan laju proses daur ulang maka itulah yang menyebabkan pencemaran. Dalam studi dijelaskan bahwa pencemaran lingkungan yang paling berpengaruh yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara akan menimbulkan dampak negatif, terkhusus lagi bagi kehidupan di muka bumi.

Secara umum pencemaran udara di Kabupaten Luwu Timur bersumber dari cerobong asap industri, kabut asap (dampak dari kebakaran hutan), gas buang kendaraan, debu dan masih banyak sumber pencemaran udara lainnya.

3. Penurunan Kualitas Sumberdaya Alam

Penurunan Kualitas Sumber Daya Alam ditandai dengan terjadinya degradasi lingkungan sehingga mengakibatkan kerusakan sumber daya alam. Degradasi ialah penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat dari aktivitas/kegiatan manusia (antropogenic) ataupun alami.

Kenyataan yang terjadi bahwa manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam telah mengakibatkan berbagai dampak yang cenderung menurunkan kualitas maupun kuantitas sumber daya alam tersebut.

Secara umum penurunan kualitas sumberdaya alam di Kabupaten Luwu Timur diakibatkan pembukaan lahan hutan yang tidak terkontrol, baik itu lahan pertambangan, pertanian, perkebunan, tambak dan perumahan sehingga perlu peran pemerintah daerah untuk mengontrol kerusakan sumberdaya alam.

4. Persampahan

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dengan pola hidup yang semakin konsumtif sudah tentu diikuti dengan meningkatnya produksi sampah. Di semua daerah, sampah selalu menimbulkan masalah yang rumit untuk dipecahkan. Manusia mempunyai berbagai aktivitas untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi bahan makanan, minuman, barang dan lainnya dari sumber daya alam yang tersedia. Di sisi lain aktivitas tersebut menghasilkan barang-barang yang akan dikonsumsi, namun di sisi lain aktivitas tersebut juga menghasilkan bahan buangan yang tidak diinginkan atau tidak berguna. Makin hari makin bertambah banyak, hal ini erat hubungannya dengan ketersediaan ruang hidup manusia yang relatif tetap, dan bahan buangan ini dikenal dengan sampah.

Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengurai sampah, khususnya sampah plastik. Sampah plastik ini merupakan sampah yang bersifat anorganik, artinya sangat sulit terurai menjadi satu dengan tanah. Berbeda dengan sampah organik, yang tergolong mudah untuk terdekomposisi menjadi pupuk.

Perilaku masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan seringkali berdampak negatif bagi lingkungan, mulai dari banjir sampai timbulnya masalah-masalah penyakit. Kesadaran masyarakat khususnya di Kabupaten Luwu Timur masih perlu ditingkatkan pentingnya akan kebersihan lingkungan. Kesadaran dan perilaku, merupakan dua hal yang sangat sulit untuk diubah. Untuk mengubah perilaku manusia, diperlukan strategi dan tahapan-tahapan tertentu.

1.4 SISTEMATIKA LAPORAN

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional (jika ada);

- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan/Sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Rencana strategis juga merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

A. VISI DAN MISI**a. VISI**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Lingkungan Hidup mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2025 – 2029 yaitu :

“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”

b. MISI

Misi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan agar apa yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Adapun Misi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Misi ke-4 Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2025 – 2029 yaitu :

**“Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Lingkungan
Hidup yang Terintegrasi ”**

B. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan hasil akhir yang akan dicapai oleh sebuah Organisasi Perangkat Daerah oleh karena itu Tujuan Strategis harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur telah menentukan tujuan strategis yaitu :

“Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup”

C. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria yang spesifik, dapat dinilai dan terukur menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran strategi yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

- 1. Terpantaunya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan**
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terjaganya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air (indeks)	65,00	81,64 (baik)	81,84 (baik)	82,04 (baik)	82,24 (baik)	82,44 (baik)	82,64 (baik)	
		Indeks Kualitas Udara (indeks)	91,85	81,35 (baik)	81,55 (baik)	81,75 (baik)	81,95 (baik)	82,15 (baik)	82,35 (baik)	
		Indeks Tutupan Lahan (indeks)	74,40	82,61 (baik)	82,68 (baik)	82,75 (baik)	82,82 (baik)	82,89 (baik)	82,95 (baik)	
	Terpantaunya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Dokumen kualitas air (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	
		Dokumen kualitas udara (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	
		Dokumen kualitas tutupan lahan (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	
		Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (persen)	14,59	13,12	13,38	13,65	13,92	14,20	14,49	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat daerah (angka)	76,35	76.50	76.70	76.90	77.10	77.30	77.50	

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 merupakan target kinerja tahun pertama dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029 terdapat rumusan sasaran, indikator dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025.

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah (dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur) kepada atasan langsungnya (dalam hal ini Bupati Kabupaten Luwu Timur), perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh pimpinan unit kerja dalam 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang akan dikelolanya. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMAR HASAN DALLE, S.STP.,M.Si
Jabatan : PIt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
Nama : Ir.H.IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM
Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 13 November 2025

Pihak Kedua

BUPATI LUWU TIMUR

Ir.H.IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM

Pihak Pertama

PIt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. LUWU TIMUR

UMAR HASAN DALLE, S.STP.,M.Si

LAMPIRAN 1

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terpantaunya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Dokumen Kualitas Air	1 Dokumen
		Dokumen Kualitas Udara	1 Dokumen
		Dokumen Kualitas Tutupan Lahan	1 Dokumen
		Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	13,12 Persen
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	76,50

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja:

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 6.254.930.812.00	APBD
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 477.041.186.00	APBD
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 129.774.820.00	APBD
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp 17.837.510.00	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 54.050.540.00	APBD
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Rp 15.226.190.00	APBD
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan	Rp 31.188.430.00	APBD
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 281.748.650.00	APBD
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 137.456.600.00	APBD
10	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 5.173.802.163.00	APBD
JUMLAH		Rp 12.573.056.901.00	APBD

Malili, 13 November 2025

Pihak Kedua

BUPATI LUWU TIMUR



Ir.H.IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM

Pihak Pertama

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. LUWU TIMUR



UMAR HASAN DALLE,S.STP.,M.Si

LAMPIRAN 2

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1**A. Terpantaunya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan**

Terpantaunya Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan yakni terselenggaranya kegiatan pemantauan lingkungan hidup yang menghasilkan data kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan yang terukur, terdokumentasi, sesuai standar dan metoda yang berlaku serta dapat digunakan sebagai dasar evaluasi serta pengambilan kebijakan. Data kualitas air, udara dan tutupan lahan sebagai bahan pembentuk perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menjadi salah satu indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan gambaran capaian kinerja pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH merupakan gambaran kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Nilai IKLH digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur.

Terpantaunya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan memiliki 4 (empat) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Dokumen Kualitas Air	Dokumen Kualitas Air relevan sebagai instrumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup karena memuat data dan informasi kondisi mutu air permukaan secara periodik, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen ini menjadi dasar dalam penetapan kebijakan, program, dan kegiatan pengendalian pencemaran air, penilaian Indeks Kualitas Air (IKA), serta pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam pelaporan kinerja lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Dokumen Kualitas Air mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, pengambilan keputusan berbasis data, dan perlindungan kesehatan masyarakat serta keberlanjutan sumber daya air.	Jumlah dokumen kualitas air yang telah disusun dan disahkan dalam 1 Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
2.	Dokumen Kualitas Udara	Dokumen Kualitas Udara memiliki relevansi strategis sebagai dasar penyediaan data dan informasi kondisi mutu udara ambien yang terukur, periodik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen ini digunakan sebagai landasan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pengendalian pencemaran udara, penilaian Indeks Kualitas Udara (IKU), serta pemantauan dampak aktivitas pembangunan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Selain itu, Dokumen Kualitas Udara mendukung pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam pelaporan kinerja lingkungan hidup, meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, serta mendorong pengambilan keputusan berbasis data dalam upaya perlindungan kualitas udara dan pembangunan berkelanjutan	Jumlah dokumen kualitas udara yang telah disusun dan disahkan dalam 1 Tahun	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
3.	Dokumen Kualitas Tutupan Lahan	Dokumen Kualitas Tutupan Lahan memiliki relevansi penting sebagai sumber data dan informasi kondisi tutupan lahan yang akurat, terukur, dan periodik. Dokumen ini menjadi dasar dalam perencanaan tata guna lahan, pengendalian alih fungsi lahan, serta evaluasi dampak pembangunan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu, Dokumen Kualitas Tutupan Lahan digunakan dalam penilaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), mendukung penyusunan kebijakan perlindungan dan rehabilitasi lahan, serta menjadi bahan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Keberadaan dokumen ini juga meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, mendorong pengambilan keputusan berbasis data spasial, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.	Dokumen Kualitas Tutupan Lahan yang telah disusun dan disahkan dalam 1 Tahun	Penyedia data spasial resmi, Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Kehutanan; Hasil Overlay Data Spasial

4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah memiliki relevansi strategis sebagai indikator kinerja pengelolaan persampahan daerah dalam upaya pengurangan sampah yang dibuang ke TPA. Indikator ini menggambarkan efektivitas dan kapasitas fasilitas pengolahan sampah seperti TPS3R, TPST, PDU, pusat pengomposan, bank sampah, biodigester, RDF, PSEL/PLTSa, dan fasilitas pengolahan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Data timbulan sampah terolah menjadi dasar perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan sampah, mendukung pencapaian target pengurangan dan penanganan sampah daerah, serta berkontribusi terhadap penilaian kinerja lingkungan hidup dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Selain itu, indikator ini mendorong pengelolaan sampah berbasis sumber, penerapan ekonomi sirkular, dan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.	Persentase Timbulan Sampah Terolah (%) = $\frac{\text{Jumlah Sampah yang terolah di Fasilitas Pengolahan}}{\text{Total Timbulan Sampah}} \times 100\%$	UPTD Persampahan; catatan timbangan; data transaksi Bank Sampah, pengomposan, sektor informal.
---	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Dokumen Kualitas Air	1 Dokumen	Target kinerja 1 (satu) dokumen dalam 1 (satu) tahun dimaknai bahwa dalam satu tahun anggaran disusun satu dokumen komprehensif kualitas air yang memuat hasil pemantauan mutu air pada wilayah kewenangan pemerintah daerah selama periode satu tahun berjalan. Dokumen yang dihasilkan merupakan hasil kompilasi dan analisis data pemantauan kualitas air yang dilakukan secara berkala pada titik-titik pemantauan yang telah ditetapkan, mencakup parameter fisika, kimia, dan/atau biologi, serta dilengkapi dengan evaluasi status mutu air berdasarkan baku mutu yang berlaku.
Dokumen Kualitas Udara	1 Dokumen	Target kinerja 1 (satu) dokumen dalam 1 (satu) tahun dimaknai bahwa dalam satu tahun anggaran disusun satu dokumen komprehensif kualitas udara yang menggambarkan kondisi mutu udara di wilayah kewenangan pemerintah daerah selama periode satu tahun berjalan. Dokumen tersebut merupakan hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pemantauan kualitas udara yang dilaksanakan secara berkala dan/atau berkelanjutan pada titik-titik pemantauan yang telah ditetapkan.
Dokumen Kualitas Tutupan Lahan	1 Dokumen	Target kinerja 1 (satu) dokumen dalam 1 (satu) tahun dimaknai bahwa dalam satu tahun anggaran disusun satu dokumen komprehensif kualitas tutupan lahan yang menggambarkan kondisi, jenis, luas, serta perubahan tutupan lahan di wilayah kewenangan pemerintah daerah. Dokumen tersebut merupakan hasil pengumpulan dan analisis data tutupan lahan yang diperoleh melalui pengolahan citra penginderaan

		jauh, sistem informasi geografis (SIG), dan/atau verifikasi lapangan. Analisis dilakukan untuk menilai perubahan tutupan lahan antarperiode serta implikasinya terhadap kondisi lingkungan hidup dan perencanaan tata ruang
Timbulan Sampah Terolah Di fasilitas Pengolahan Sampah	13,12 Persen	Penetapan target tahun 2025 didasari dari capaian kinerja tahun 2024.

Penjelasan Kinerja 2

B. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan tingkat keberhasilan Perangkat Daerah dalam menyusun, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerja secara terintegrasi dan berkelanjutan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang ditunjukkan oleh peningkatan kualitas perencanaan kinerja, keselarasan indikator dan target, ketepatan pelaporan, serta hasil evaluasi kinerja yang tercermin nilai AKIP, atau capaian indikator kinerja utama Perangkat Daerah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat daerah merupakan salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Nilai AKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan	NILAI AKIP Hasil LHE Inspektorat	Laporan Kinerja DLH & LHE Inspektorat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai AKIP Perangkat Daerah	76,50	Penetapan target tahun 2025 didasari capaian Nilai AKIP Tahun 2024

Malili, 13 November 2025

Pihak Kedua

BUPATI LUWU TIMUR



Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T., IPM

Pihak Pertama

Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. LUWU TIMUR



UMAR HASAN DALLE, S.STP., M.Si

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 digunakan untuk mengetahui keberhasilannya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 merupakan pengukuran evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

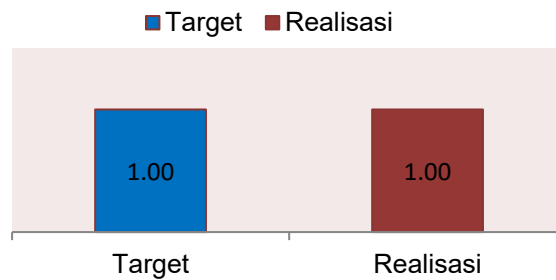
Tabel 3. 1
Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terpantaunya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Dokumen Kualitas Air	1 dokumen	1 dokumen	100
		Dokumen Kualitas Udara	1 dokumen	1 dokumen	100
		Dokumen Tutupan Lahan	1 dokumen	1 dokumen	100
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	13,12 %	11 %	83,84
2	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	76.50	76,35	99,80

SASARAN STRATEGIS 1

“Terpantaunya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan”

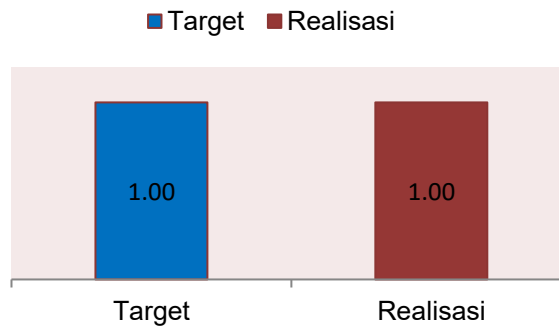
DOKUMEN KUALITAS AIR



Grafik 3. 1

Capaian Kinerja Dokumen Kualitas Air Tahun 2025

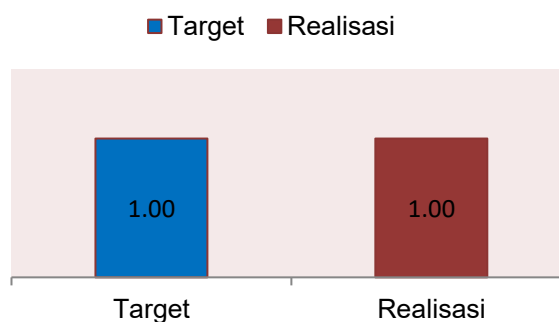
DOKUMEN KUALITAS UDARA



Grafik 3. 2

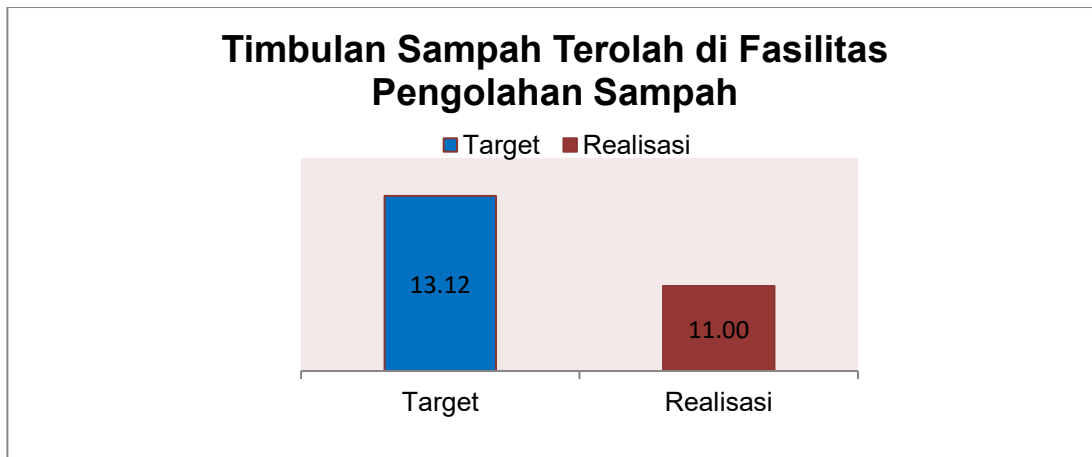
Capaian Kinerja Dokumen Kualitas Udara Tahun 2025

DOKUMEN KUALITAS TUTUPAN LAHAN



Grafik 3. 3

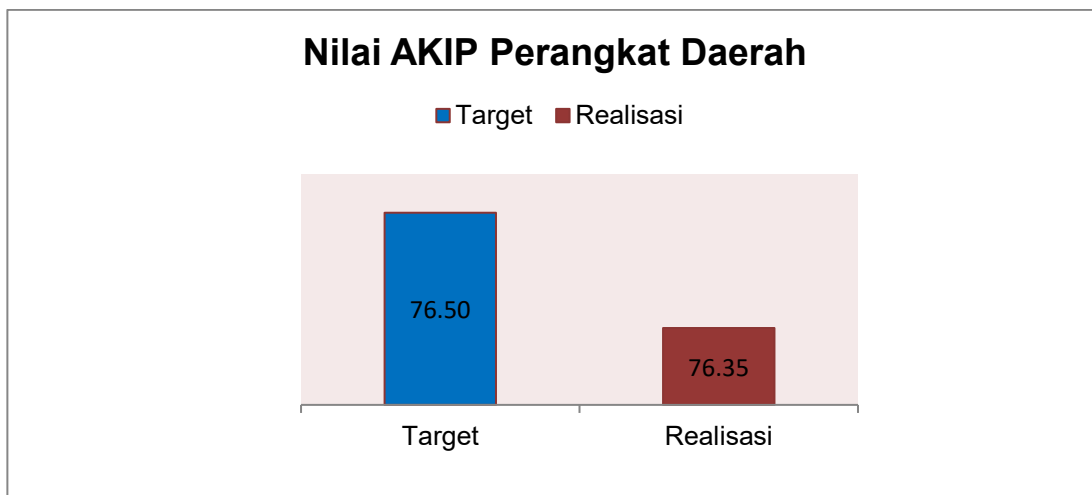
Capaian Kinerja Dokumen Tutupan Lahan Tahun 2025



Grafik 3. 4
Capaian Kinerja Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2025

Sasaran 2 (Sasaran Pendukung)

Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah



Grafik 3. 5
Capaian Kinerja Sasaran Penunjang Tahun 2025

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung

mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

1. DOKUMEN KUALITAS AIR

1.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Indikator Kinerja yang digunakan Pada Renstra 2025-2029 adalah Dokumen Kualitas Air. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 1 (satu) dokumen dan realisasi sebanyak 1 (satu) dokumen atau capaian sebesar 100%. Dokumen Kualitas Air merupakan dokumen yang berisi gabungan laporan pemantauan kualitas air semester 1 dan semester 2. Pemantauan kualitas air (sungai dan danau) dilakukan dalam 2 (dua) periode yang berbeda untuk mewakili musim penghujan dan musim kemarau, dimana terdapat 23 titik sampel pengambilan air yang mewakili kondisi 7 sungai dan 2 situ/waduk, sehingga di dapatkan keseluruhan sampel air sebanyak 46 sampel dalam 1 tahun. Data kualitas air merupakan data input untuk perhitungan Indeks Kualitas Air pada satu lokasi dan waktu tertentu. Sehingga di dalam dokumen kualitas air telah digambarkan kondisi kualitas air permukaan secara umum di Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 3. 2
Target dan Realisasi

INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Dokumen Kualitas Air	1 dokumen	1 dokumen	100%

Indikator kinerja sasaran yang digunakan pada Renstra 2021-2026 adalah Indeks Kualitas Air.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi

INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Air	81,64	78,06	95,61

Perhitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 menggunakan metode perhitungan Indeks Pencemar dimulai dengan menghitung konsentrasi 8 parameter untuk sungai dan 11 parameter untuk danau, hasil pengamatan dibandingkan nilai baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 Tahun 2025 tentang status dan kondisi lingkungan hidup serta respon terhadap perubahan lingkungan hidup. Selanjutnya setelah hasil perhitungan indeks pencemar dan persentase status mutu diketahui untuk masing-masing lokasi pemantauan, kemudian dikaliakn dengan nilai bobot sesuai status mutu.

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 berdasarkan data pemantauan kualitas air pada 7 sungai dan 2 danau adalah 78,06 sedangkan target IKA pada tahun 2025 sebesar 81,64 atau capaian sebesar 95,61%. Nilai IKA yang diperoleh hampir memenuhi target yang sudah ditentukan. Diperlukan langkah pengendalian pencemaran dan perbaikan kualitas air yang lebih konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan agar kualitas perairan di kabupaten Luwu Timur dapat meningkat hingga mencapai kategori yang lebih baik.

1.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3. 3
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

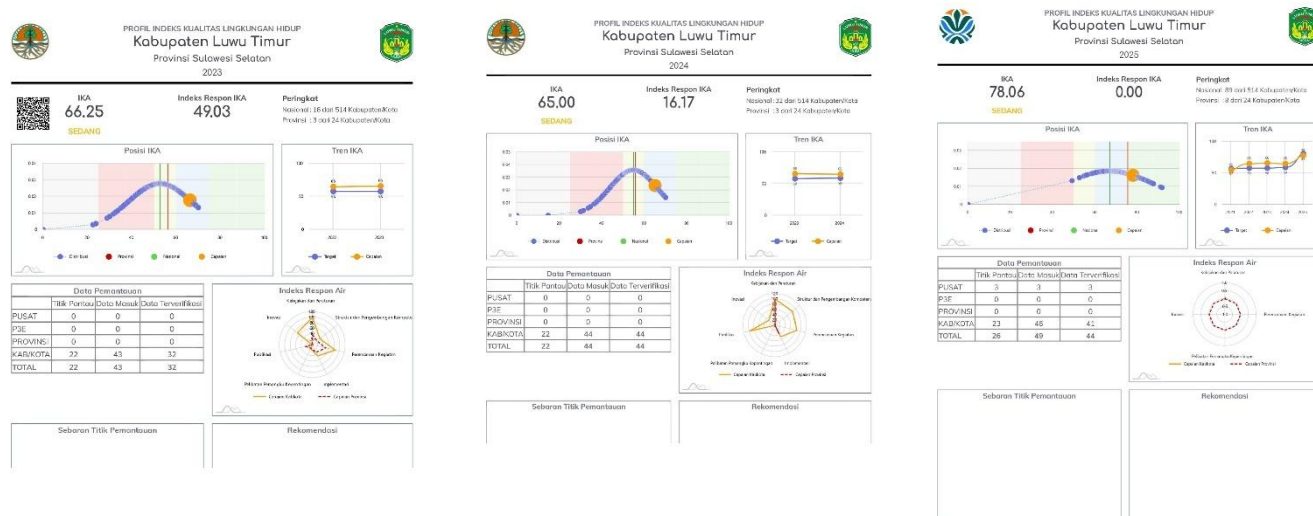
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Dokumen Kualitas Air	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023, 2024, dan 2025. Setiap tahun dilakukan penyusunan dokumen kualitas air atas hasil pemantauan kualitas air. Sedangkan perbandingan target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya untuk untuk Indikator Kinerja sasaran Pada Renstra 2021-2026 adalah.

Tabel 3. 4
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Air	28	24,92	89,00%	28.20	24,44	86,66%	81,64	78,06	95,61

Gambar Nilai IKA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023, 2024 dan 2025



Berdasarkan tabel di atas, nilai pada target dan realisasi yang digunakan untuk tahun 2023 dan tahun 2024 merupakan hasil dari nilai konversi dari komponen indeks kualitas air yang dikalikan bobot rumus perhitungan ($0,376 \times \text{nilai IKA}$), sehingga didapatkan nilai sesuai tabel diatas. Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023, 2024, dan 2025. Nilai IKA tahun 2025 adalah 78,06; tahun 2024 adalah 24,44, dan tahun 2023 adalah 24,92. Nilai IKA yang diperoleh tahun 2025 mengalami peningkatan dari nilai IKA tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan kualitas air di Kabupaten Luwu Timur telah memberikan dampak positif terhadap perbaikan kondisi perairan, sebagaimana tercermin dari peningkatan nilai IKA pada tahun 2025. Meskipun nilai IKA mengalami peningkatan tetapi kategori indeks masih sama dengan kategori tahun 2024 yaitu kategori sedang. Diperlukan langkah pengendalian pencemaran dan perbaikan kualitas air yang lebih konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan untuk dapat meningkatkan kategori yang lebih baik.

1.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS OPD

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 5
Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2025
terhadap Target Jangka Menengah (2025-2029)

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024	Tahun 2025	rata-rata realisasisampai dengan tahun 2025	Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra
Dokumen Kualitas Air	1	1	1	5	20%

Berdasarkan tabel di atas, dapat terbaca perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir jangka menengah, Persentase capaian 2025 terhadap

target akhir renstra adalah 20%. Hal ini masih sejalan dengan pencapaian target pada awal periode renstra tahun 2025-2029.

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2025 dengan target jangka menengah terhadap Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 6
Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2025
terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026)

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024	Tahun 2025	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2025	Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra
Indeks Kualitas Air	24,44	29,65	27,04	25,00	108,16

Berdasarkan tabel di atas, dapat terbaca perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir jangka menengah, Persentase capaian 2025 terhadap target akhir renstra adalah 108,16%. Persentase capaian yang didapatkan telah melebihi 100% terhadap target periode renstra tahun 2021-2026.

1.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Adapun perbandingan antara target dan capaian Nasional dengan target dan capaian Kabupaten/Kota pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 7
Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan
Target dan Capaian Kabupaten/Kota

Indikator Sasaran	Nasional		Kabupaten/Kota	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Dokumen Kualitas Air	1	1	1	1

Berdasarkan tabel di atas, target dan capaian nasional dengan target dan capaian Kabupaten/Kota telah tercapai. Dimana penyusunan laporan kualitas air merupakan kewajiban bagi Dinas Lingkungan Hidup baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini menggambarkan perbandingan capaian target nasional dengan capaian target Kabupaten/Kota.

Adapun perbandingan antara target dan capaian Nasional dengan target dan capaian Kabupaten/Kota pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Tabel 3. 8
Perbandingan Target dan Capaian Nasional
dengan Target dan Capaian Kabupaten/Kota

Indikator Sasaran	Nasional		Kabupaten/Kota	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,48	76,49	88.70	83,65

Berdasarkan tabel di atas, dapat terbaca perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, capaian IKLH Nasional melebihi dari target yang telah ditetapkan, sedangkan capaian IKLH Kabupaten/Kota masih dibawah target yang telah ditetapkan. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya nilai indeks respon pada seluruh program penyusun IKLH, yaitu Program Kali Bersih, Program Indonesia Hijau dan Program Langit Biru. Penurunan capaian pada ketiga program tersebut mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan, perencanaan serta implementasi kegiatan lingkungan hidup pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya perbaikan dan penguatan secara terintegrasi pada setiap program agar kinerja respon lingkungan dan capaian IKLH dapat ditingkatkan kembali.

1.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

❖ *Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :*

- Pemantauan kualitas air sungai, danau dilakukan secara rutin.
- Laboratorium uji memiliki akreditasi dan kompetensi yang memadai.

- Koordinasi dan sinkronisasi data lintas OPD, dimana data yang diberikan tidak tumpang tindih dan saling mendukung.
- Pengelolaan data hasil pemantauan yang terintegrasi dan transparan
- Perbaikan metode pengambilan sampling, pengambilan sampling air dilakukan di hari yang sama,
- Terlaksananya kegiatan kali/sungai bersih secara rutin oleh kalangan Pemda bersinergi dengan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi.
- Dukungan dari pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran dan kebijakan
- Kemitraan dengan laboratorium rekanan yang bersertifikasi KAN

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Indeks Kualitas Air (IKA) terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan.
- Pengujian sampel air sungai dan air danau dilakukan di 2 Laboratorium yakni Laboratorium Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Selatan dan Laboratorium di UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sehingga terjadi keterlambatan Hasil Uji Laboratorium atas Parameter Air Sungai dan Danau.

❖ Solusi

- Melakukan penambahan ruang lingkup akreditasi untuk parameter yang dibutuhkan dalam pengujian sampel air sungai, air danau bahkan air limbah di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, sehingga tidak lagi memeriksakan sampel uji di laboratorium lain dan juga bisa mempercepat hasil pengujian serta tidak menghambat dalam proses penyusunan laporan Indeks Kualitas Air.
- Meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai pengelolaan lingkungan yang baik dan benar kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai IKA.

- Memperkuat pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap baku mutu air bagi industri, pertambangan dan usaha lain yang berpotensi menjadi sumber pencemar.
- Meningkatkan pengelolaan limbah domestik melalui penyediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana sanitasi, terutama diwilayah permukiman yang berada di sekitar badan air.
- Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dan peran pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengendalian pencemaran air.
- Melakukan publikasi melalui media terkait pengendalian pencemaran air.
- Memanfaatkan hasil pemantauan dan nilai IKA sebagai dasar perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
- Meningkatkan kegiatan-kegiatan terkait penanaman pohon dan penghijauan agar kab/kota dapat menyeimbangkan kondisi ekologis kota diantaranya yaitu meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro

1.6 ANALISIS ATAS EFISIENASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

❖ Efisiensi Anggaran

- Telah dilakukan efisiensi anggaran pada beberapa sub kegiatan belanja pada program ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

❖ Efisiensi Sumber Daya

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dalam penyampaian informasi maupun pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar, maka dapat terfasilitasi dengan penyebarluasan informasi yang dilakukan melalui website, email serta media sosial instagram Dinas Lingkungan Hidup.
- Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup

Kab. Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, DLH Kab. Luwu Timur tetap bekerja dengan maksimal dalam pemenuhan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2025.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Adapun perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

Tabel 3. 9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Dokumen Kualitas Air	1	1	100%	120.006.880	96.628.976	80,52

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat capaian atas kinerja mencapai 100% sedangkan capaian anggaran 80,52.

Adapun perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Tabel 3. 10
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kualitas Air	25,00	29,65	117,40	120.006.880	96.628.976	80,52

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat capaian kinerja 117,40 dan capaian anggaran 80,52. Pencapaian kinerja yang didapatkan sesuai dengan anggaran yang digunakan.

**1.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Indikator Indeks Kualitas Air di dukung oleh 5 Program, 5 kegiatan dan 10 sub kegiatan. Adapun penjelasan untuk program-program tersebut yaitu:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup**1) Indikator Program adalah:**

- a) Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter indeks kualitas air.

Formulasi : *“Jumlah titik pantau air yang memenuhi baku mutu dibagi jumlah seluruh titik pantau dikali seratus”*.

- b) Persentase titik pantau udara dengan status memenuhi parameter indeks kualitas udara.

Formulasi : *“Jumlah titik pantau udar yang memenuhi baku mutu dibagi jumlah seluruh titik pantau dikali seratus”*.

Target kinerja tahun 2025 untuk kualitas air adalah 82,6% dan terealisasi 82,6% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Dan untuk kualitas udara adalah 9,09 % dan terealisasi 9,09 dengan persentase capaian 100%.

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup didukung oleh 1 kegiatan yaitu:

1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator Tersedianya dokumen lingkungan yang dihasilkan. Adapun realisasi kegiatan ini adalah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 4 dokumen yang telah terealisasi.

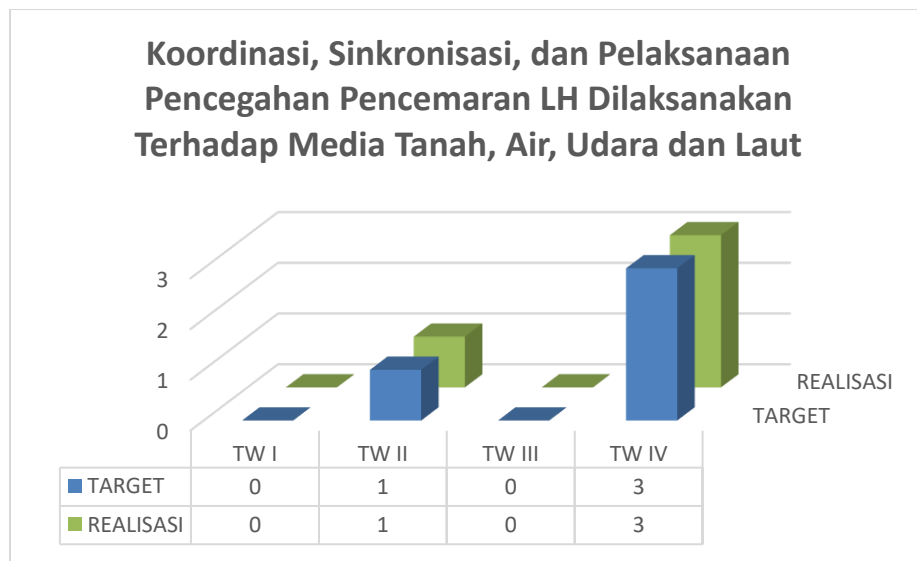
Tabel 3. 11
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen lingkungan yang dihasilkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
a	Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen Uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan laut	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
b	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut.

Sub Kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air dan Udara, dimana target tahun 2025 sebanyak 4 (empat) dokumen dan telah terealisasi sebanyak 4 (empat) dokumen uji kualitas lingkungan hidup, berupa:

- 1) Laporan Pemantauan Kualitas Air Semester I Tahun 2025
- 2) Laporan Pemantauan Kualitas Air Semester II Tahun 2025
- 3) Laporan Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2025
- 4) Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025



Grafik 3. 6

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran

Selain penyusunan dokumen uji kualitas lingkungan, adapula pelaksanaan kegiatan lainnya, antara lain;

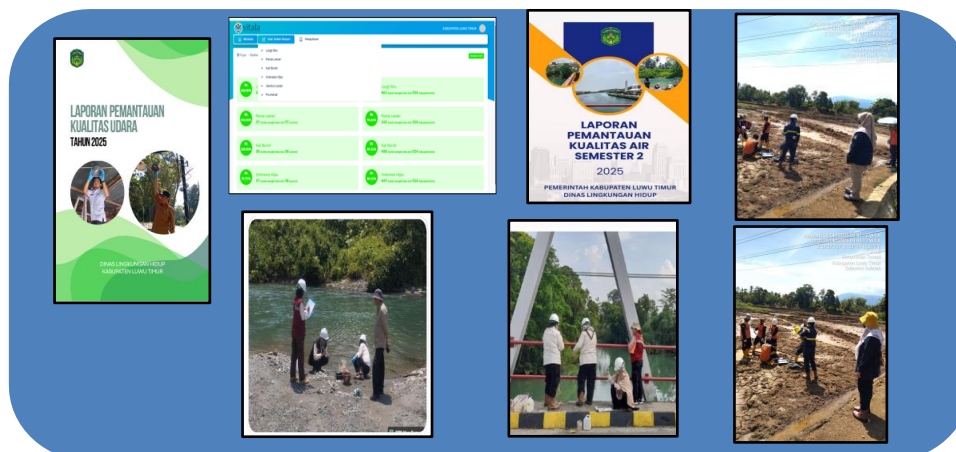
1. Melakukan penginputan data Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) dengan program Langit Biru, Indonesia Hijau dan Kali Bersih pada aplikasi SITALA
2. Melakukan rangkaian kegiatan penyaksian dan pendampingan pengambilan sampel air dan tanah terkait kebocoran pipa minyak MFO PT. Vale Indonesia, Tbk. di Desa Lioka, Kec. Towuti
3. Mengikuti rapat melalui zoom meeting terkait evaluasi penilaian Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) program Kali Bersih yang diselenggarakan oleh Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
4. Mengikuti rapat melalui zoom meeting terkait evaluasi data pemantauan IKLH dan IRLH Tahun 2025 pada Aplikasi SITALA yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Wilayah Pesisir dan Laut
5. Mengikuti Forum Group Discussion (FGD) Multipihak dalam Mendorong Inisiasi Normalisasi Pesisir Danau Matano Secara Terintegrasi dengan tema “Dari Matano Untuk Dunia” yang diselenggarakan oleh Yayasan Bumi Sawerigading (YBS) Tana Luwu dengan Synchronicity Earth (SE), SHOAL.

Pada sub kegiatan ini total anggaran setelah terjadi efisiensi dan anggaran perubahan sebesar Rp 120.006.880 dan telah terealisasi sebesar 80,52%.

Dengan rincian sebagai berikut:

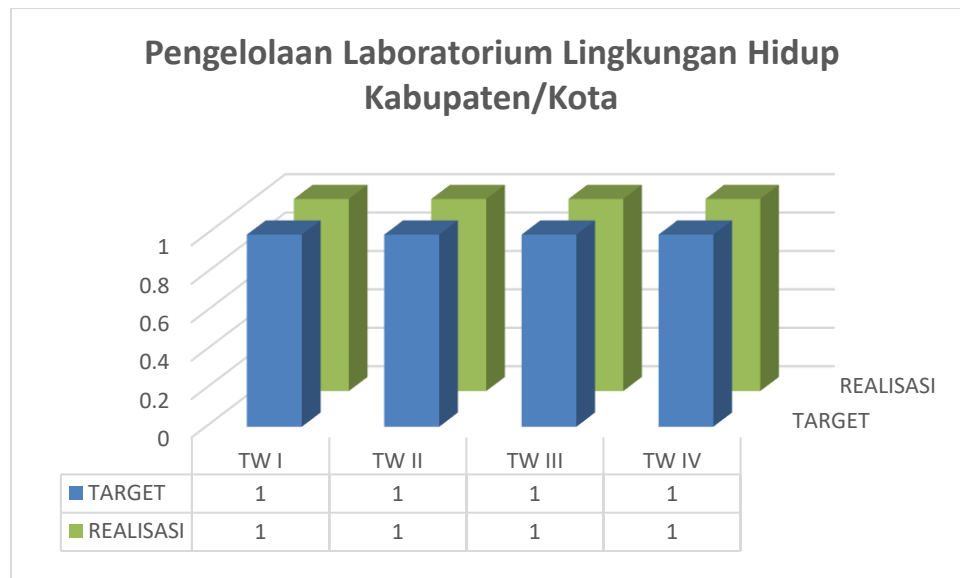
- ✓ Belanja Alat Tulis Kantor terealisasi Rp 339.216 sebesar 84,80% disebabkan penyesuaian harga saat negosiasi melalui inaproc.
- ✓ Belanja kertas dan cover terealisasi sebesar Rp 497.280 sebesar 88,19% disebabkan penyesuaian harga saat negosiasi melalui inaproc.
- ✓ Belanja bahan cetak terealisasi Rp 1.118.880 sebesar 88,80% disebabkan harga satuan bahan cetak di bawah standar satuan harga (SSH).
- ✓ Belanja bahan komputer terealisasi Rp 316.350 sebesar 91,70% disebabkan penyesuaian harga saat negosiasi melalui inaproc.
- ✓ Belanja bahan untuk kegiatan kantor lainnya terealisasi Rp 2.720.000 sebesar 100 %
- ✓ Belanja makanan dan minuman rapat terealisasi Rp 3.703.600 sebesar 98,50%
- ✓ Belanja jasa tenaga laboratorium terealisasi Rp 45.353.150 sebesar 69,43%. Rendahnya realisasi disebabkan perubahan lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dimana petunjuk teknis (Juknis) mengalami perubahan sehingga mempengaruhi rentang waktu pemantauan kualitas lingkungan.
- ✓ Belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang terealisasi Rp 2.800.000 sebesar 70% disebabkan harga satuan sewa alat angkutan apung bermotor di bawah standar satuan harga (SSH).
- ✓ Belanja perjalanan dinas biasa telah terealisasi sebesar 95,54%.

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut.



b. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan, dimana target tahun 2025 sebanyak 1 Dokumen dan telah terealisasi 1 Dokumen,



Grafik 3. 7
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium

kegiatan ini memuat antara lain, Pengambilan sampel, Pengujian Sampel dan Penyampaian Laporan Hasil Uji, antara lain :

❖ Pengambilan Sampel Air sebanyak 350 Sampel terdiri atas :

- Air Limbah : 166 Sampel
- Air Sungai : 120 Sampel
- Air Danau : 11 Sampel
- Air Laut : 8 Sampel
- Air Minum : 23 Sampel
- Air Sumur : 20 Sampel
- Air Kolom : 2 Sampel.

Pada sub kegiatan ini total anggaran Efesiensi sebesar Rp. 337.330.736 dan terealisasi sebesar 69.06% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Bahan – Bahan Kimia telah terealisasi sebesar 45,31%, merupakan anggaran yang disediakan dalam rangka melakukan pengujian sampel namun terdapat belanja bahan kimia yang tidak sesuai harga di penyedia,

sehingga tidak memudahkan dalam proses selanjutnya untuk transaksi belanja

- ✓ Belanja ATK telah terealisasi sebesar 73.76%. terdapat penyesuaian harga pada saat negosiasi melalui Inaproc
- ✓ Belanja kertas dan cover telah terealisasi sebesar 91,18%. terdapat penyesuaian harga pada saat negosiasi melalui Inaproc
- ✓ Belanja bahan komputer telah terealisasi sebesar 93,06%.
- ✓ Belanja makan minum terealisasi sebesar 98.50 %
- ✓ Belanja jasa tenaga laboratorium telah terealisasi sebesar 100%
- ✓ Belanja Jasa Tenaga Administrasi telah terealisasi sebesar 100%
- ✓ Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi telah terealisasi sebesar 100%
- ✓ Belanja Jasa Kalibrasi belum terealisasi 73.49%, ada beberapa alat yang rusak sehingga tidak dilakukan kalibrasi diantaranya Digital Thermometer, DO Meter, Pipet Volume, Refrigerator, Spektrofotometer
- ✓ Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Kimia telah terealisasi sebesar 60.31%, Pemeliharaan disiapkan untuk Alat Spektrofotometer AAS namun alat tersebut sudah rusak berat sehingga anggaran yang tersedia digunakan untuk pemeliharaan alat laboratorium lainnya.
- ✓ Belanja perjalanan dinas telah terealisasi sebesar 98,41%.

Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota



2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Indikator Program adalah Persentase penghasil limbah B3 yang diawasi.

Formulasi : *"jumlah pemilik ijin LB3 yang diawasi dibagi dengan jumlah pemilik ijin LB3 dikali seratus"*.

Terdapat 45 pemilik izin LB3 yang diawasi terhadap 45 pemilik izin LB3 dikali 100 = 100%.

Target kinerja tahun 2025 adalah 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) oleh 1 kegiatan.

Tabel 3. 12
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyimpanan sementara Limbah B3	Usaha yang taat pengelolaan limbah B3	45 Usaha	45 Usaha	100 %
a	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50 dokumen	50 dokumen	100 %

1) Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah usaha yang taat pengelolaan Limbah B3. Adapun realisasi kegiatan ini adalah 45 Usaha dari target 45 usaha/kegiatan atau capaian 100% Adapun realisasi kegiatan ini antara lain:

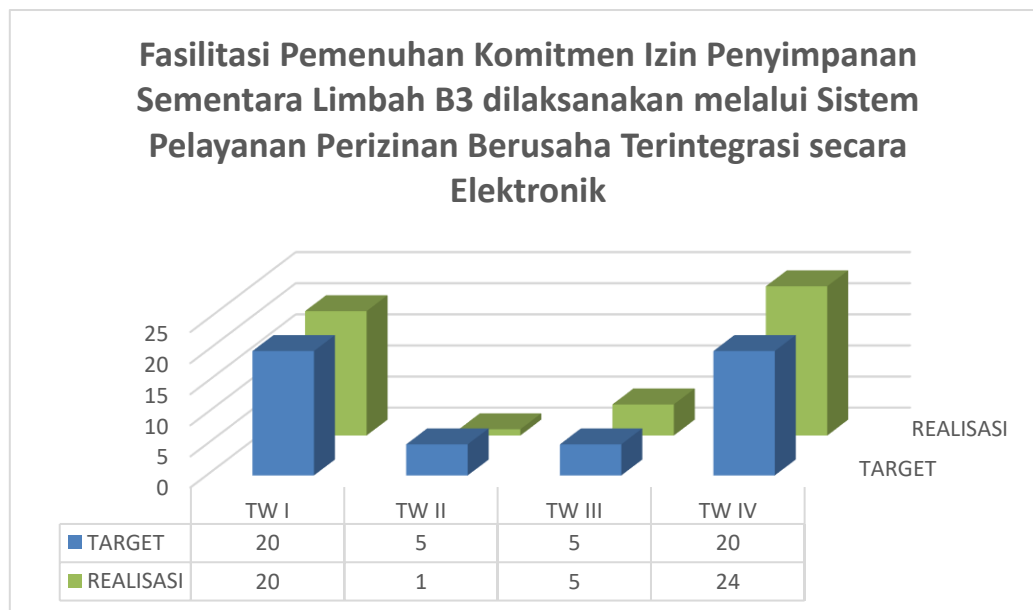
1. PT. Vale Indonesia, Tbk;
2. PT.Citra Lampia Mandiri
3. PT. Bumi Maju Sawit
4. PT.Lycon Asia Mandiri.
5. PT.Mandiri Palmera Agrindo
6. PT. Prima Utama Lestrai (PUL)

7. PLN UPT PALU
8. PT. Teguh Wira Pratama
9. PT. Honda Sanggar Laut Palopo
10. PT. Indra Pratama Wasuponda
11. PT. Mandiri Palmera Agrindo
12. PT. Pancaran Darat Transport
13. PT. Aneka Jasa Sorowako
14. PT. Sinar Sentosa Utama
15. PT. Bangunindo Karya Utama
16. PT. Samator Indo Gas
17. PT. Star Mitra Sulawesi
18. PT. Hadji Kalla Cabang Malili
19. PT. Inti Aset Sulawesi Indonesia
20. Yamaha Malili
21. Yamaha Tomoni
22. Honda Malili
23. PT Prima Utama Lestari
24. PT. Panca Digital Solution
25. RSUD I Lagaligo
26. RSUD Malili
27. Laboratorium Kesehatan Kab. Luwu Timur
28. Puskesmas Lakawali
29. Puskesmas Malili
30. Puskesmas Mahalona
31. Puskesmas Tomoni
32. Puskesmas Bonepute
33. Puskesmas Nuha
34. Puskesmas Angkona
35. Puskesmas Mangkutana
36. Puskesmas Wawondula
37. Puskesmas Wasuponda
38. Puskesmas Tomoni Timur
39. Puskesmas Wotu
40. Puskesmas Burau

- 41. Puskesmas Bantilang
- 42. Puskesmas Kalaena
- 43. Puskesmas Timampu
- 44. Puskesmas Lampia
- 45. Puskesmas Parumpanai

- a. Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dimana target 50 dokumen dan realisasi 50 dokumen.



Grafik 3. 8
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
Sub Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3

Pada sub kegiatan ini total anggaran sebesar Rp 37,092,500.00,- dan telah terealisasi sebesar 26.15 % dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor terealisasi 91.72%, dikarenakan terdapat penyesuaian harga pada saat negosiasi melalui Inaproc.

- ✓ Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover terealisasi 89.21 % dikarenakan terdapat penyesuaian harga pada saat negosiasi melalui Inaproc.
- ✓ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak terealisasi 91.97% akan terealisasi di triwulan berikutnya.
- ✓ Belanja makan minum rapat terealisasi 0% anggaran untuk persiapan rapat terkait kebocoran pipa PT.Vale tidak dibelanjakan.
- ✓ Belanja Jasa Tenaga Administrasi telah terealisasi 100%
- ✓ Belanja Perjalanan Dinas Biasa telah terealisasi 98.88%

Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.



3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Indikator Program adalah Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH.

Formulasi : *“jumlah usaha/kegiatan yang taat dibagi jumlah pemilik izinlingkungan yang dibina dan diawasi dikali seratus”*.

Terdapat 35 jumlah usaha/kegiatan yang taat terhadap 35 jumlah pemilik IL yang dibina dan diawasi dikali 100 = 100%.

Target kinerja tahun 2025 adalah 100% dan terealisasi 100 % dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) oleh 1 kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3. 13
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	Terlaksananya Usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi	30 Usaha/ Kegiatan	35 Usaha/ Kegiatan	106,67 %
Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izinPPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	15 Dokumen	21 Dokumen	140 %
Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Badan Usaha dan / atau kegiatan yang diawasi	30 Badan usaha	35 Badan usaha	116,67%

Indikator kegiatan: Terlaksananya Usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi. Adapun realisasi kegiatan ini adalah 35 Usaha/kegiatan dari target 30 usaha/kegiatan atau capaian 106,67%. Adapun usaha/kegiatan yang dibina dan

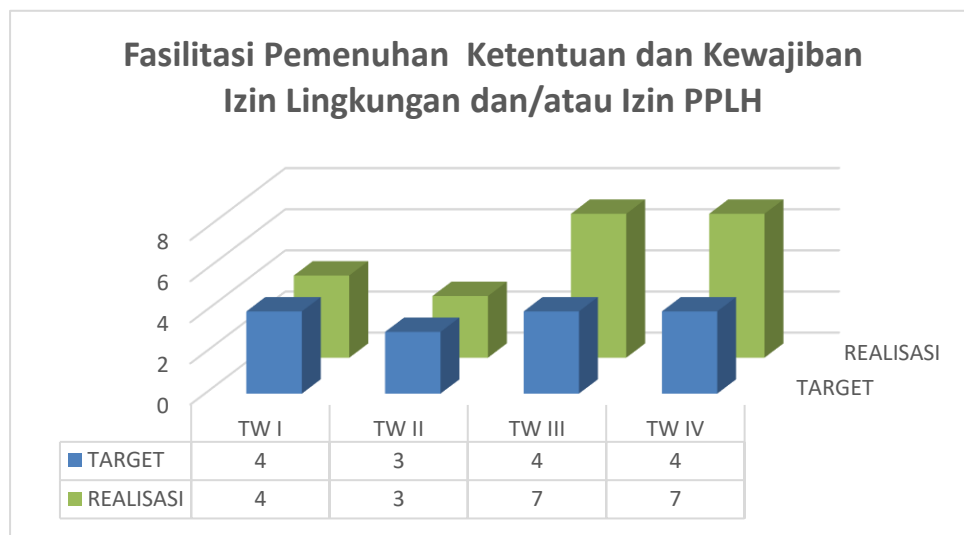
diawasi antara lain:

1. PT. Panca Digital Solution
2. PT. Bangunindo Karya Utama
3. PT. Arkora Hydro Malili
4. PT. Star Mitra Sulawesi
5. TPA Asana
6. PT. Perkebunan Nusantara XIV
7. PT. Mandiri Palmera Agrindo
8. PT. Teguh Wira Pratama
9. PT. Bumi Maju Sawit
10. PT. Inti Aset Sulawesi Indonesia
11. PT. Mitra Berkarya Sejati
12. PT. Vale Indonesia, Tbk
13. UPTD Puskesmas Malili Kab. Luwu Timur
14. UPTD Puskesmas Lampia Kab. Luwu Timur
15. UPTD Puskesmas Lakawali Kab. Luwu Timur
16. UPTD Puskesmas Angkona Kab. Luwu Timur
17. UPTD Puskesmas Tomoni Kab. Luwu Timur
18. UPTD Puskesmas Tomoni Timur Kab. Luwu Timur
19. UPTD Puskesmas Wotu Kab. Luwu Timur
20. RSUD I Lagaligo Kab. Luwu Timur
21. UPTD Puskesmas Bonepute Kab. Luwu Timur
22. UPTD Puskesmas Burau Kab. Luwu Timur
23. UPTD Puskesmas Wasuponda Kab. Luwu Timur
24. UPTD Puskesmas Nuha Kab. Luwu Timur
25. UPTD Puskesmas Mangkutana Kab. Luwu Timur
26. UPTD Puskesmas Kalaena Kab. Luwu Timur
27. UPTD Puskesmas Wawondula Kab. Luwu Timur
28. UPTD Puskesmas Timampu Kab. Luwu Timur
29. UPTD Puskesmas Mahalona Kab. Luwu Timur
30. UPTD Puskesmas Parumpanai Kab. Luwu Timur
31. PT. Mars Symbiosciense Indonesia
32. PT. Mandiri Palmera Agrindo
33. PT. Bumi Maju Sawit

34. PT. Latanindo Graha Persada
35. PT. Star Mitra Sulawesi

a. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah terlaksana dan memenuhi target kinerja yaitu 15 dokumen dan terealisasi sebanyak 21 dokumen dengan capaian sebesar 140%



Grafik 3. 9
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
Sub Kegiatan Fasilitasi izin PPLH

Kegiatan ini memuat antara lain, fasilitasi pemenuhan dokumen lingkungan untuk setiap pelaku usaha serta kunjungan lapangan yang dilakukan untuk mengecek kondisi real di lapangan.

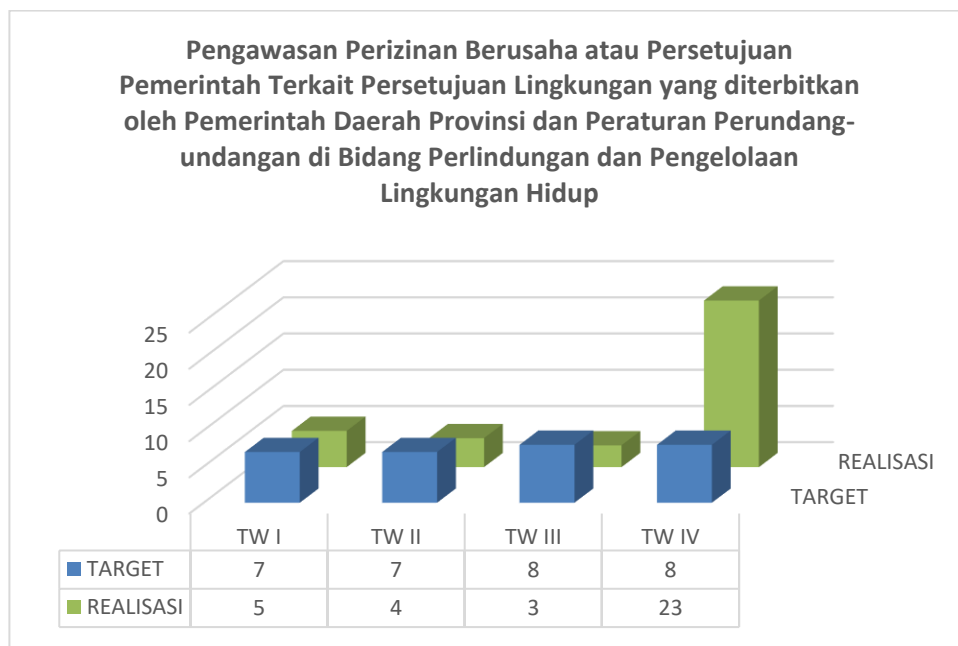
Pada sub kegiatan ini total anggaran Rp. 27.911.630 dan telah terealisasi sebesar 99,62% dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Belanja ATK serta Belanja Kertas dan Cover terealisasi 97,25%
- ✓ belanja perjalanan dinas telah terealisasi sebesar Rp 27.330.500 atau 99,67% pada kunjungan lapangan ke lokasi usaha untuk memantau keadaan real dan dalam kegiatan rapat terkait dengan pemenuhan dokumen lingkungan.

Dokumentasi Kegiatan Fasilitas pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH.



- b. Sub Kegiatan Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



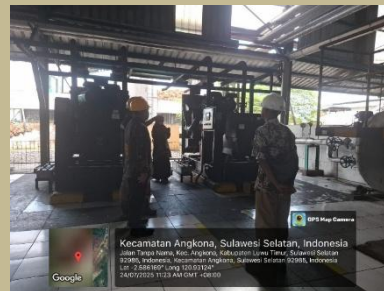
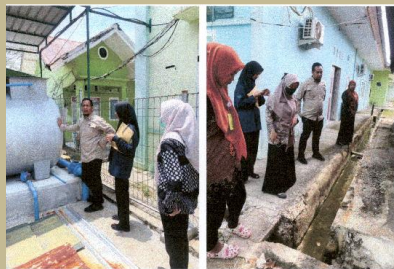
Grafik 3. 10
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub Kegiatan Pengawasan perizinan berusaha

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah terlaksana dan memenuhi target kinerja untuk pengawasan terhadap 32 usaha/kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan terhadap target 30 usaha/kegiatan. Kegiatan ini memuat antara lain, pengawasan yang dilakukan untuk menilai ketaatan terhadap dokumen lingkungan yang telah dibuat oleh pelaku usaha/kegiatan.

Pada sub kegiatan ini total anggaran 26.138.910 dan telah terealisasi sebesar 98,62%, adapun rinciannya:

- ✓ Belanja ATK terealisasi 89,72%,
- ✓ Belanja Makan dan Minum Rapat juga terealisasi 98,46%.
- ✓ perjalanan dinas telah terealisasi sebesar Rp. 24.530.000 pada kunjungan lapangan ke Lokasi Usaha yang diawasi.

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Indikator Program adalah Persentase penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup.

Formulasi : *“jumlah sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup dibagi jumlah sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup yang teregistrasi dikali seratus”*.

Terdapat 1 perkara yang diselesaikan terhadap 1 perkara yang teregistrasi dikali 100 = 100%.

Target kinerja tahun 2025 adalah 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup didukung oleh 1 kegiatan.

1) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

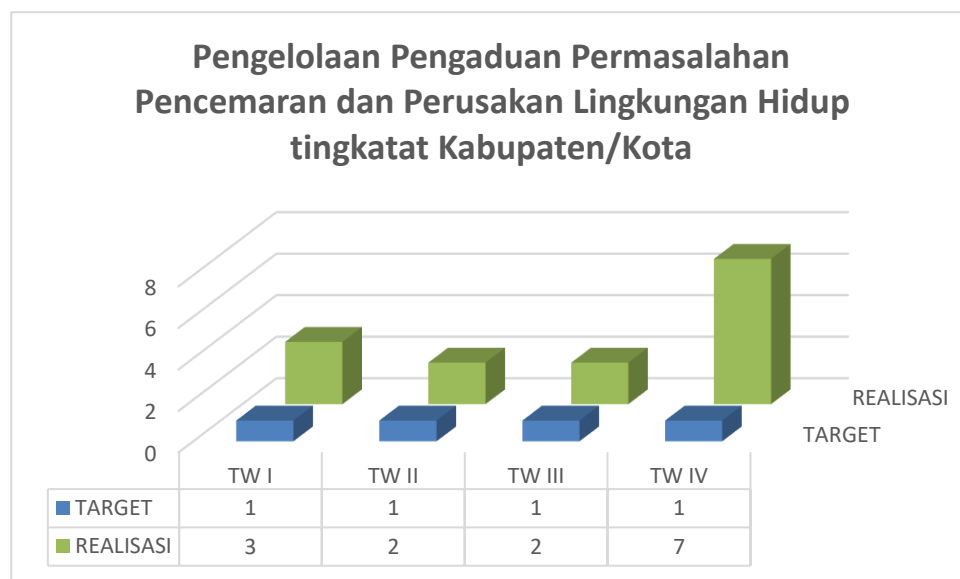
Tabel 3. 14
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase Masalah Lingkungan Yang teregistrasi	100%	100%	100%
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	4 Pengaduan	14 Pengaduan	350%
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Perkara	1 Perkara	100%

Indikator kegiatan: Persentase Masalah Lingkungan Yang Teregistrasi.
Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan.

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah dilaksanakan dan telah melebihi target kinerja Tahun 2025. Terdapat 14 Pengaduan lingkungan yang diselesaikan atas target 4 pengaduan atau capaian senilai 350%.



Grafik 3. 11

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan

Pada sub kegiatan ini total anggaran 27.537.600 dan telah terealisasi sebesar 56,12%.

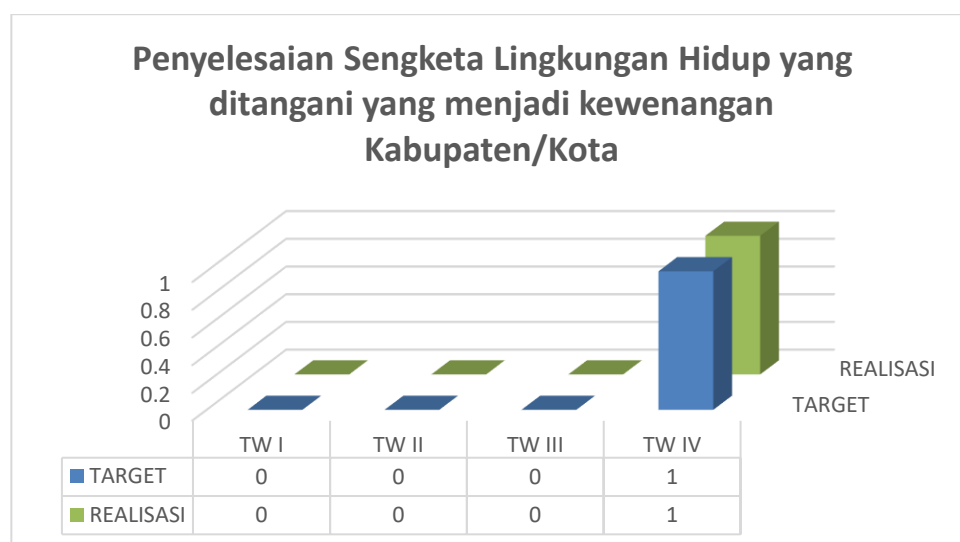
- ✓ Belanja Kertas dan Cover terealisasi 96,15%.
- ✓ Belanja Jasa tenaga administrasi telah terealisasi Rp 6,000,000 sebanyak 1 orang selama 6 bulan (Januari s/d Juni).
- ✓ Adapun perjalanan dinas telah terealisasi sebesar Rp. 9.177.300 pada kunjungan lapangan untuk melihat langsung ke lokasi yang diadukan

**Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat
Kabupaten/Kota**



- b. Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah dilaksanakan dan telah mencapai target kinerja Tahun 2025. Dimana terdapat 1 perkara yang ditangani atas 1 target yang ditetapkan atau capaian senilai 100%.



Grafik 3. 12
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub Kegiatan Penyelesaian sengketa

Pada sub kegiatan ini total anggaran 109.919.000 dan telah terealisasi sebesar 96,50%.

- ✓ Belanja ATK terealisasi 90,65%,
- ✓ dan Biaya Pengujian Sampel terealisasi sebesar 96,59%,
- ✓ perjalanan dinas telah terealisasi sebesar Rp. 4.490.000 yang digunakan untuk peninjauan lapangan ke lokasi sengketa lingkungan

Dokumentasi Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota



5. Program Pengelolaan Persampahan

Indikator Program adalah Indeks kinerja pengelolaan sampah.

Target kinerja tahun 2025 adalah 74% dan terealisasi 65,47% dengan persentase capaian kinerja sebesar 88,47%. Dimana jumlah sampah yang tertangani sebanyak 30,913.24 ton terhadap jumlah timbulan sampah sebanyak 47.219,61 ton x 100 = 65,47 % . Program Pengelolaan Persampahan didukung oleh 1 kegiatan yaitu:

- Kegiatan Pengelolaan Sampah

Tabel 3. 15
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

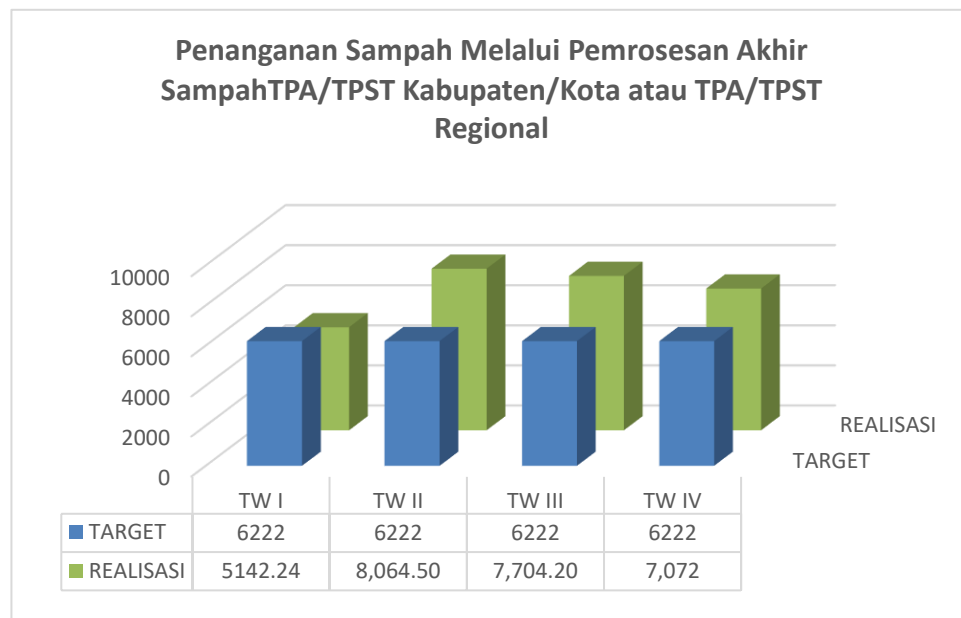
Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Capaian (%)
Pengelolaan sampah	Persentase sampah yang dikelola	74%	65,47%	88,47%	
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	24.888 Ton	27.982,94 Ton	112,43%	
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan	1 dokumen	1 dokumen	100%	
Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Mengacu pada Jakstrada Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	127 Kelompok	205 kelompok	161,42%	

1) Kegiatan Pengelolaan Sampah

Indikator kegiatan: Persentase sampah yang dikelola. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan.

- a. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional.

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan, dimana target tahun 2025 sebanyak 24.888 ton dan telah terealisasi 27.982,94 ton atau capaian sebesar 112,43%.



Grafik 3. 13
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub Kegiatan Penanganan sampah

Sub kegiatan ini memuat antara lain pengangkutan sampah di 7 Kecamatan yakni: Kecamatan Malili, Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti. Untuk wilayah kecamatan Malili dilakukan pengangkutan sampah dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah yang diangkut oleh petugas kebersihan dengan menggunakan mobil pengangkut sampah dan motor roda tiga untuk kemudian di buang di TPA Ussu.

Pada sub kegiatan ini total anggaran Rp. 4.910.392.073 dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.440.218.227 atau 90,42%. Adapun rinciannya antara lain:

- ✓ Belanja bahan-bahan dan Pelumas terealisasi sebesar Rp. 581.580.400,00 atau sebesar 99,98%.

- ✓ Belanja Alat/Bahan terealisasi sebesar Rp.784.770 atau sebesar 83,10%
- ✓ Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan kantor kertas dan terealisasi sebesar Rp. 1.346.430 atau sebesar 91,13%
- ✓ Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan kantor bahan Komputer terealisasi sebesar Rp. 1.221.000 atau sebesar 96,52%.
- ✓ Belanja Makanan dan Minuman aktivitas lapangan terealisasi sebesar Rp. 20.910.000 atau sebesar 99,29%.
- ✓ Belanja Jasa Tenaga Laboratorium telah terealisasi senilai 650.000,00 dan masih tersisa senilai 2.350.000,00 hal ini disebabkan jumlah sampel sampah atau limbah yang diuji ternyata lebih sedikit dari perencanaan, maka biaya jasa tenaga laboratorium otomatis berkurang.
- ✓ Belanja Jasa Tenaga Kebersihan masih tersisa senilai 436.500.000,00, hal ini disebabkan karena adanya penambahan jasa tenaga kebersihan akan tetapi belum sepenuhnya terekrut berdasarkan target kebutuhan tenaga kebersihan.
- ✓ Belanja jasa Tenaga Keamanan telah sesuai dengan Anggaran realisasi 100%
- ✓ Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan masih tersisa senilai 1.019.296,00, hal ini sebabkan oleh adanya selisih perhitungan antara estimasi tarif pajak atau retribusi dalam anggaran dengan nilai real yang diterbitkan.
- ✓ Belanja Lembur terealisasi sebesar Rp. 88.127.000 atau sebesar 99,93%
- ✓ Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional dan telah terealisasi sesuai dengan pertriwulan.
- ✓ Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional dan telah terealisasi sesuai dengan pertriwulan.
- ✓ Belanja pemeliharaan Alat Besar- masih tersisa senilai 1.221.888,00, hal ini disebabkan karena sudah tidak adanya kerusakan berat dan tidak memerlukan perbaikan besar hingga akhir tahun anggaran.
- ✓ Belanja pemeliharaan Alat Besar-Loader realisasi 99,99%.
- ✓ Belanja pemeliharaan Alat Besar darat Lainnya masih tersisa senilai 5.251.252,00 hal ini disebabkan karena sudah tidak adanya kerusakan

berat dan tidak memerlukan perbaikan besar hingga akhir tahun anggaran.

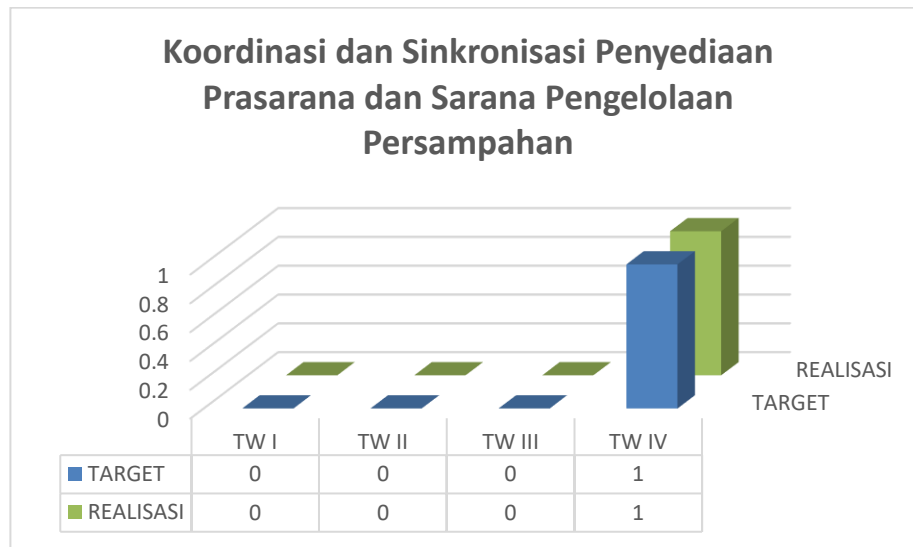
- ✓ Belanja pemeliharaan Alat Angkutan-kendaraan Bermotor Penumpang masih tersisa senilai 1.085.400,00, hal ini disebabkan karena sudah tidak adanya kerusakan berat dan tidak memerlukan perbaikan besar hingga akhir tahun anggaran.
- ✓ Belanja pemeliharaan Alat Angkutan-kendaraan Bermotor Beroda Tiga masih tersisa senilai 16.500.000,00, hal ini disebabkan karena sudah tidak adanya kerusakan berat dan tidak memerlukan perbaikan besar hingga akhir tahun anggaran.
- ✓ Belanja pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Timbangan/Biara masih tersisa senilai 3.965.000,00, hal ini disebabkan karena sudah tidak adanya kerusakan berat dan tidak memerlukan perbaikan besar hingga akhir tahun anggaran.
- ✓ Belanja pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah tangga- Alat kantor Lainnya realisasi sebesar 99,09%
- ✓ Belanja Perjalanan Dinas Biasa realisasi sebesar 99,62%

Dokumentasi Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota.



- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang disediakan. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah terlaksana dan memenuhi target kinerja 1 dokumen.



Grafik 3. 14

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

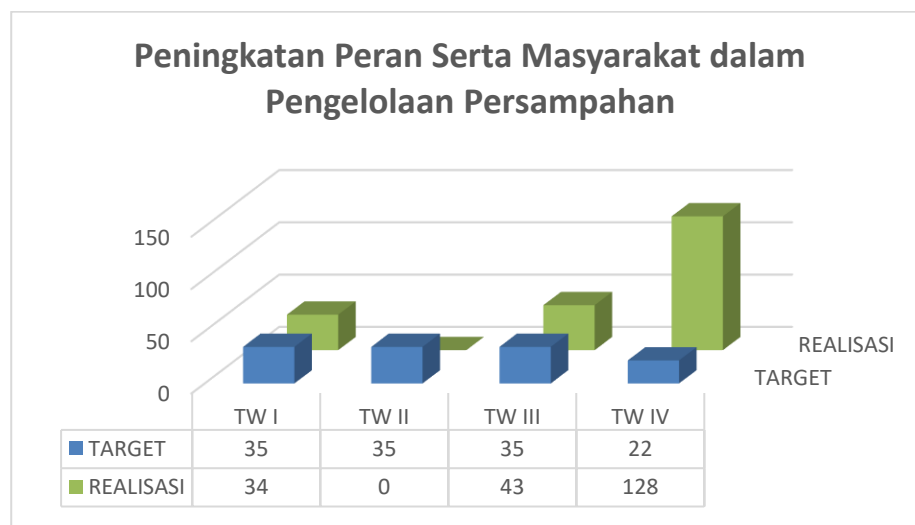
Realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini yakni 83,37%. Terdapat belanja modal perkakas bengkel kayu dan belanja modal alat pembersih yang tidak dibelanjakan dikarenakan adanya keterlambatan proses pengadaan karena terjadi perubahan rincian belanja yang akan dibelanjakan.

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan



- b. Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, dimana target pada tahunan adalah 127 kelompok, dimana untuk realisasi ada 205 kelompok Bank Sampah di Desa maupun sekolah yang mendapat pembinaan dalam pengelolaan sampah yang telah dibina.



Grafik 3. 15
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub Kegiatan Peningkatan Peran serta

Kegiatan ini memuat antara lain berupa Sosialisasi maupun pembinaan Bank Sampah di Desa/Kelurahan maupun sekolah-sekolah,

Pada sub kegiatan ini total anggaran sebesar Rp 103,280,090.00 dan telah terealisasi sebesar 87.04 % dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Alat Tulis Kantor terealisasi 85.22% dikarenakan terdapat penyesuaian harga pada saat negosiasi melalui Inaproc
- ✓ Belanja Kertas dan Cover terealisasi 88.71 % dikarenakan terdapat penyesuaian harga pada saat negosiasi melalui Inaproc.
- ✓ Belanja bahan cetak terealisasi 94.35 % dikarenakan terdapat penyesuaian harga pada saat negosiasi melalui Inaproc.
- ✓ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer masih 91.70% dikarenakan terdapat penyesuaian harga pada saat negosiasi melalui Inaproc

- ✓ Belanja makan minum rapat terealisasi 34.67 %, kurangnya realisasi dikarenakan anggaran disiapkan untuk makan minum rapat kegiatan persiapan lomba kebersihan namun tidak direalisasikan.
- ✓ Belanja makan minum aktivitas lapangan terealisasi 66%, anggaran disediakan untuk persiapan peringatan hari lingkungan namun tidak dilaksanakan
- ✓ Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia terealisasi 67,65% anggaran disediakan untuk persiapan peringatan hari lingkungan namun tidak dilaksanakan
- ✓ Belanja Jasa Tenaga Administrasi telah terealisasi 100%
- ✓ Belanja Perjalanan Dinas Biasa telah terealisasi 99.94 %.

Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.



1.8 KESIMPULAN

- ❖ Capaian Kinerja Sasaran “Terpantaunya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan” telah terealisasi dengan tersusunnya 1 dokumen kualitas air.
- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada dokumen DPPA – SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun anggaran 2025 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : Rp. 11.201.553.588,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.573.056.891,- atau sebesar 89,09%.
- ❖ Nilai IKA dijadikan sebagai dasar perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta sebagai referensi dalam menentukan kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (sesuai Undang-undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- ❖ Tingkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait (Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pelaku Usaha dan/atau kegiatan) untuk bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- ❖ Perkuat pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap baku mutu air bagi industri, pertambangan dan usaha lain yang berpotensi menjadi sumber pencemar.
- ❖ Tingkatkan pengelolaan limbah domestik melalui penyediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana sanitasi, terutama diwilayah permukiman yang berada di sekitar badan air.
- ❖ Melakukan publikasi melalui media terkait pengendalian pencemaran air.

2. DOKUMEN KUALITAS UDARA

2.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Indikator Kinerja yang digunakan Pada Renstra 2025-2029 adalah Dokumen Kualitas Udara. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 1 (satu) dokumen kualitas udara dan realisasi sebanyak 1 (satu) dokumen atau capaian sebesar 100%. Dokumen Kualitas Udara merupakan dokumen yang berisi gambaran kualitas udara ambien di Kabupaten Luwu Timur. Pengumpulan data primer kualitas udara diambil dengan cara sampling di 8 (delapan) titik yang mewakili kriteria lokasi pemantauan sesuai dengan permen LH/BPLH Nomor 14 tahun 2025 yang meliputi pemasangan alat pemantauan kualitas udara ambien pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, permukiman, transportasi dan perkantoran. Pengambilan data kualitas udara ambien di Kabupaten Luwu timur dilakukan secara manual menggunakan metode Passive sampler. Pengadaan peralatan dan pengiriman serta analisis passive sampler menggunakan anggaran APBN Direktorat pengendalian Pencemaran Udara dan Kerusakan Lingkungan dan APBD Kabupaten Luwu Timur T.A 2025.

Nilai IKU Luwu Timur dihitung dengan membandingkan konsentrasi rata-rata tahunan dengan Baku Mutu Udara Ambien sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendapatkan Indeks NO₂, SO₂, dan PM_{2.5}. Nilai rata-rata Indeks NO₂, SO₂, dan PM_{2.5} (IndeksINA) selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus IKU. Perhitungan nilai IKU dimulai dengan menginput data data hasil uji laboratorium kualitas udara kedalam aplikasi IKLH. Semua data kualitas udara tertuang didalam dokumen kualitas udara yang telah disusun.

Tabel 3. 16
Target dan Realisasi

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Dokumen Kualitas Udara	1 dokumen	1 dokumen	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Target kinerja dokumen kualitas udara pada tahun 2025 adalah 1 dokumen dan realisasi sebanyak 1 dokumen atau capaian sebesar 100%.

Sedangkan Indikator Kinerja sasaran yang digunakan Pada Renstra 2021-2026 adalah Indeks Kualitas Udara.

Tabel 3. 17
Target dan Realisasi

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Udara	81,35	89,17	109,61 %

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara maka di dapatkan indeks kualitas udara tahun 2025 sebesar 89,17 dengan target 81,35 atau dengan capaian 109,61 %. Realisasi IKU tahun 2025 melebihi dari target IKU yang ditetapkan akan tetapi mengalami penurunan dibanding nilai IKU tahun 2024 sebesar 91,85. Penurunan nilai ini berkorelasi dengan meningkatnya konsentrasi polutan di beberapa titik pemantauan yakni di sektor perumahan dan sektor transportasi yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas buang dari kendaraan bermotor penumpang dimana jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya.

2.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3. 18
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Udara	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian

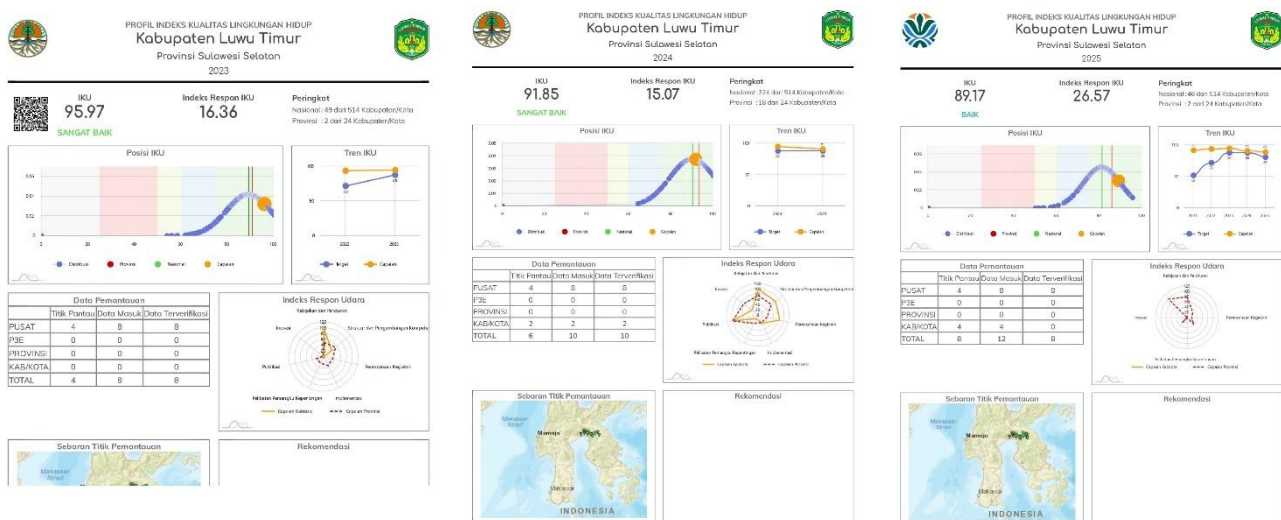
tahun 2023, 2024, dan 2025. Setiap tahun dilakukan penyusunan dokumen kualitas Udara atas hasil pemantauan kualitas udara.

Sedangkan perbandingan target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya untuk untuk Indikator Kinerja sasaran Pada Renstra 2021-2026 adalah:

Tabel 3. 19
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Udara (IKU)	29,6	38,87	131,32%	29,65	37,20	125,46%	81,35	89,17	109,61

Gambar Nilai IKU Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023, 2024 dan 2025



Berdasarkan tabel di atas maka, nilai pada target dan realisasi yang digunakan untuk tahun 2023 dan tahun 2024 merupakan hasil dari nilai konversi dari komponen indeks kualitas udara yang dikalikan bobot rumus perhitungan ($0,405 \times$ nilai IKU), sehingga didapatkan nilai sesuai tabel diatas. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023, 2024 dan 2025. Nilai IKU tahun 2025 adalah 89,17 atau setelah dikonversi mendapatkan nilai 36,11; tahun 2024 adalah 37,20, dan tahun 2023 adalah

38,87. Nilai IKU yang diperoleh tahun 2025 mengalami Penurunan dari nilai IKU tahun 2024. Penurunan kualitas udara disebabkan meningkatnya konsentrasi polutan di beberapa titik pemantauan yaitu sektor pemukiman dan sektor transportasi. Peningkatan konsentrasi polutan tersebut diduga kuat dipengaruhi oleh bertambahnya aktivitas lalu lintas seiring meningkatnya jumlah penghuni perumahan serta berkurangnya jumlah vegetasi penyerap polutan di area tersebut. Oleh karena adanya penurunan nilai IKU, perlu adanya penguatan upaya pengendalian pencemaran udara melalui peningkatan pemantauan, pengendalian sumber emisi dan koordinasi lintas sektor guna mencegah penurunan kualitas udara lebih lanjut.

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini

2.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS OPD

Tabel 3. 20

Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2025
terhadap Target Jangka Menengah (2025-2029)

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024	Tahun 2025	rata-rata realisasisampai dengan tahun 2025	Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra
Dokumen Kualitas Udara	1	1	1	5	20%

Berdasarkan tabel di atas, dapat terbaca perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir jangka menengah, Persentase capaian 2025 terhadap target akhir renstra adalah 20%. Hal ini masih sejalan dengan pencapaian target pada awal periode renstra tahun 2025-2029.

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 21
Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2025
terhadap Target Jangka Menengah(2021-2026)

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024	Tahun 2025	rata-rata realisasisampai dengan tahun 2025	Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra
Indeks KualitasUdara	37,20	36,11	36,65	38,00	95,03%

Berdasarkan tabel di atas, dapat terbaca perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir jangka menengah, Persentase capaian 2025 terhadap target akhir renstra adalah 95,03%. Persentase capaian yang dapatkan belum memenuhi 100% terhadap target periode renstra tahun 2025-2029, karena masih terdapat target akhor renstra 1 tahun lagi.

2.4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Interaksi antara pertumbuhan populasi, kepadatan dan migrasi penduduk dengan lingkungan menyebabkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan. Tingginya interaksi tersebut menyebabkan tekanan terhadap ekosistem sehingga mengubah kondisi lingkungan yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi ekosistem, biota dan masyarakat. Perubahan kondisi lingkungan dicerminkan dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai tersebut menggambarkan kualitas lingkungan dan merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Peningkatan nilai pada masing-masing indeks tersebut mencerminkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup pada setiap Provinsi di Indonesia.

Peningkatan nilai IKLH dilakukan dengan berbagai intervensi, upaya pengurangan dan pemulihan serta simulasi baik berupa penerapan peraturan dan kebijakan serta pemanfaatan teknologi. Pencapaian IKLH menjadi salah satu komponen dalam evaluasi kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam

mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. IKLH provinsi berkontribusi pada 50% bobot urusan lingkungan hidup, dan IKLH Kabupaten/Kota berkontribusi pada 33% bobot urusan lingkungan hidup.

Adapun perbandingan antara target dan capaian Nasional dengan target dan capaian Kabupaten/Kota pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Tabel 3. 22
Perbandingan Target dan Capaian Nasional
dengan Target dan Capaian Kabupaten/Kota

Indikator Sasaran	Nasional		Kabupaten/Kota	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,48	76,49	88.70	83,65

Berdasarkan tabel di atas, dapat terbaca perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, capaian IKLH Nasional melebihi dari target yang telah ditetapkan, sedangkan capaian IKLH Kabupaten/Kota masih dibawah target yang telah ditetapkan. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya nilai indeks respon pada seluruh program penyusun IKLH, yaitu Program Kali Bersih, Program Indonesia Hijau dan Program Langit Biru. Penurunan capaian pada ketiga program tersebut mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan, perencanaan serta implementasi kegiatan lingkungan hidup pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya perbaikan dan penguatan secara terintegrasi pada setiap program agar kinerja respon lingkungan dan capaian IKLH dapat ditingkatkan kembali.

2.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAUPENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

❖ *Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :*

- Pengambilan sampel kualitas udara ambien secara rutin di empat titik lokasi (pemukiman, perkantoran, industri dan terminal)
- Dukungan dari pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran dan kebijakan
- Pengelolaan data hasil pemantauan yang terintegrasi dan transparan

- Kemitraan dengan laboratorium rekanan yang bersertifikasi KAN
- Ketersediaan ruang terbuka hijau yang masih memadai

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

- Adanya pergantian lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dimana petunjuk teknis yang digunakan sebagai dasar pemantauan kualitas lingkungan berganti, sehingga mempengaruhi rentang waktu pemantauan khususnya kualitas udara dilakukan hanya 1 (satu) semester saja
- Dari hasil perhitungan nilai indeks kualitas lingkungan, terdapat satu nilai yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 89,17 dengan kategori baik. Hal ini dipengaruhi oleh pengambilan data pemantauan kualitas udara yang dilakukan hanya 1 kali dalam 1 semester, dan parameter nilai $pm_{2,5}$ yang tidak terinput dalam aplikasi SITALA
- Data Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) dengan 3 program yakni Langit Biru, Indonesia Hijau serta Kali Bersih yang diinput dalam aplikasi SITALA terkendala pada penyediaan data baik lintas bidang maupun lintas OPD sehingga ada beberapa data yang di *reject* oleh verifikator provinsi dan pusat.

❖ Solusi

- Pemantauan kualitas udara dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, serta data satelit $pm_{2,5}$ diinput dalam aplikasi SITALA.
- Memaksimalkan penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan
- Mengoptimalkan peran ruang terbuka hijau dan vegetasi penyerap polutan disekitar wilayah permukiman dan terminal sebagai upaya mitigasi pencemaran udara.
- Mendorong penerapan upaya pengendalian emisi, seperti pengaturan lalu lintas, uji emisi kendaraan bermotor, serta mendorong penggunaan bahan bakar berkualitas yang cenderung menghasilkan emisi SO_2 dan NO_2 yang lebih rendah.
- Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara bertahap pada ruas-ruas

jalan yang masih berupa tanah atau kerikil untuk mengurangi pembentukan debu dan partikel tersuspensi.

- Mengurangi praktik pembakaran sampah sebagai upaya pengendalian emisi
- guna menekan konsentrasi polutan khususnya partikulat halus PM2.5
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara perangkat daerah terkait, pengelola terminal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengendalian pencemaran udara
- Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perilaku ramah lingkungan, khususnya dalam penggunaan kendaraan bermotor dan upaya menjaga kualitas udara ambien

2.6. ANALISIS ATAS EFISIENASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

❖ Efisiensi Anggaran

- Telah dilakukan efisiensi anggaran pada beberapa sub kegiatan belanja pada program ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

❖ Efisiensi Sumber Daya

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dalam penyampaian informasi maupun pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar, maka dapat terfasilitasi dengan penyebarluasan informasi yang dilakukan melalui website, email serta media sosial instagram Dinas Lingkungan Hidup.
- Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, DLH Kab. Luwu Timur tetap bekerja dengan maksimal dalam pemenuhan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Adapun perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

Tabel 3. 23
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Dokumen Kualitas Udara	1	1	100%	120.006.880	96.628.976	80,52

Adapun perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Tabel 3. 24
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kualitas Udara	81,35	89,17	109,61	120.006.880	96.628.976	80,52

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat capaian kinerja 109,61 dan capaian anggaran 80,52. Pencapaian kinerja yang didapatkan sesuai dengan anggaran yang digunakan

2.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Indikator Indeks Kualitas Udara terdapat **5 Program 5 kegiatan dan 7 sub kegiatan**. Adapun penjelasan untuk program-program tersebut yaitu:

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1) Indikator Program adalah:

- c) Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter indeks kualitas air.

Formulasi : *“Jumlah titik pantau air yang memenuhi baku mutu dibagi jumlah seluruh titik pantau dikali seratus”.*

- d) Persentase titik pantau udara dengan status memenuhi parameter indeks kualitas udara.

Formulasi : “Jumlah titik pantau udar yang memenuhi baku mutu dibagi jumlah seluruh titik pantau dikali seratus”.

Target kinerja tahun 2025 untuk kualitas air adalah 82,6% dan terealisasi 82,6% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Dan untuk kualitas udara adalah 9,09 % dan terealisasi 9,09 dengan persentase capaian 100%.

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup didukung oleh 1 kegiatan yaitu:

2) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator Tersedianya dokumen lingkungan yang dihasilkan. Adapun realisasi kegiatan ini adalah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 4 dokumen yang telah terealisasi.

Tabel 3. 25

Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

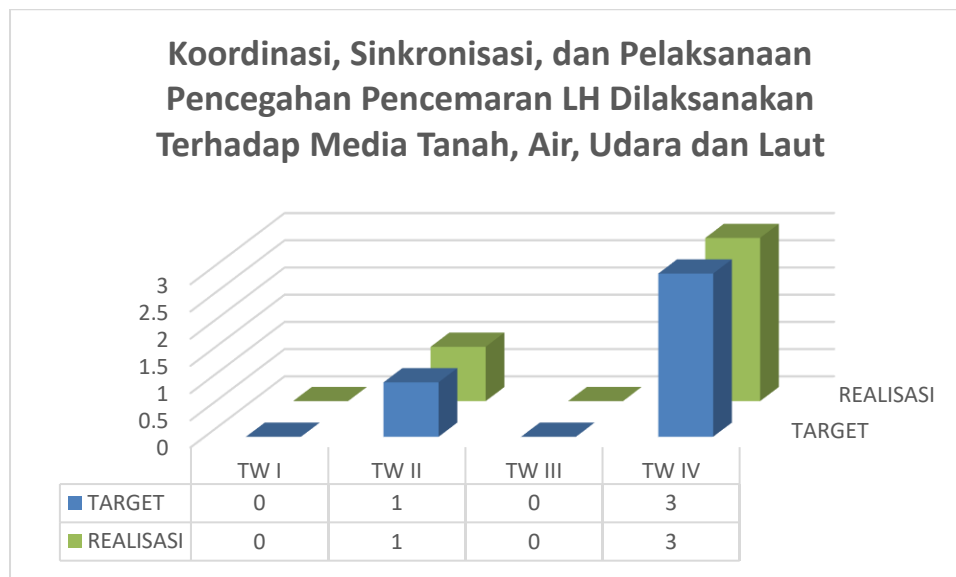
No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen lingkungan yang dihasilkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
a	Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen Uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan laut	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
b	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut.

Sub Kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air dan Udara, dimana

target tahun 2025 sebanyak 4 (empat) dokumen dan telah terealisasi sebanyak 4 (empat) dokumen uji kualitas lingkungan hidup, berupa:

- 1) Laporan Pemantauan Kualitas Air Semester I Tahun 2025
- 2) Laporan Pemantauan Kualitas Air Semester II Tahun 2025
- 3) Laporan Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2025
- 4) Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025



Grafik 3. 16
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub Kegiatan Pencegahan Pencemaran

Selain penyusunan dokumen uji kualitas lingkungan, adapula pelaksanaan kegiatan lainnya, antara lain;

1. Melakukan penginputan data Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) dengan program Langit Biru, Indonesia Hijau dan Kali Bersih pada aplikasi SITALA
2. Melakukan rangkaian kegiatan penyaksian dan pendampingan pengambilan sampel air dan tanah terkait kebocoran pipa minyak MFO PT. Vale Indonesia, Tbk. di Desa Lioka, Kec. Towuti
3. Mengikuti rapat melalui zoom meeting terkait evaluasi penilaian Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) program Kali Bersih yang diselenggarakan oleh Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
4. Mengikuti rapat melalui zoom meeting terkait evaluasi data pemantauan IKLH dan IRLH Tahun 2025 pada Aplikasi SITALA yang diselenggarakan oleh

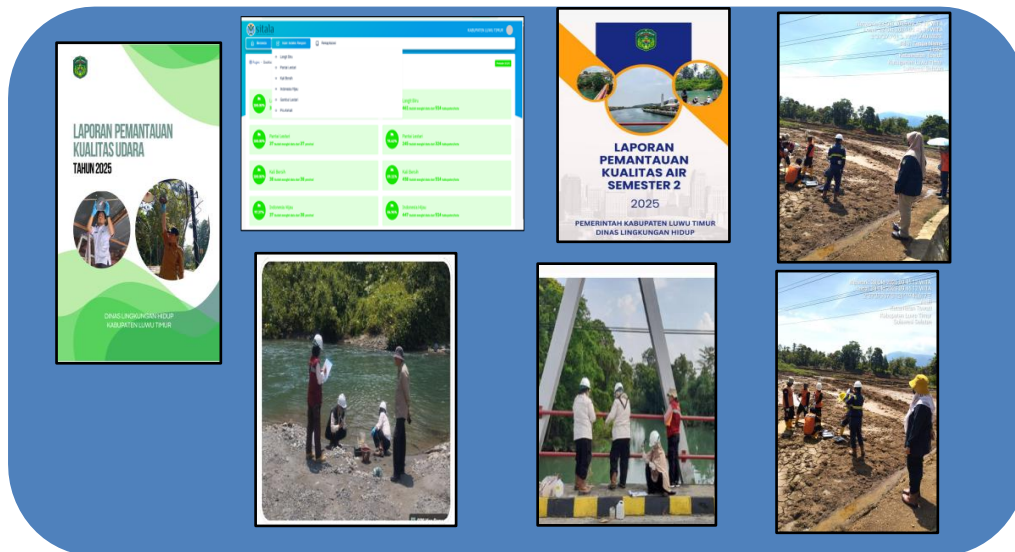
Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Wilayah Pesisir dan Laut

5. Mengikuti Forum Group Discussion (FGD) Multipihak dalam Mendorong Inisiasi Normalisasi Pesisir Danau Matano Secara Terintegrasi dengan tema “Dari Matano Untuk Dunia” yang diselenggarakan oleh Yayasan Bumi Sawerigading (YBS) Tana Luwu dengan Synchronicity Earth (SE), SHOAL.

Pada sub kegiatan ini total anggaran setelah terjadi efisiensi dan anggaran perubahan sebesar Rp 120.006.880 dan telah terealisasi sebesar 80,52%. Dengan rincian sebagai berikut:

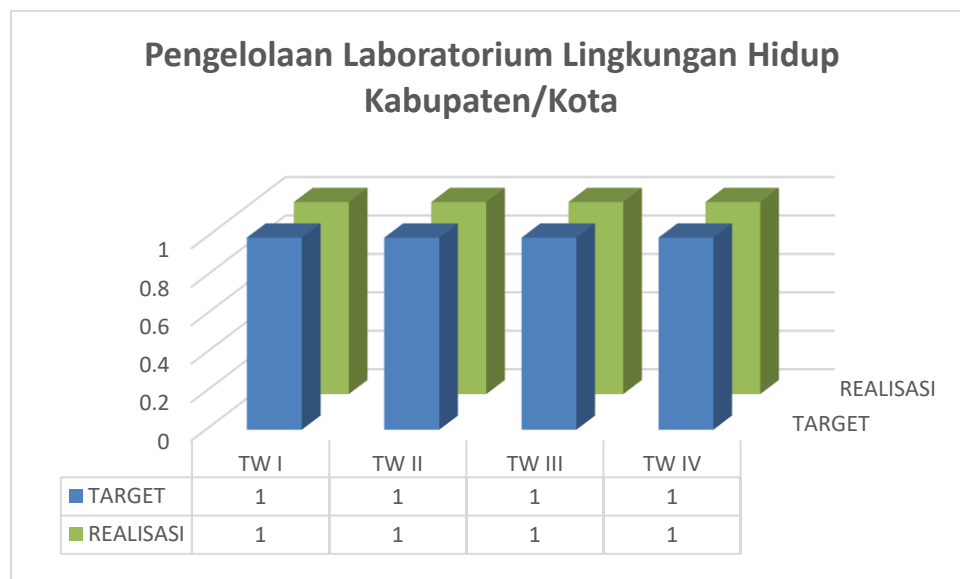
- ✓ Belanja Alat Tulis Kantor terealisasi Rp 339.216 sebesar 84,80% disebabkan penyesuaian harga saat negosiasi melalui inaproc.
- ✓ Belanja kertas dan cover terealisasi sebesar Rp 497.280 sebesar 88,19% disebabkan penyesuaian harga saat negosiasi melalui inaproc.
- ✓ Belanja bahan cetak terealisasi Rp 1.118.880 sebesar 88,80% disebabkan harga satuan bahan cetak di bawah standar satuan harga (SSH).
- ✓ Belanja bahan komputer terealisasi Rp 316.350 sebesar 91,70% disebabkan penyesuaian harga saat negosiasi melalui inaproc.
- ✓ Belanja bahan untuk kegiatan kantor lainnya terealisasi Rp 2.720.000 sebesar 100 %
- ✓ Belanja makanan dan minuman rapat terealisasi Rp 3.703.600 sebesar 98,50%
- ✓ Belanja jasa tenaga laboratorium terealisasi Rp 45.353.150 sebesar 69,43%. Rendahnya realisasi disebabkan perubahan lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dimana petunjuk teknis (Juknis) mengalami perubahan sehingga mempengaruhi rentang waktu pemantauan kualitas lingkungan.
- ✓ Belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang terealisasi Rp 2.800.000 sebesar 70% disebabkan harga satuan sewa alat angkutan apung bermotor di bawah standar satuan harga (SSH).
- ✓ Belanja perjalanan dinas biasa telah terealisasi sebesar 95,54%.

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut.



d. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan, dimana target tahun 2025 sebanyak 1 Dokumen dan telah terealisasi 1 Dokumen,



Grafik 3. 17
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium

kegiatan ini memuat antara lain, Pengambilan sampel, Pengujian Sampel dan Penyampaian Laporan Hasil Uji, antara lain :

❖ Pengambilan Sampel Air sebanyak 350 Sampel terdiri atas :

- Air Limbah : 166 Sampel
- Air Sungai : 120 Sampel
- Air Danau : 11 Sampel
- Air Laut : 8 Sampel
- Air Minum : 23 Sampel
- Air Sumur : 20 Sampel
- Air Kolom : 2 Sampel.

Pada sub kegiatan ini total anggaran Efisiensi sebesar Rp. 337.330.736 dan terealisasi sebesar 69.06% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Bahan – Bahan Kimia telah terealisasi sebesar 45,31%, merupakan anggaran yang disediakan dalam rangka melakukan pengujian sampel namun terdapat belanja bahan kimia yang tidak sesuai harga di penyedia, sehingga tidak memudahkan dalam proses selanjutnya untuk transaksi belanja
- ✓ Belanja ATK telah terealisasi sebesar 73.76%. terdapat penyesuaian harga pada saat negosiasi melalui Inaproc
- ✓ Belanja kertas dan cover telah terealisasi sebesar 91,18%. terdapat penyesuaian harga pada saat negosiasi melalui Inaproc
- ✓ Belanja bahan komputer telah terealisasi sebesar 93,06%.
- ✓ Belanja makan minum terealisasi sebesar 98.50 %
- ✓ Belanja jasa tenaga laboratorium telah terealisasi sebesar 100%
- ✓ Belanja Jasa Tenaga Administrasi telah terealisasi sebesar 100%
- ✓ Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi telah terealisasi sebesar 100%
- ✓ Belanja Jasa Kalibrasi belum terealisasi 73.49%, ada beberapa alat yang rusak sehingga tidak dilakukan kalibrasi diantaranya Digital Thermometer, DO Meter, Pipet Volume, Refrigerator, Spektrofotometer
- ✓ Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Kimia telah terealisasi sebesar 60.31%, Pemeliharaan disiapkan untuk Alat Spektrofotometer AAS namun alat tersebut sudah rusak berat sehingga anggaran yang tersedia digunakan untuk pemeliharaan alat laboratorium lainnya.
- ✓ Belanja perjalanan dinas telah terealisasi sebesar 98,41%.

Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota



2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Indikator Program adalah Persentase RTH yang tertangani dengan baik.

Formulasi : “Jumlah RTH yang ditangani di bagi total jumlah RTH dikali seratus”.

Terdapat 24 RTH yang ditangani dibagi 24 jumlah RTH dikali seratus, dengan capaian 100%. Target kinerja tahun 2025 adalah 100% dimana Persentase RTH yang ditangani sebesar 100%. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati didukung oleh 1 kegiatan yaitu:

1) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota

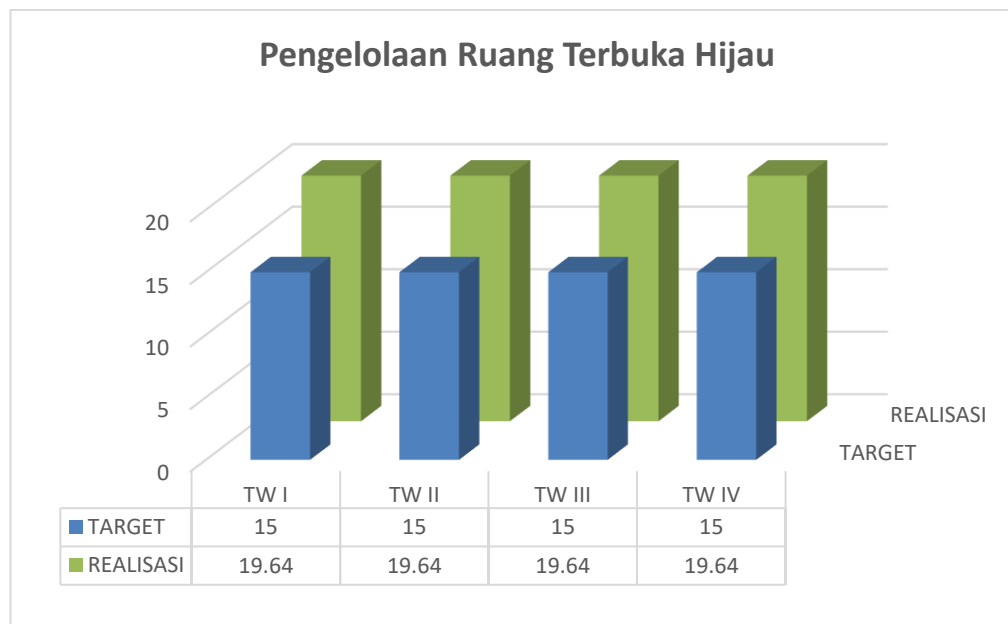
Tabel 3. 26
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Jumlah RTH yang tertangani dengan baik	15 RTH	15 RTH	100%
A	Pengelolaan ruang terbuka hijau	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	19,64 Ha	19,64 Ha	100%

Indikator kegiatan: Jumlah RTH yang tertangtani dengan baik. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan.

a. Sub Kegiatan Pengelolaan ruang terbuka hijau.

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota, dimana target pada tahun 2025 15 Ha dan terealisasi 19,64 Ha atau capaian 130, 93 %,



Grafik 3. 18

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan RTH

Kegiatan ini merupakan kegiatan pemeliharaan rutin yang dilakukan setiap triwulan. Adapun rincian luasan RTH yang dikelola dapat dilihat pada table dibawah ini :

NO.	JENIS RTH PUBLIK	LUAS (m²)	LUAS (Ha)
1	RTH Taman Sayang 1	15,280.66	1.53
2	RTH Taman Sayang 2	4,436.26	0.44
3	Bundaran Bumi Batara Guru (BBG)	36,999.93	3.70
4	RTH Andi Nyiwi Park	10,782.64	1.08
5	RTH Lapangan Soekarno-Hatta (Merdeka)	6,454.31	0.65
6	RTH Taman DPRD	14,655.15	1.47
7	RTH Landmark Luwu Timur	10,000.00	1.00
8	RTH Taman Lampu Merah	766.44	0.08
9	RTH Taman CLBK	2,262.25	0.226
10	Baruga Colaborated Center (BCC)	500.00	0.05
11	RTH Tugu Adipura	10.00	0.0010
12	RTH Lapangan Tenis Indoor Rujab Bupati Luwu Timur	8,284.40	0.8284
13	RTH Kantor Bupati Luwu Timur	17,139.51	1.71
14	RTH Rumah Jabatan Ale Luwu	5,805.61	0.58
15	RTH Lapangan Upacara DPRD Luwu Timur	4,187.58	0.42

16	RTH Taman Baca	2,654.59	0.27
17	RTH Median Jalan Soekarno Hatta	6,000.00	0.60
18	RTH I Love Malili	2,726	0.2726
19	RTH Jalur Hijau Andi Hasan	17,993.34	1.7993
20	RTH Jalur Hijau Soekarno Hatta	15,673.55	1.5674
21	RTH Anjungan Sungai Malili	4,131.81	0.41
22	RTH Pujasera Malili	2,303.74	0.23
23	RTH Ex TPI Malili	1,670.00	0.1670
24	Nursery Malili	3,926.20	0.39
	TOTAL	194,643.97	19.64

Pada sub kegiatan ini total anggaran sebesar Rp 129.774.820,- dan telah terealisasi sebesar 81,34 % dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas realisasi 0% dikarenakan anggaran ini merupakan anggaran untuk pemangkasan pohon yang tidak di SPJ kan karena telah dibayarkan melalui anggaran UPTD PKP.
- ✓ Belanja Bahan-Bahan Kimia terealisasi 100%
- ✓ Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman terealisasi 100%
- ✓ Belanja Bahan-Bahan Lainnya terealisasi 90.85%, sisa anggaran sebesar Rp.3.500.000 merupakan belanja perlengkapan instalasi air yang tidak direalisasikan karena sudah mencukupi.
- ✓ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor terealisasi 92.53%, dikarenakan terdapat penyesuaian harga pada saat negosiasi melalui Inaproc.
- ✓ Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover terealisasi 88.48% dikarenakan terdapat penyesuaian harga pada saat negosiasi melalui Inaproc.
- ✓ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak terealisasi 91.97% diakarenakan terdapat penyesuaian harga pada saat negosiasi melalui Inaproc.
- ✓ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos terealisasi 100%.
- ✓ Belanja Makanan dan Minuman Rapat realisasi 0% dikarenakan anggaran ini merupakan persiapan rapat pemangkasan pohon namun tidak dilaksanakan
- ✓ Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan realisasi 0% dikarenakan anggaran ini merupakan anggaran untuk pemangkasan pohon yang tidak di SPJ kan karena telah dibayarkan melalui anggaran UPTD PKP.
- ✓ Belanja Jasa Tenaga Administrasi tereliasasi 100%.
- ✓ Belanja Lembur realisasi 0% dikarenakan anggaran ini merupakan anggaran untuk pemangkasan pohon yang tidak di SPJ kan karena telah dibayarkan melalui anggaran UPTD PKP.

- ✓ Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional terealisasi 100%
- ✓ Belanja Perjalanan Dinas Biasa terealisasi 99.28%.

Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan ruang terbuka hijau.



4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Indikator Program adalah Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH.

Formulasi : *"jumlah usaha/kegiatan yang taat dibagi jumlah pemilik izinlingkungan yang dibina dan diawasi dikali seratus"*.

Terdapat 35 jumlah usaha/kegiatan yang taat terhadap 35 jumlah pemilik IL yang dibina dan diawasi dikali 100 = 100%.

Target kinerja tahun 2025 adalah 100% dan terealisasi 100 % dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) oleh 1 kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3. 27
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

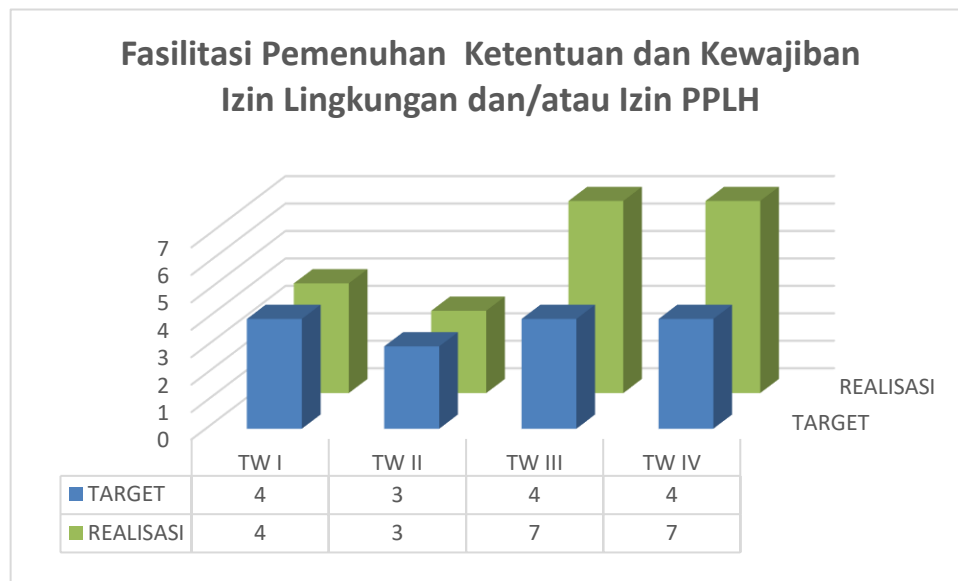
Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	Terlaksananya Usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi	30 Usaha/ Kegiatan	35 Usaha/ Kegiatan	106,67 %
Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izinPPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	15 Dokumen	21 Dokumen	140 %
Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Badan Usaha dan / atau kegiatan yang diawasi	30 Badan usaha	35 Badan usaha	116,67%

Indikator kegiatan: Terlaksananya Usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi. Adapun realisasi kegiatan ini adalah 35 Usaha/kegiatan dari target 30 usaha/kegiatan atau capaian 106,67%. Adapun usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi antara lain:

36. PT. Panca Digital Solution
37. PT. Bangunindo Karya Utama
38. PT. Arkora Hydro Malili
39. PT. Star Mitra Sulawesi
40. TPA Asana
41. PT. Perkebunan Nusantara XIV
42. PT. Mandiri Palmera Agrindo

43. PT. Teguh Wira Pratama
 44. PT. Bumi Maju Sawit
 45. PT. Inti Aset Sulawesi Indonesia
 46. PT. Mitra Berkarya Sejati
 47. PT. Vale Indonesia, Tbk
 48. UPTD Puskesmas Malili Kab. Luwu Timur
 49. UPTD Puskesmas Lampia Kab. Luwu Timur
 50. UPTD Puskesmas Lakawali Kab. Luwu Timur
 51. UPTD Puskesmas Angkona Kab. Luwu Timur
 52. UPTD Puskesmas Tomoni Kab. Luwu Timur
 53. UPTD Puskesmas Tomoni Timur Kab. Luwu Timur
 54. UPTD Puskesmas Wotu Kab. Luwu Timur
 55. RSUD I Lagaligo Kab. Luwu Timur
 56. UPTD Puskesmas Bonepute Kab. Luwu Timur
 57. UPTD Puskesmas Burau Kab. Luwu Timur
 58. UPTD Puskesmas Wasuponda Kab. Luwu Timur
 59. UPTD Puskesmas Nuha Kab. Luwu Timur
 60. UPTD Puskesmas Mangkutana Kab. Luwu Timur
 61. UPTD Puskesmas Kalaena Kab. Luwu Timur
 62. UPTD Puskesmas Wawondula Kab. Luwu Timur
 63. UPTD Puskesmas Timampu Kab. Luwu Timur
 64. UPTD Puskesmas Mahalona Kab. Luwu Timur
 65. UPTD Puskesmas Parumpanai Kab. Luwu Timur
 66. PT. Mars Symbiosciense Indonesia
 67. PT. Mandiri Palmera Agrindo
 68. PT. Bumi Maju Sawit
 69. PT. Latanindo Graha Persada
 70. PT. Star Mitra Sulawesi
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH
- Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah terlaksana dan memenuhi target kinerja yaitu 15 dokumen dan terealisasi sebanyak 21 dokumen dengan capaian

sebesar 140%



Grafik 3. 19
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & Iv
sub kegiatan fasilitasi izin PPLH

Kegiatan ini memuat antara lain, fasilitasi pemenuhan dokumen lingkungan untuk setiap pelaku usaha serta kunjungan lapangan yang dilakukan untuk mengecek kondisi real di lapangan.

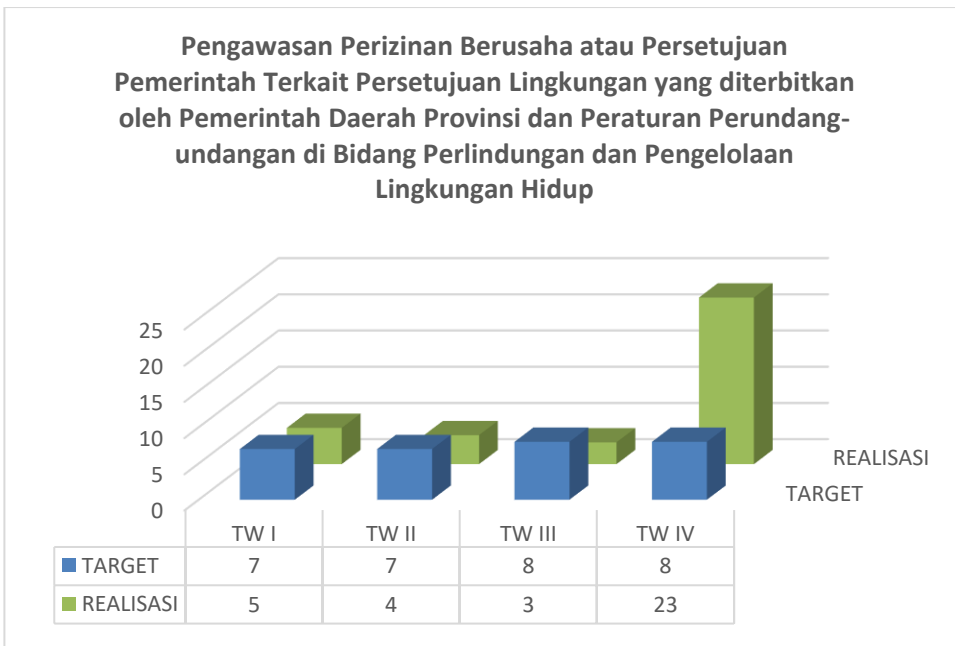
Pada sub kegiatan ini total anggaran Rp. 27.911.630 dan telah terealisasi sebesar 99,62% dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Belanja ATK serta Belanja Kertas dan Cover terealisasi 97,25%
- ✓ belanja perjalanan dinas telah terealisasi sebesar Rp 27.330.500 atau 99,67% pada kunjungan lapangan ke lokasi usaha untuk memantau keadaan real dan dalam kegiatan rapat terkait dengan pemenuhan dokumen lingkungan.

Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH.



- d. Sub Kegiatan Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



Grafik 3. 20
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV

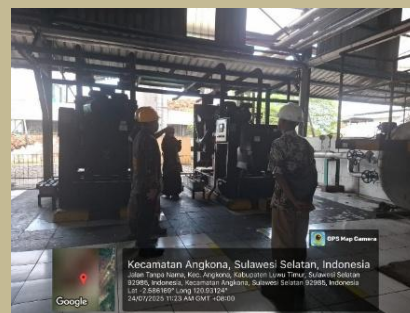
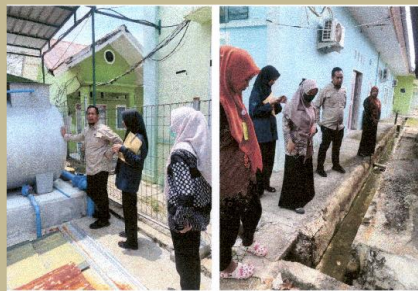
Sub Kegiatan Pengawasan perizinan

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah terlaksana dan memenuhi target kinerja untuk pengawasan terhadap 32 usaha/kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan terhadap target 30 usaha/kegiatan. Kegiatan ini memuat antara lain, pengawasan yang dilakukan untuk menilai ketaatan terhadap dokumen lingkungan yang telah dibuat oleh pelaku usaha/kegiatan.

Pada sub kegiatan ini total anggaran 26.138.910 dan telah terealisasi sebesar 98,62%, adapun rinciannya:

- ✓ Belanja ATK terealisasi 89,72%,
- ✓ Belanja Makan dan Minum Rapat juga terealisasi 98,46%.
- ✓ perjalanan dinas telah terealisasi sebesar Rp. 24.530.000 pada kunjungan lapangan ke Lokasi Usaha yang diawasi.

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



3. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Indikator Program adalah Persentase Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Target kinerja tahun 2025 adalah 100% dimana Persentase RTH yang ditangani sebesar 100%. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat didukung oleh 1 kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/ Kota

Tabel 3. 28
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

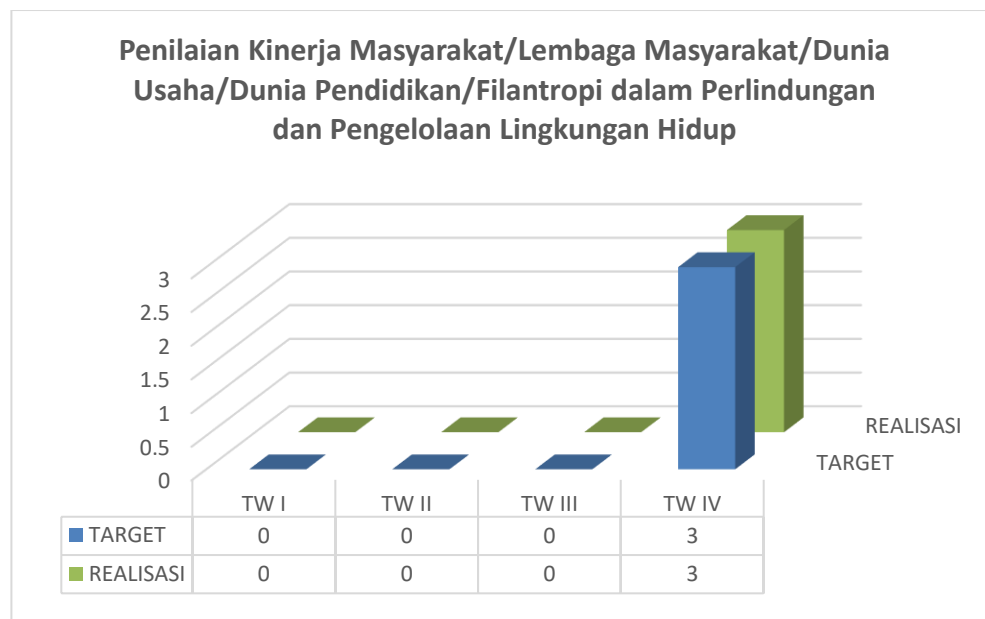
No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Penghargaan yang diberikan	100%	100%	100%
A	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	3 Entitas	100%

Indikator kegiatan: Persentase Jumlah Penghargaan yang diberikan.

Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan.

b. Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi Yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH, dimana pada Tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan pembinaan kepada 128 kelompok masyarakat (desa/kelurahan), 32 Lembaga Pemerintah (OPD) dan 151 sekolah/dunia pendidikan.



Grafik 3. 21
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan Filantropi

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH, dimana pada Tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan pembinaan kepada 128 kelompok masyarakat (desa/kelurahan), 32 Lembaga Pemerintah (OPD) dan 151 sekolah/dunia pendidikan.

Adapun pelaksanaan kegiatan untuk penghargaan lingkungan antara lain:

1. Program Kampung Iklim (ProkLim)
 - Pendataan bagi 11 calon desa proklam yang diusulkan serta apresiasi pembina proklam bagi kepala daerah belum dapat terealisasi. Salah satu faktor adalah perlunya pembaharuan data adaptasi dan mitigasi proklam, serta keterlambatan persetujuan pimpinan sampai batas akhir pengusulan lokasi proklam.
 - Melakukan koordinasi bersama DLHK Provinsi bidang DAS terkait peningkatan peran serta MHA dalam mendukung Proklam di Kab. Luwu Timur.
2. Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) dan Penghargaan Adiwiyata
 - Pengumpulan dokumen Gerakan PBLHS bagi 27 Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi (CSAP) di Sekretariat Adiwiyata Provinsi Sulawesi Selatan

- Melakukan pendampingan penginputan dokumen PBLHS pada aplikasi SIDIA untuk 93 sekolah/madrasah usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur
- Melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan bagi CSAK
- Membuat draft SK Penetapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tahun 2025 untuk 10 sekolah, yaitu:
 - 1) UPT SD Negeri 118 Batu Putih
 - 2) UPT SD Negeri 205 Kalaena Kiri IV
 - 3) UPT SD Negeri 210 Maliowo
 - 4) UPT SD Negeri 211 Tawakua
 - 5) UPT SD Negeri 212 Bubu
 - 6) UPT SD Negeri 272 Parahua
 - 7) MIS Dongi-Dongi
 - 8) UPT SMP Negeri 1 Towuti
 - 9) UPT SMP Negeri 5 Malili
 - 10) UPT SMP Negeri 1 Wotu
- Menghadiri penyerahan penghargaan bagi 12 Sekolah Adiwiyata Nasional, yaitu:
 - 1) UPT SD Negeri 226 Patande
 - 2) UPT SD Negeri 227 Puncak
 - 3) UPT SD Negeri 240 Podomoro
 - 4) UPT SD Negeri 252 Nikkel
 - 5) UPT SD Negeri 220 Cerekang
 - 6) UPT SD Negeri 108 Bonepute
 - 7) SD YPS Lawewu
 - 8) UPT SMP Negeri 1 Mangkutana
 - 9) UPT SMP Negeri 3 Malili
 - 10) UPT SMP Negeri 4 Malili
 - 11) UPT SMP Negeri 3 Angkona
 - 12) MIS YPRI Wawondula
- Hasil verifikasi bagi 27 sekolah usulan yang dinyatakan sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi oleh Sekretariat Adiwiyata, DLHK Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari :
 - 1) UPT SD Negeri 103 Lumbewe

- 2) UPT SD Negeri 106 Manangalu
- 3) UPT SMP Negeri 2 Burau
- 4) UPT SD Negeri 105 Mabonta
- 5) UPT SD Negeri 137 Molelengku
- 6) UPT SD Negeri 131 Kampung Alau
- 7) UPT SD Negeri 135 Binano
- 8) UPT SD Negeri 178 Tuban
- 9) UPT SD Negeri 187 Sumber Agung
- 10) UPT SD Negeri 158 Balai Kembang
- 11) UPT SD Negeri 241 Labose
- 12) SDIT Insan Rabbani
- 13) SDS Islam Wasuponda
- 14) UPT SD Negeri 250 Wasuponda
- 15) UPT SD Negeri 258 Sinongko
- 16) UPT SD Negeri 251 Pae-Pae
- 17) UPT SD Negeri 254 Laroeha
- 18) UPT SD Negeri 245 Tole-Tole
- 19) UPT SD Negeri 262 Larona
- 20) UPT SMP Negeri 1 Wasuponda
- 21) SMPS Islam Wasuponda
- 22) UPT SD Negeri 264 Wawondula
- 23) UPT SD Negeri 268 Towuti
- 24) UPT SD Negeri 277 Palumba
- 25) UPT SD Negeri 270 Matompi
- 26) UPT SD Negeri 256 Dongi
- 27) UPT SD Negeri 248 Nuha

3. Lomba Kebersihan Desa/Kelurahan dan OPD Kab. Luwu Timur

Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dan ASN terhadap kebersihan lingkungan (penataan lingkungan, kerapian wilayah serta pengelolaan sampah dan RTH) maka penilaian lomba serta pembinaan dilakukan kepada 128 desa dan kelurahan serta 32 OPD Kab. Luwu Timur.

Pada sub kegiatan ini total anggaran setelah terjadi efisiensi sebesar Rp 281.748.650 dan telah terealisasi sebesar 92,12% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja bahan-bahan lainnya terealisasi Rp 10.880.000 sebesar 56,67% disebabkan harga satuan pembelian bahan lain (bingkai piagam lomba kebersihan) berada di bawah standar satuan harga (SSH).
- ✓ Belanja ATK terealisasi Rp 103.230 sebesar 60,02% disebabkan adanya penyesuaian harga saat negosiasi melalui inaproc.
- ✓ Belanja kertas dan cover terealisasi Rp 316.350 sebesar 90,48%.
- ✓ Belanja bahan cetak terealisasi Rp 1.701.992 sebesar 60,38% disebabkan harga satuan di bawah standar satuan harga (SSH).
- ✓ Belanja makanan dan minuman terealisasi Rp 17.266.000 sebesar 99,23%
- ✓ Belanja perjalanan dinas biasa terealisasi Rp 54.282.100 sebesar 81,25%, hal ini disebabkan pengusulan 93 sekolah Adiwiyata Kabupaten namun hanya 10 sekolah yang terverifikasi, serta pelaksanaan lomba kebersihan desa/kelurahan yang berjalan bersama dengan pelaksanaan verifikasi sekolah adiwiyata kabupaten.

Dokumentasi Kegiatan



3. Program Pengelolaan Persampahan

Indikator Program adalah Indeks kinerja pengelolaan sampah.

Target kinerja tahun 2025 adalah 74% dan terealisasi 65,47% dengan persentase capaian kinerja sebesar 88,47%. Dimana jumlah sampah yang tertangani sebanyak 30,913.24 ton terhadap jumlah timbulan sampah

sebanyak 47.219,61 ton x 100 = 65,47 % . Program Pengelolaan Persampahan didukung oleh 1 kegiatan yaitu:

- Kegiatan Pengelolaan Sampah

Tabel 3. 29
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

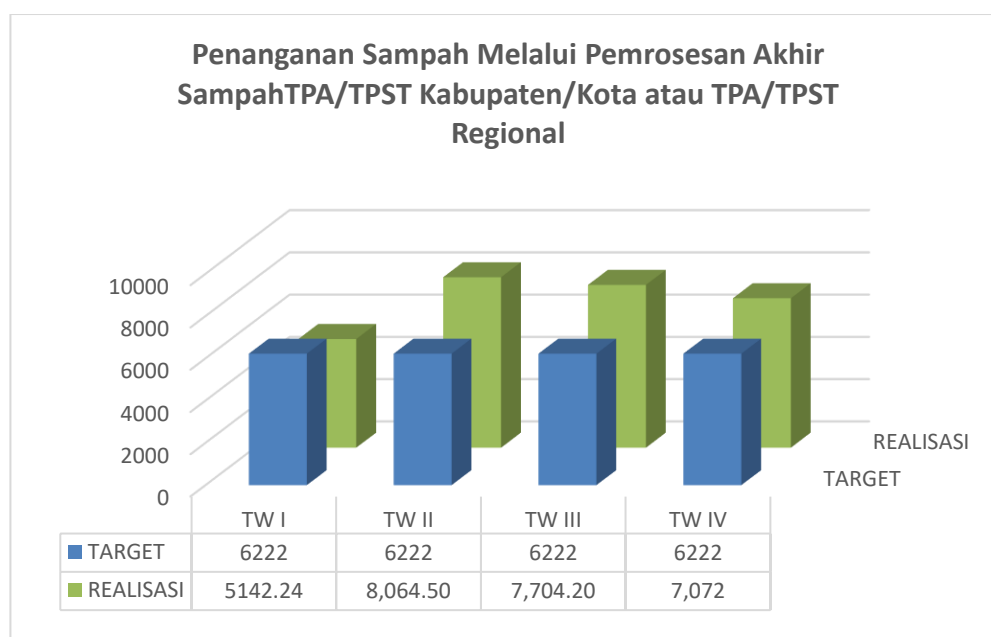
Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	
					Capaian (%)
	Pengelolaan sampah	Persentase sampah yang dikelola	74%	65,47%	88,47%
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	24.888 Ton	27.982,94 Ton	112,43%

1) Kegiatan Pengelolaan Sampah

Indikator kegiatan: Persentase sampah yang dikelola. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan.

- Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional.

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan, dimana target tahun 2025 sebanyak 24.888 ton dan telah terealisasi 27.982,94 ton atau capaian sebesar 112,43%.



Grafik 3. 22
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub Kegiatan Penanganan sampah

Sub kegiatan ini memuat antara lain pengangkutan sampah di 7 Kecamatan yakni: Kecamatan Malili, Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti. Untuk wilayah kecamatan Malili dilakukan pengangkutan sampah dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah yang diangkut oleh petugas kebersihan dengan menggunakan mobil pengangkut sampah dan motor roda tiga untuk kemudian di buang di TPA Ussu.

Pada sub kegiatan ini total anggaran Rp. 4.910.392.073 dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.440.218.227 atau 90,42%. Adapun rinciannya antara lain:

- ✓ Belanja bahan-bahan dan Pelumas terealisasi sebesar Rp. 581.580.400,00 atau sebesar 99,98%.
- ✓ Belanja Alat/Bahan terealisasi sebesar Rp.784.770 atau sebesar 83,10%
- ✓ Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan kantor kertas dan terealisasi sebesar Rp. 1.346.430 atau sebesar 91,13%
- ✓ Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan kantor bahan Komputer terealisasi sebesar Rp. 1.221.000 atau sebesar 96,52%.
- ✓ Belanja Makanan dan Minuman aktivitas lapangan terealisasi sebesar Rp. 20.910.000 atau sebesar 99,29%.
- ✓ Belanja Jasa Tenaga Laboratorium telah terealisasi senilai 650.000,00 dan masih tersisa senilai 2.350.000,00 hal ini disebabkan jumlah sampel

sampah atau limbah yang diuji ternyata lebih sedikit dari perencanaan, maka biaya jasa tenaga laboratorium otomatis berkurang.

- ✓ Belanja Jasa Tenaga Kebersihan masih tersisa senilai 436.500.000,00, hal ini disebabkan karena adanya penambahan jasa tenaga kebersihan akan tetapi belum sepenuhnya terekrut berdasarkan target kebutuhan tenaga kebersihan.
- ✓ Belanja jasa Tenaga Keamanan telah sesuai dengan Anggaran realisasi 100%
- ✓ Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan masih tersisa senilai 1.019.296,00, hal ini sebabkan oleh adanya selisih perhitungan antara estimasi tarif pajak atau retribusi dalam anggaran dengan nilai real yang diterbitkan.
- ✓ Belanja Lembur terealisasi sebesar Rp. 88.127.000 atau sebesar 99,93%
- ✓ Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional dan telah terealisasi sesuai dengan pertriwulan.
- ✓ Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional dan telah terealisasi sesuai dengan pertriwulan.
- ✓ Belanja pemeliharaan Alat Besar- masih tersisa senilai 1.221.888,00, hal ini disebabkan karena sudah tidak adanya kerusakan berat dan tidak memerlukan perbaikan besar hingga akhir tahun anggaran.
- ✓ Belanja pemeliharaan Alat Besar-Loader realisasi 99,99%.
- ✓ Belanja pemeliharaan Alat Besar darat Lainnya masih tersisa senilai 5.251.252,00 hal ini disebabkan karena sudah tidak adanya kerusakan berat dan tidak memerlukan perbaikan besar hingga akhir tahun anggaran.
- ✓ Belanja pemeliharaan Alat Angkutan-kendaraan Bermotor Penumpang masih tersisa senilai 1.085.400,00, hal ini disebabkan karena sudah tidak adanya kerusakan berat dan tidak memerlukan perbaikan besar hingga akhir tahun anggaran.
- ✓ Belanja pemeliharaan Alat Angkutan-kendaraan Bermotor Beroda Tiga masih tersisa senilai 16.500.000,00, hal ini disebabkan karena sudah tidak

adanya kerusakan berat dan tidak memerlukan perbaikan besar hingga akhir tahun anggaran.

- ✓ Belanja pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Timbangan/Biara masih tersisa senilai 3.965.000,00, hal ini disebabkan karena sudah tidak adanya kerusakan berat dan tidak memerlukan perbaikan besar hingga akhir tahun anggaran.
- ✓ Belanja pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah tangga- Alat kantor Lainnya realisasi sebesar 99,09%
- ✓ Belanja Perjalanan Dinas Biasa realisasi sebesar 99,62%

Dokumentasi Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota.



1.8 KESIMPULAN

- ❖ Capaian Kinerja Sasaran “Terpantaunya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan” telah terealisasi dengan tersusunnya 1 (satu) dokumen kualitas udara.
- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada dokumen DPPA – SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun anggaran 2025 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : Rp. 11.201.553.588,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.573.056.891,- atau sebesar 89,09%.
- ❖ Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan di empat titik lokasi yang mewakili Kawasan perkantoran, transportasi, industri dan permukiman, dapat dinyatakan bahwa kualitas udara ambien tidak terjadi perubahan yang mencolok, semuanya masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
- ❖ Nilai IKU dijadikan referensi dalam menentukan kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (sesuai Undang-undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- ❖ Kualitas udara di Kabupaten Luwu Timur perlu dipertahankan dengan melakukan pengendalian pencemaran udara melalui :
 - Penerapan aturan yang ketat
 - Penghijauan atau penanaman pohon di sekitar kawasan sumber emisi (industri dan jalan raya);
 - Melakukan tata kelola kawasan sesuai peruntukannya.
 - Mempertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau, taman kota dll.

3. DOKUMEN KUALITAS TUTUPAN LAHAN**3.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025**

Indikator Kinerja yang digunakan Pada Renstra 2025-2029 adalah Dokumen Kualitas Tutupan Lahan. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 1 dokumen kualitas tutupan lahan dan realisasi sebanyak 1 dokumen kualitas tutupan lahan atau capaian sebesar 100%. Dokumen kualitas tutupan lahan berisi tentang data dan jenis tutupan lahan, kondisi tutupan lahan, dampak terhadap lingkungan, serta hasil indeks kualitas tutupan lahan.

Tabel 3. 30
Target dan Realisasi

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Dokumen Tutupan Lahan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Target kinerja dokumen kualitas udara pada tahun 2025 adalah 1 dokumen dan realisasi sebanyak 1 dokumen atau capaian sebesar 100%.

Indikator Kinerja sasaran yang digunakan Pada Renstra 2021-2026 adalah Indeks Tutupan Lahan.

Tabel 3. 31
Target dan Realisasi

Indikator KinerjaSasaran	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	82,61	83,06	100,54 %

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2025 adalah 83,06 dari target 82,61 atau capaian sebesar 100,54. Pengambilan data dan lokasi pengambilan data untuk indeks kualitas tutupan lahan yang dilakukan pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain.

Pengambilan data pada kawasan hutan dilakukan melalui citra satelit yang selanjutnya diolah oleh Kementerian LHK dan dimasukkan kedalam aplikasi IKLH. Sedangkan pengambilan data pada areal penggunaan lain dilakukan melalui citra satelit yang selanjutnya diolah datanya oleh Kabupaten/Kota dan hasil kajiannya dimasukkan ke dalam aplikasi IKLH. Data yang telah dimasukkan kedalam aplikasi IKLH selanjutnya diverifikasi oleh tim Penilai IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan hasilnya di aplikasi IKLH. Namun apabila ada Data yang ditolak selanjutnya akan dilakukan pertemuan online untuk membahas penyebab data tersebut ditolak dan langkah apa yang harus dilakukan oleh Kabupaten/Kota untuk perbaikan data tersebut. Setelah seluruh data tersebut dinyatakan lolos verifikasi maka nilai IKL akan diumumkan.

3.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3. 32
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Dokumen Tutupan Lahan	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%

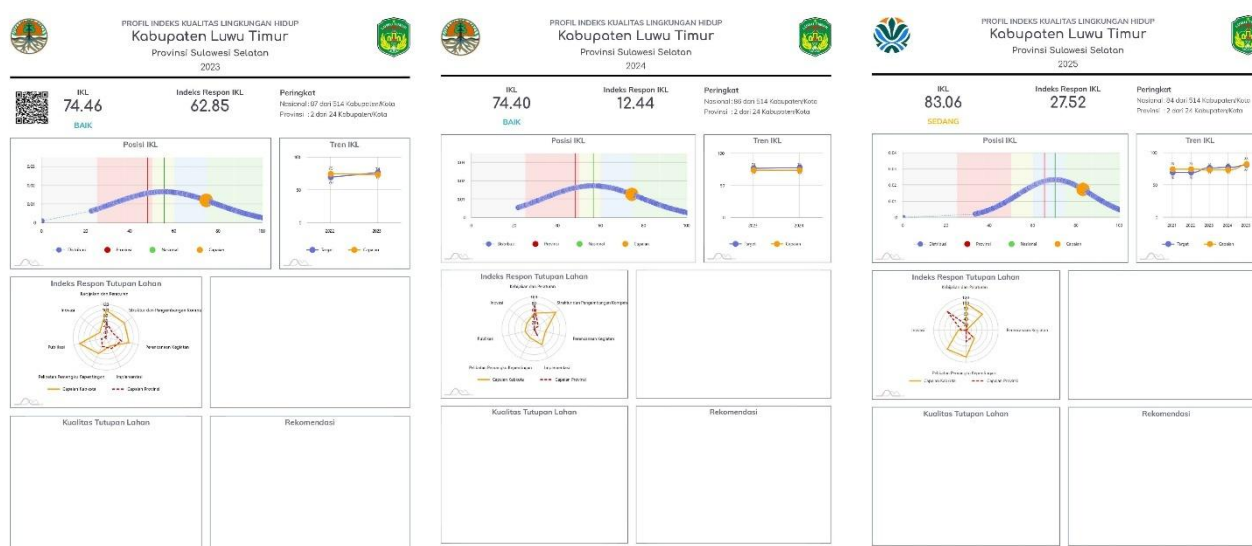
Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023, 2024, dan 2025. Setiap tahun dilakukan penyusunan dokumen Tutupan Lahan atas hasil pemantauan Tutupan Lahan.

Sedangkan perbandingan target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya untuk untuk Indikator Kinerja sasaran Pada Renstra 2021-2026 adalah:

Tabel 3. 33
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Tutupan Lahan	30,5	16,31	53,48%	30,50	16,29	53,40%	82,61	83,06	100,54%

Gambar Nilai IKL Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023, 2024 dan 2025



Berdasarkan tabel di atas, nilai pada target dan realisasi yang digunakan untuk tahun 2023 dan tahun 2024 merupakan hasil dari nilai konversi dari komponen indeks tutupan lahan yang dikalikan bobot rumus perhitungan ($0,219 \times \text{nilai ITL}$), sehingga didapatkan nilai sesuai tabel diatas. Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023, 2024, dan 2025. Nilai ITL tahun 2025 adalah 83,06, nilai konversi adalah 18,19, tahun 2024 adalah 16,29, dan tahun 2023 adalah 16,31. Nilai IKL tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi kualitas lingkungan lahan secara bertahap, namun peningkatan yang terjadi belum cukup signifikan untuk mengubah status atau kategori Indeks Kualitas Lahan (IKL). Disisi lain, kategori indeks masih sama dengan tahun 2024 yaitu kategori Sedang. Dengan demikian, meskipun nilai IKL tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi kualitas lahan secara umum masih berada pada kategori Sedang dan memerlukan

upaya pengelolaan serta pengendalian yang lebih berkelanjutan agar dapat mencapai kategori yang lebih baik. Sedangkan penurunan nilai indeks pada tahun 2024 dan tahun 2023 disebabkan meningkatnya bukaan lahan yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2023.

3.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS OPD

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 34
Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024	Tahun 2025	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2025	Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra
Dokumen Tutupan Lahan	1	1	1	5	20%

Berdasarkan tabel di atas, dapat terbaca perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir jangka menengah, Persentase capaian 2025 terhadap target akhir renstra adalah 20%. Hal ini masih sejalan dengan pencapaian target pada awal periode renstra tahun 2025-2029.

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2025 dengan target jangka menengah terhadap Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 35
Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026)

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024	Tahun 2025	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2025	Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra
Indeks Tutupan Lahan	16,29	18,19	17,24	30,5	56,52

Berdasarkan tabel di atas, dapat terbaca perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir jangka menengah, Persentase capaian 2025 terhadap target akhir renstra adalah 56,52%. Persentase capaian terhadap target akhir renstra yang didapatkan sangat kurang, hal ini karena adanya perubahan formulasi perhitungan indeks tutupan lahan setelah penetapan target renstra tahun 2021-2026.

3.4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Interaksi antara pertumbuhan populasi, kepadatan dan migrasi penduduk dengan lingkungan menyebabkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan. Tingginya interaksi tersebut menyebabkan tekanan terhadap ekosistem sehingga mengubah kondisi lingkungan yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi ekosistem, biota dan masyarakat. Perubahan kondisi lingkungan dicerminkan dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai tersebut menggambarkan kualitas lingkungan dan merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Peningkatan nilai pada masing-masing indeks tersebut mencerminkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup pada setiap Provinsi di Indonesia.

Peningkatan nilai IKLH dilakukan dengan berbagai intervensi, upaya pengurangan dan pemulihan serta simulasi baik berupa penerapan peraturan dan kebijakan serta pemanfaatan teknologi. Pencapaian IKLH menjadi salah satu komponen dalam evaluasi kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. IKLH provinsi

berkontribusi pada 50% bobot urusan lingkungan hidup, dan IKLH Kabupaten/Kota berkontribusi pada 33% bobot urusan lingkungan hidup.

Adapun perbandingan antara target dan capaian Nasional dengan target dan capaian Kabupaten/Kota pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Tabel 3. 36
Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan
Target dan Capaian Kabupaten/Kota

Indikator Sasaran	Nasional		Kabupaten/Kota	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	88,48	76,49	88.70	83,65

Berdasarkan tabel di atas, dapat terbaca perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, capaian IKLH Nasional melebihi dari target yang telah ditetapkan, sedangkan capaian IKLH Kabupaten/Kota masih dibawah target yang telah ditetapkan. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya nilai indeks respon pada seluruh program penyusun IKLH, yaitu Program Kali Bersih, Program Indonesia Hijau dan Program Langit Biru. Penurunan capaian pada ketiga program tersebut mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan, perencanaan serta implementasi kegiatan lingkungan hidup pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya perbaikan dan penguatan secara terintegrasi pada setiap program agar kinerja respon lingkungan dan capaian IKLH dapat ditingkatkan kembali.

3.5. ANALISIS	PENYEBAB	KEBERHASILAN/KEGAGALAN
ATAUPENINGKATAN/PENURUNAN	KINERJA	SERTA ALTERNATIVE
SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN		

- ❖ Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :
- Penerapan tata ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
 - Pelibatan masyarakat dalam program penghijauan dan rehabilitasi hutan/lahan.
 - Pelaksanaan kegiatan penanaman pohon di lahan kritis, sempadan sungai, dan kawasan rawan erosi.
 - Edukasi tentang pentingnya tutupan lahan bagi keseimbangan ekosistem dan

mitigasi bencana.

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Indeks Tutupan Lahan (ITL) terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

- Adanya pembukaan lahan secara besar-besaran untuk keperluan pertambangan, perkebunan dll
- Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
- Kurangnya Data Tutupan lahan.

❖ Solusi

- Mengoptimalkan program rehabilitasi dan konservasi lahan, termasuk kegiatan revegetasi, reklamasi lahan terdegradasi, dan pengendalian erosi.
- Meningkatkan pengendalian alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, terutama pada kawasan lindung dan lahan produktif.
- Mendorong penerapan praktik pengelolaan lahan yang ramah lingkungan pada sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan.
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor serta peran pemangku kepentingan dalam upaya perbaikan kualitas lahan secara terpadu dan berkelanjutan
- Memanfaatkan hasil pemantauan dan nilai IKL sebagai dasar evaluasi kebijakan serta perencanaan program pengelolaan lingkungan hidup agar peningkatan kualitas lahan dapat berdampak pada perubahan status IKL di masa mendatang.

3.6. ANALISIS ATAS EFISIENASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

❖ Efisiensi Anggaran

- Memaksimalkan anggaran yang ada untuk memenuhi penyusunan dokumen kualitas tutupan lahan.

❖ Efisiensi Sumber Daya

- Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, DLH

Kab. Luwu Timur tetap bekerja dengan maksimal dalam pemenuhan dokumen Kualitas Tutupan Lahan.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Adapun perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 37
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Dokumen Kualitas Tutupan Lahan	1	1	100%	120.006.880	96.628.976	80,52

Adapun perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026

Tabel 3. 38
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Tutupan Lahan	82,61	83,06	100,54%	120.006.880	96.628.976	80,52

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat capaian kinerja 100,54% dan capaian anggaran 80,52. Pencapaian kinerja yang didapatkan sesuai dengan anggaran yang digunakan.

3.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Indikator Indeks Tutupan Lahan didukung oleh 4 Program, 5 kegiatan dan 5 sub kegiatan diantaranya:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1) Indikator Program adalah:

- e) Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter indeks kualitas air.

Formulasi : “Jumlah titik pantau air yang memenuhi baku mutu dibagi jumlah seluruh titik pantau dikali seratus”.

- f) Persentase titik pantau udara dengan status memenuhi parameter indeks kualitas udara.

Formulasi : “Jumlah titik pantau udar yang memenuhi baku mutu dibagi jumlah seluruh titik pantau dikali seratus”.

Target kinerja tahun 2025 untuk kualitas air adalah 82,6% dan terealisasi 82,6% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Dan untuk kualitas udara adalah 9,09 % dan terealisasi 9,09 dengan persentase capaian 100%.

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup didukung oleh 1 kegiatan yaitu:

- 2) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator Tersedianya dokumen lingkungan yang dihasilkan. Adapun realisasi kegiatan ini adalah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 4 dokumen yang telah terealisasi.

Tabel 3. 39

Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

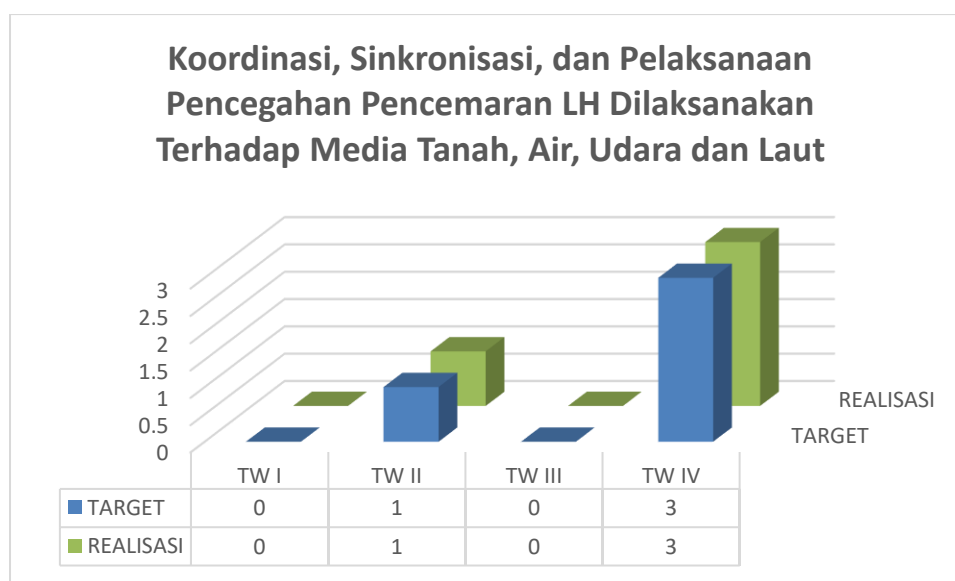
No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen lingkungan yang dihasilkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
a	Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen Uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan laut	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Tersedianya luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	37 Ha	37 Ha	100%

a	Perlaksanaan Rehabilitasi	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	37 Ha	37 Ha	100%
---	---------------------------	--	-------	-------	------

e. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut.

Sub Kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air dan Udara, dimana target tahun 2025 sebanyak 4 (empat) dokumen dan telah terealisasi sebanyak 4 (empat) dokumen uji kualitas lingkungan hidup, berupa:

- 1) Laporan Pemantauan Kualitas Air Semester I Tahun 2025
- 2) Laporan Pemantauan Kualitas Air Semester II Tahun 2025
- 3) Laporan Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2025
- 4) Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025



Grafik 3. 23
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan Pencegahan Pencemaran

Selain penyusunan dokumen uji kualitas lingkungan, adapula pelaksanaan kegiatan lainnya, antara lain;

1. Melakukan penginputan data Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) dengan program Langit Biru, Indonesia Hijau dan Kali Bersih pada aplikasi SITALA

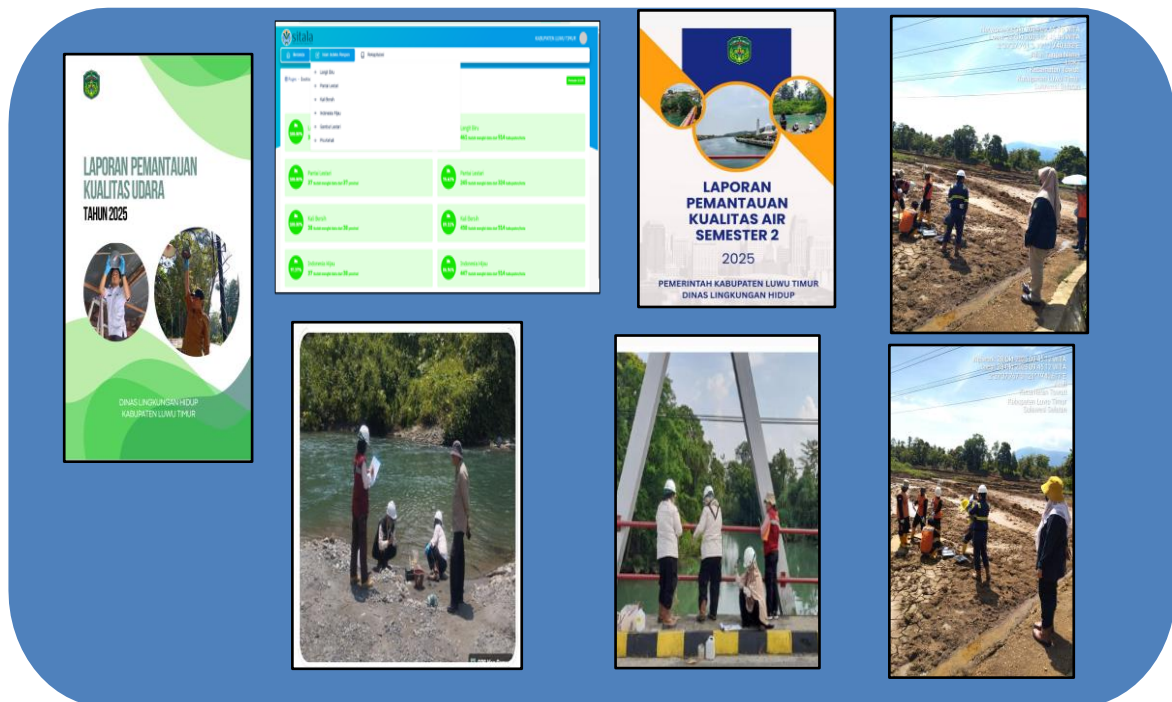
2. Melakukan rangkaian kegiatan penyaksian dan pendampingan pengambilan sampel air dan tanah terkait kebocoran pipa minyak MFO PT. Vale Indonesia, Tbk. di Desa Lioka, Kec. Towuti
3. Mengikuti rapat melalui zoom meeting terkait evaluasi penilaian Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) program Kali Bersih yang diselenggarakan oleh Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
4. Mengikuti rapat melalui zoom meeting terkait evaluasi data pemantauan IRLH dan IRLH Tahun 2025 pada Aplikasi SITALA yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Wilayah Pesisir dan Laut
5. Mengikuti Forum Group Discussion (FGD) Multipihak dalam Mendorong Inisiasi Normalisasi Pesisir Danau Matano Secara Terintegrasi dengan tema “Dari Matano Untuk Dunia” yang diselenggarakan oleh Yayasan Bumi Sawerigading (YBS) Tana Luwu dengan Synchronicity Earth (SE), SHOAL.

Pada sub kegiatan ini total anggaran setelah terjadi efisiensi dan anggaran perubahan sebesar Rp 120.006.880 dan telah terealisasi sebesar 80,52%. Dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Belanja Alat Tulis Kantor terealisasi Rp 339.216 sebesar 84,80% disebabkan penyesuaian harga saat negosiasi melalui inaproc.
- ✓ Belanja kertas dan cover terealisasi sebesar Rp 497.280 sebesar 88,19% disebabkan penyesuaian harga saat negosiasi melalui inaproc.
- ✓ Belanja bahan cetak terealisasi Rp 1.118.880 sebesar 88,80% disebabkan harga satuan bahan cetak di bawah standar satuan harga (SSH).
- ✓ Belanja bahan komputer terealisasi Rp 316.350 sebesar 91,70% disebabkan penyesuaian harga saat negosiasi melalui inaproc.
- ✓ Belanja bahan untuk kegiatan kantor lainnya terealisasi Rp 2.720.000 sebesar 100 %
- ✓ Belanja makanan dan minuman rapat terealisasi Rp 3.703.600 sebesar 98,50%
- ✓ Belanja jasa tenaga laboratorium terealisasi Rp 45.353.150 sebesar 69,43%. Rendahnya realisasi disebabkan perubahan lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dimana petunjuk teknis (Juknis) mengalami perubahan sehingga mempengaruhi rentang waktu pemantauan kualitas lingkungan.

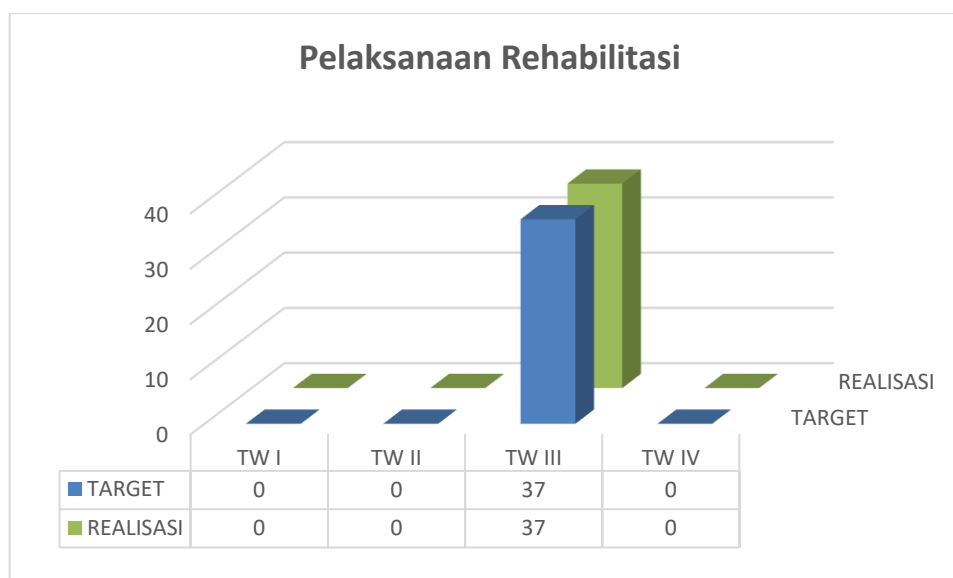
- ✓ Belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang terealisasi Rp 2.800.000 sebesar 70% disebabkan harga satuan sewa alat angkutan apung bermotor di bawah standar satuan harga (SSH).
- ✓ Belanja perjalanan dinas biasa telah terealisasi sebesar 95,54%.

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut.



a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, dimana target rehabilitasi 37 Ha pada tahun 2025 telah terealisasi sesuai target 37 Ha yang tertuang dalam Dokumen Berita Acara Penyerahan Hasil Penanaman Rehabilitasi DAS oleh Pemegang PPKH Pemerintah Kab. Luwu Timur.



Grafik 3. 24
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi

Adapun pelaksanaan kegiatan lain terkait Rehabilitasi, antara lain:

1. Melakukan rapat internal terkait pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial Kab. Luwu Timur bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)
2. Melakukan rapat sebagai tindak lanjut koordinasi sebelumnya terkait pendamping Perhutanan Sosial Mandiri bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan OPD terkait lainnya.
3. Melakukan koordinasi bersama Kepala Bidang Perhutanan Sosial DLHK Provinsi terkait mekanisme pembentukan pokja (kelompok kerja) perhutanan sosial di Kab. Luwu Timur.
4. Melakukan koordinasi bersama PSKL Wilayah Sulawesi Maluku terkait tindaklanjut pendamping Perhutanan Sosial Mandiri Kab. Luwu Timur.

Pada sub kegiatan ini total anggaran setelah terjadi efisiensi sebesar Rp 19.703.570 dan telah terealisasi Rp 18.136.710 atau sebesar 92,05% dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Belanja bahan/bibit tanaman tidak terealisasi sebab mengalami pergeseran anggaran
- ✓ Belanja bahan-bahan lainnya tidak terealisasi sebab mengalami pergeseran anggaran

- ✓ Belanja ATK terealisasi Rp 274.530 sebesar 74,04% disebabkan penyesuaian harga saat negosiasi melalui inaproc.
- ✓ Belanja kertas dan cover terealisasi Rp 253.080 sebesar 90,48%
- ✓ Belanja bahan cetak terealisasi Rp 240.248 sebesar 88,80% disebabkan harga bahan cetak berada di bawah standar satuan harga (SSH)
- ✓ Belanja makanan minuman rapat tidak terealisasi sebab mengalami pergeseran anggaran
- ✓ Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan tidak terealisasi sebab mengalami pergeseran anggaran
- ✓ Belanja perjalanan dinas biasa telah terealisasi Rp 17.395.852 atau sebesar 92,44%

Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi



2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Indikator Program adalah Persentase RTH yang tertangani dengan baik.

Formulasi : *"Jumlah RTH yang ditangani di bagi total jumlah RTH dikali seratus"*.

Terdapat 24 RTH yang ditangani dibagi 24 jumlah RTH dikali seratus, dengan capaian 100%. Target kinerja tahun 2025 adalah 100% dimana Persentase RTH yang ditangani sebesar 100%. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati didukung oleh 1 kegiatan yaitu:

2) Kegiatan Pengelolaan Keaneragaman Hayati Kabupaten/ Kota

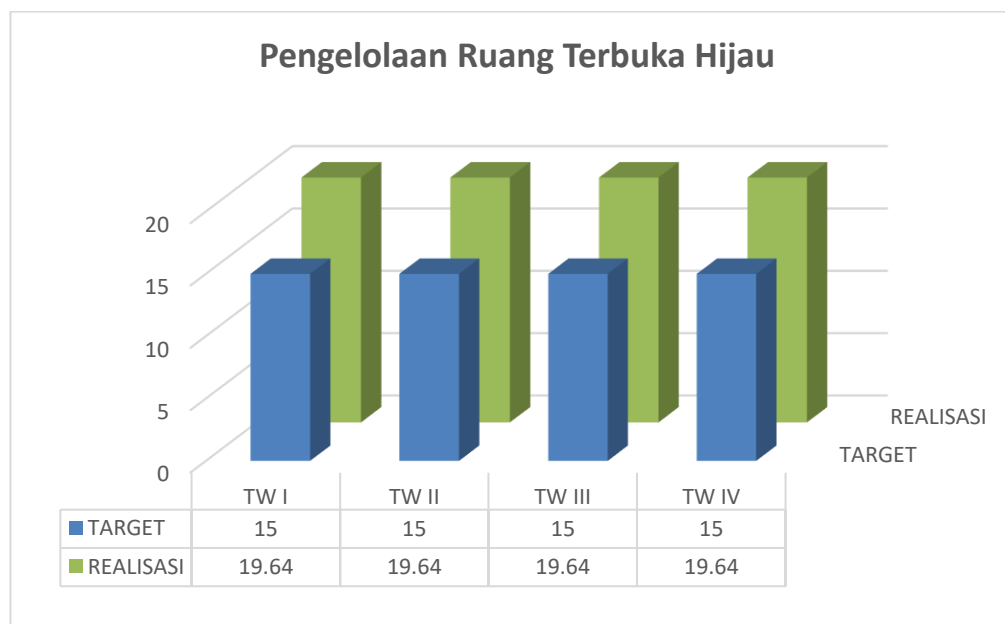
Tabel 3. 40
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pengelolaan Keaneragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Jumlah RTH yang tertangani dengan baik	15 RTH	15 RTH	100%
A	Pengelolaan ruang terbuka hijau	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	19,64 Ha	19,64 Ha	100%

Indikator kegiatan: Jumlah RTH yang tertangani dengan baik. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan.

a. Sub Kegiatan Pengelolaan ruang terbuka hijau.

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota, dimana target pada tahun 2025 15 Ha dan terealisasi 19,64 Ha atau capaian 130, 93 %,



Grafik 3. 25

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan RTH

Kegiatan ini merupakan kegiatan pemeliharaan rutin yang dilakukan setiap triwulan. Adapun rincian luasan RTH yang dikelola dapat dilihat pada table dibawah ini :

NO.	JENIS RTH PUBLIK	LUAS (m ²)	LUAS (Ha)
1	RTH Taman Sayang 1	15,280.66	1.53
2	RTH Taman Sayang 2	4,436.26	0.44
3	Bundaran Bumi Batara Guru (BBG)	36,999.93	3.70
4	RTH Andi Nyiwi Park	10,782.64	1.08
5	RTH Lapangan Soekarno-Hatta (Merdeka)	6,454.31	0.65
6	RTH Taman DPRD	14,655.15	1.47
7	RTH Landmark Luwu Timur	10,000.00	1.00
8	RTH Taman Lampu Merah	766.44	0.08
9	RTH Taman CLBK	2,262.25	0.226
10	Baruga Colaborated Center (BCC)	500.00	0.05
11	RTH Tugu Adipura	10.00	0.0010
12	RTH Lapangan Tenis Indoor Rujab Bupati Luwu Timur	8,284.40	0.8284
13	RTH Kantor Bupati Luwu Timur	17,139.51	1.71
14	RTH Rumah Jabatan Ale Luwu	5,805.61	0.58
15	RTH Lapangan Upacara DPRD Luwu Timur	4,187.58	0.42
16	RTH Taman Baca	2,654.59	0.27
17	RTH Median Jalan Soekarno Hatta	6,000.00	0.60
18	RTH I Love Malili	2,726	0.2726
19	RTH Jalur Hijau Andi Hasan	17,993.34	1.7993
20	RTH Jalur Hijau Soekarno Hatta	15,673.55	1.5674
21	RTH Anjungan Sungai Malili	4,131.81	0.41
22	RTH Pujasera Malili	2,303.74	0.23
23	RTH Ex TPI Malili	1,670.00	0.1670
24	Nursery Malili	3,926.20	0.39
	TOTAL	194,643.97	19,64

Pada sub kegiatan ini total anggaran sebesar Rp 129.774.820,- dan telah terealisasi sebesar 81,34 % dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas realisasi 0% dikarenakan anggaran ini merupakan anggaran untuk pemangkasan pohon yang tidak di SPJ kan karena telah dibayarkan melalui anggaran UPTD PKP.
- ✓ Belanja Bahan-Bahan Kimia terealisasi 100%
- ✓ Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman terealisasi 100%
- ✓ Belanja Bahan-Bahan Lainnya terealisasi 90.85%, sisa anggaran sebesar Rp.3.500.000 merupakan belanja perlengkapan instalasi air yang tidak direalisasikan karena sudah mencukupi.
- ✓ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor terealisasi 92.53%, dikarenakan terdapat penyesuaian harga pada saat negosiasi melalui Inaproc.
- ✓ Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover terealisasi 88.48% dikarenakan terdapat penyesuaian harga pada saat negosiasi melalui Inaproc.
- ✓ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak terealisasi 91.97% diakarenakan terdapat penyesuaian harga pada saat negosiasi melalui Inaproc.

- ✓ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos terealisasi 100%.
- ✓ Belanja Makanan dan Minuman Rapat realisasi 0% dikarenakan anggaran ini merupakan persiapan rapat pemangkasan pohon namun tidak dilaksanakan
- ✓ Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan realisasi 0% dikarenakan anggaran ini merupakan anggaran untuk pemangkasan pohon yang tidak di SPJ kan karena telah dibayarkan melalui anggaran UPTD PKP.
- ✓ Belanja Jasa Tenaga Administrasi tereliasasi 100%.
- ✓ Belanja Lembur realisasi 0% dikarenakan anggaran ini merupakan anggaran untuk pemangkasan pohon yang tidak di SPJ kan karena telah dibayarkan melalui anggaran UPTD PKP.
- ✓ Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional terealisasi 100%
- ✓ Belanja Perjalanan Dinas Biasa terealisasi 99.28%.

Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan ruang terbuka hijau.



3) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Indikator Program adalah Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya. Target kinerja tahun 2025 adalah 100% dimana dan terealisasi sebesar 100% atau capaian 100%. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

didukung oleh 1 kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

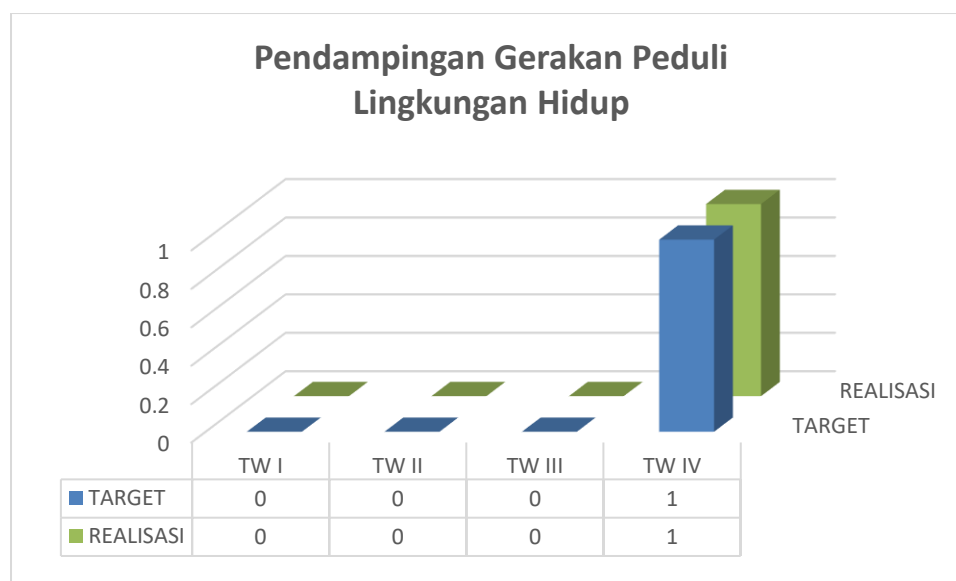
Tabel 3. 41
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina	11 Kelompok	11 Kelompok	100%
A	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kegiatan ini diukur dengan Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina, dimana pada tahun 2025 target 11 kelompok masyarakat, dan terealisasi sebanyak 128 kelompok masyarakat melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini terjadi sehubungan dengan lomba kebersihan tingkat desa/kelurahan yang sejalan dengan pembinaan terkait peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Adapun Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- a. Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan, dimana target pendampingan pada tahun 2025 sebanyak 11 pertemuan dan terealisasi sebanyak 128 pertemuan pendampingan serta pembinaan kepada kelompok Masyarakat.



Grafik 3. 26

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Adapun pelaksanaan kegiatan lain terkait pendampingan gerakan peduli lingkungan antara lain:

1. Pendampingan dan pembinaan kepada 128 (seratus dua puluh delapan) kelompok masyarakat desa/kelurahan dalam lomba kebersihan desa/kelurahan terkait kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah serta penerapan Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan dalam lingkup desa/kelurahan.
2. Melakukan koordinasi bersama DLHK provinsi terkait pengusulan kelembagaan masyarakat PM-WTC yang merupakan komunitas pemuda Dusun Cerekang, Desa Manurung sebagai pendamping penyelamatan LH khususnya dalam menjaga dan melestarikan kawasan hutan adat Cerekang.

Pada sub kegiatan ini total anggaran setelah terjadi efisiensi sebesar Rp 31.188.430 dan telah terealisasi sebesar 94,67% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja ATK terealisasi Rp 87.690 sebesar 81,19% disebabkan adanya penyesuaian harga saat negosiasi melalui inaproc.
- ✓ Belanja kertas dan cover terealisasi Rp 63.270 sebesar 90,48%
- ✓ Belanja bahan cetak terealisasi Rp 253.080 sebesar 89,59% disebabkan harga bahan cetak di bawah standar satuan harga (SSH).
- ✓ Belanja makan dan minum rapat terealisasi Rp 7.200.500 sebesar 98,91%
- Belanja perjalanan dinas biasa terealisasi Rp 21.923.100.000 sebesar 95,33%

**Dokumentasi Kegiatan Pendampingan
Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.**



4) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Indikator Program adalah Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya. Target kinerja tahun 2025 adalah 100% dimana di tahun 2025 belum ada MHA yang ditingkatkan kapasitasnya. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH didukung oleh 1 kegiatan yaitu:

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3. 42
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

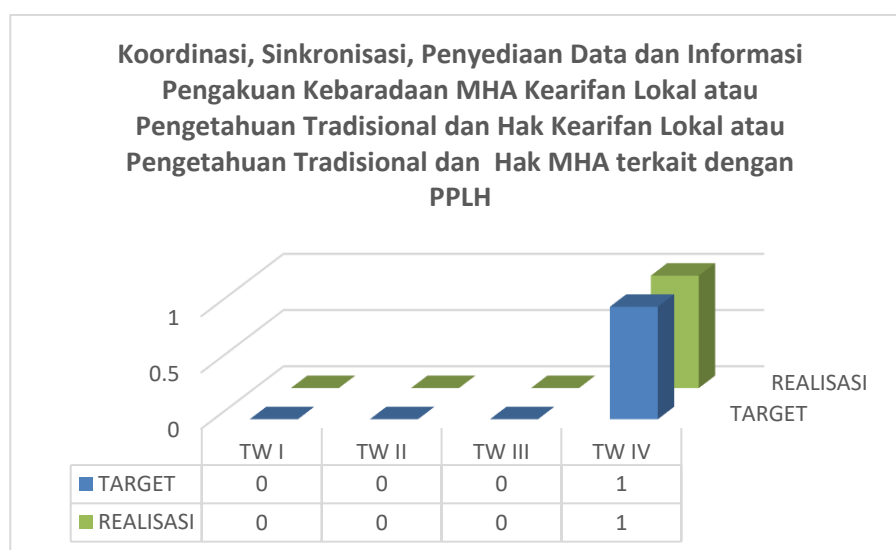
No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Tersedianya MHA yang terdata	16 MHA	0 MHA	0%
A	Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data, dan informasi pengakuan keberadaan MHA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan	1 dokumen	1 dokumen	100%

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
---	---

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah MHA yang terdata, namun pada tahun 2025 belum dapat mencapai target sehingga tidak dapat terealisasi. Hal ini disebabkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi, Validasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kab. Luwu Timur masih dalam tahap pemeriksaan oleh tim legislasi bagian hukum, Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data, dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH.

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait PPLH, dimana target pada tahun 2025 sebanyak 1 (satu) dokumen dan telah terealisasi yaitu Laporan Kegiatan Pembinaan Masyarakat Adat (MA) di Kab. Luwu Timur.



Grafik 3. 27

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan MHA

Adapun kegiatan lain yang telah dilaksanakan terkait MHA, yaitu:

1. Melakukan koordinasi intens dengan bagian hukum/legal sekretariat daerah Kab. Luwu Timur terkait penerbitan SK Pembentukan Panitia MHA Kab. Luwu Timur.
2. Melakukan koordinasi terkait peningkatan peran serta Masyarakat Adat (MA) terhadap pengembangan kampung iklim di Kab. Luwu Timur di DLHK Provinsi bidang DAS.
3. Wawancara dan diskusi internal oleh mahasiswa Universitas Andi Djemma, Palopo, terkait permintaan informasi mengenai tindak lanjut Peraturan Daerah MHA di Kab. Luwu Timur.

Pada sub kegiatan ini total anggaran setelah terjadi efisiensi sebesar Rp 15.226.190 dan terealisasi sebesar 54,01% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja ATK terealisasi Rp 120.213 sebesar 73,86% disebabkan penyesuaian harga saat negosiasi melalui inaproc.
- ✓ Belanja kertas dan cover terealisasi Rp 619.380 sebesar 88,01% disebabkan penyesuaian harga saat negosiasi melalui inaproc.
- ✓ Belanja bahan cetak terealisasi Rp 703.030 sebesar 88,80% disebabkan harga bahan cetak di bawah satuan standar harga.
- ✓ Belanja bahan komputer terealisasi Rp 421.800 sebesar 91,70%
- ✓ Belanja makanan dan minuman rapat tidak dapat terealisasi. Anggaran tersedia namun rapat tindak lanjut pembahasan rancangan Peraturan Bupati terkait MHA dan SK Pembentukan Panitia MHA yang masih berproses di bagian hukum/legal Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur belum dapat terealisasi.
- ✓ Belanja perjalanan dinas biasa terealisasi Rp 6.360.000 sebesar 82,51%

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data, dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH



1.8 KESIMPULAN

- ❖ Capaian Kinerja Sasaran “Terpantaunya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan” telah terealisasi dengan tersusunnya 1 (satu) dokumen kualitas tutupan lahan.
- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada dokumen DPPA – SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun anggaran 2025 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : Rp. 11.201.553.588,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.573.056.891,- atau sebesar 89,09%.
- ❖ Mengoptimalkan program rehabilitasi dan konservasi lahan, termasuk kegiatan revegetasi, reklamasi lahan terdegradasi, dan pengendalian erosi.
- ❖ Meningkatkan pengendalian alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, terutama pada kawasan lindung dan lahan produktif.
- ❖ Mendorong penerapan praktik pengelolaan lahan yang ramah lingkungan pada sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan.
- ❖ Meningkatkan koordinasi lintas sektor serta peran pemangku kepentingan dalam

upaya perbaikan kualitas lahan secara terpadu dan berkelanjutan

- ❖ Memanfaatkan hasil pemantauan dan nilai IKL sebagai dasar evaluasi kebijakan serta perencanaan program pengelolaan lingkungan hidup agar peningkatan kualitas lahan dapat berdampak pada perubahan status IKL di masa mendatang.

4. TIMBULAN SAMPAH TEROLAH DI FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH

1.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Indikator Kinerja yang digunakan Pada Renstra 2025-2029 adalah Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 76,70% dan realisasi 11% atau capaian sebesar 14,34%. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah merupakan jumlah total sampah yang berhasil dikelola, diproses, atau dikurangi melalui berbagai metode di tempat pengolahan, seperti kompos, daur ulang (*recycle*), atau penggunaan kembali (*reuse*), sehingga tidak terbuang langsung ke lingkungan.

Tabel 3. 43
Target dan Realisasi

INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	13,12	11	83,84

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara target dan realisasi pengelolaan sampah. Realisasi timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah masih rendah (11%-14,34%), menunjukkan sebagian besar sampah belum terolah secara optimal. Kondisi ini menegaskan perlunya percepatan operasionalisasi fasilitas pengolahan sampah dan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah untuk menurunkan timbulan sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta mencapai target nasional tahun 2026.

1.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3. 44
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	-	-	-	-	-	-	13,12	11	83,84

Berdasarkan tabel di atas maka belum dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023, 2024, dan 2025, karena indikator timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah merupakan indikator baru di tahun 2025, sehingga belum tersedia data pembading di tahun-tahun sebelumnya.

1.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS OPD

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 45
Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2025
terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026)

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024	Tahun 2025	rata-rata realisasisampai dengan tahun 2025	Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	-	83,84	41,92	14,20	77,46

Berdasarkan tabel di atas, persentase capaian sampai tahun 2025 terhadap target akhir Renstra sudah mencapai 77,46%, sehingga untuk mencapai target akhir

renstra sampai tahun 2029 kedepannya perlu percepatan operasionalisasi fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Luwu Timur dan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah meliputi TPS3R, TPST, Pusat Daur Ulang (PDU), Bank Sampah, Rumah Kompos, RDF maupun fasilitas lainnya yang mendukung peningkatan pengolahan sampah.

1.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Adapun perbandingan antara target dan capaian Nasional dengan target dan capaian Kabupaten/Kota pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 46
Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan
Target dan Capaian Kabupaten/Kota

Indikator Sasaran	Nasional		Kabupaten/Kota	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	100	35	13,12	83,84

Berdasarkan tabel di atas, target dan capaian nasional dengan target dan capaian Kabupaten/Kota belum tercapai. Target nasional tercapai jika target setiap Kab/Kota tercapai pula. Keberhasilan sangat ditentukan oleh komitmen kuat pemerintah provinsi dan pemerintah Kab/Kota untuk memprioritaskan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berbasis pengurangan di sumber.

1.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

- ❖ *Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :*

- Penguatan Sarana dan Prasarana; meliputi ketersediaan alat angkut yang memadai (truk sampah, motor sampah, dan lainnya), ketersediaan sarana pemilahan, Rumah Kompos, Rumah Maggot, Bank Sampah, TPST, TPS3R, PDU, RDF maupun fasilitas pendukung lainnya yang dilengkapi mesin pengolahan sampah yang memadai (seperti pencacah organik, mesin pemilah) di TPS3R/TPST mempercepat volume sampah yang diproses.
- Kelembagaan dan manajemen operasional; meliputi hubungan antar lembaga yang kuat (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam pengelolaan sampah serta adanya regulasi/kebijakan/strategi yang jelas (seperti perda, perbup dan lainnya) memfasilitasi operasional yang terstruktur.
- Pemilahan dari sumber (rumah tangga); keberhasilan tinggi dicapai ketika sampah organik dan anorganik sudah dipilah sejak dari rumah, memudahkan proses pengomposan dan daur ulang di fasilitas pengolahan.
- Kesadaran dan partisipasi masyarakat; meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan membuang sampah pada tempatnya mengurangi timbulan sampah yang tidak terkelola.
- Penerapan teknologi tepat guna; Penggunaan teknologi yang sesuai, seperti pengomposan sampah organik dan daur ulang sampah anorganik, membuat proses pengolahan lebih efisien.
- Komitmen pemerintah, swasta serta peran aktif komunitas dalam mengelola lingkungan termasuk dukungan dari pemerintah daerah serta swasta dalam penyediaan anggaran.

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

- Rendahnya pemilahan sampah di sumber (rendahnya partisipasi pemilahan sampah oleh masyarakat).
- Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan sampah meliputi kurangnya fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah, operasional pengangkutan yang tidak memadai, serta kurangnya lahan untuk fasilitas pengolahan.

- Kurangnya teknologi tepat guna, dimana peralatan pengolahan seringkali tidak terawat atau tidak sesuai dengan jenis karakteristik sampah daerah, serta minimnya tenaga ahli yang mengoperasikan teknologi.
- Terbatasnya anggaran untuk operasional rutin, pemeliharaan mesin, serta lemahnya pembinaan petugas operasional di lapangan.
- Lemahnya Kolaborasi atau kurangnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

❖ Solusi

- Pemilahan dari sumber (hulu); wajib memilah sampah organik (basah) dan anorganik (kering) di tingkat rumah tangga atau komersial untuk mempermudah pemrosesan.
- Optimalisasi teknologi pengolahan sampah untuk sampah organik (pengomposan, *Black Soldier Fly* (BSF) untuk hasil yang cepat dan sampah anorganik (daur ulang, pencacahan plastik, dan pemadatan sampah kertas/karton).
- Penguatan peran Bank Sampah untuk mendaur ulang sampah anorganik bernilai ekonomis dan TPS3R/TPST/fasilitas lainnya untuk mereduksi sampah sebelum ke TPA.
- Kerjasama dengan sektor swasta (produsen) melalui program *Extended Producer Responsibility* (EPR) untuk pengelolaan sampah kemasan, seperti PET botol dan plastik fleksibel.
- Penerapan peraturan daerah (Perbup/Perwali) terkait pembatasan plastik sekali pakai dan insentif bagi industri daur ulang.
- Upgrade peralatan pengolahan sampah di fasilitas untuk meningkatkan efisiensi.
- Pelaksanaan sosialisasi terkait pemilahan sampah dari sumber kepada masyarakat.

1.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

❖ Efisiensi Anggaran

- Telah dilakukan efisiensi anggaran pada beberapa sub kegiatan belanja pada program ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025

tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

❖ Efisiensi Sumber Daya

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dalam penyampaian informasi, maka dapat terfasilitasi dengan penyebarluasan informasi yang dilakukan melalui website, email serta media sosial instagram Dinas Lingkungan Hidup tentang pengolahan sampah.
- Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, DLH Kab. Luwu Timur tetap bekerja dengan maksimal dalam pemenuhan pengolahan sampah.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Adapun perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

Tabel 3. 47
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	13,12	11	83,84	39.702.400	32.847.288	82,73

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat capaian kinerja 83,84 dan capaian anggaran 82,73. Pencapaian kinerja yang didapatkan sesuai dengan anggaran yang digunakan.

1.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan indikator Dokumen kualitas air didukung oleh 1 Program, 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan diantaranya:

6. Program Pengelolaan Persampahan

Indikator Program adalah Indeks kinerja pengelolaan sampah.

Target kinerja tahun 2025 adalah 74% dan terealisasi 65,47% dengan persentase capaian kinerja sebesar 88,47%. Dimana jumlah sampah yang tertangani sebanyak 30,913.24 ton terhadap jumlah timbulan sampah sebanyak 47.219,61 ton $\times 100 = 65,47\%$. Program Pengelolaan Persampahan didukung oleh 1 kegiatan yaitu:

➤ Kegiatan Pengelolaan Sampah

Tabel 3. 48
Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pengelolaan sampah	Persentase sampah yang dikelola	74%	65,47%	88,47%
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	24.888 Ton	27.982,94 Ton	112,43%
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk	1 dokumen	1 dokumen	100%

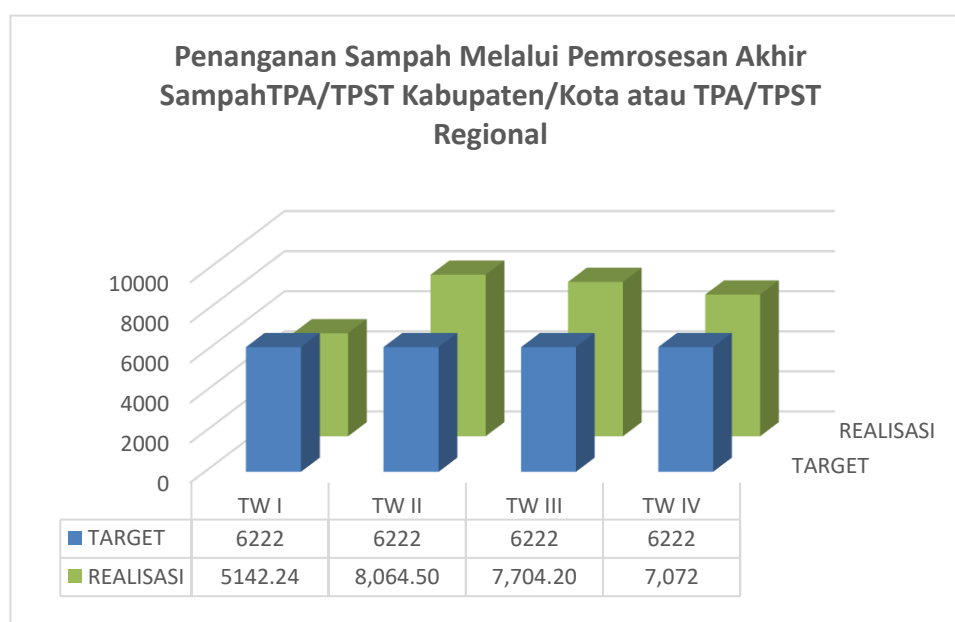
Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Pengelolaan Sampah			
	Kabupaten/Kota.			
	Pengelolaan Persampahan			
	Sesuai dengan Rencana			
	Induk Pengelolaan Sampah dan			
	Mengacu pada Jakstrada			
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	127 Kelompok	205 kelompok	161,42%

2) Kegiatan Pengelolaan Sampah

Indikator kegiatan: Persentase sampah yang dikelola. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan.

c. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional.

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan, dimana target tahun 2025 sebanyak 24.888 ton dan telah terealisasi 27.982,94 ton atau capaian sebesar 112,43%.



Grafik 3. 28
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub Kegiatan Penanganan sampah

Sub kegiatan ini memuat antara lain pengangkutan sampah di 7 Kecamatan yakni: Kecamatan Malili, Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti. Untuk wilayah kecamatan Malili dilakukan pengangkutan sampah dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah yang diangkut oleh petugas kebersihan dengan menggunakan mobil pengangkut sampah dan motor roda tiga untuk kemudian di buang di TPA Ussu.

Pada sub kegiatan ini total anggaran Rp. 4.910.392.073 dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.440.218.227 atau 90,42%. Adapun rinciannya antara lain:

- ✓ Belanja bahan-bahan dan Pelumas terealisasi sebesar Rp. 581.580.400,00 atau sebesar 99,98%.
- ✓ Belanja Alat/Bahan terealisasi sebesar Rp.784.770 atau sebesar 83,10%
- ✓ Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan kantor kertas dan terealisasi sebesar Rp. 1.346.430 atau sebesar 91,13%
- ✓ Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan kantor bahan Komputer terealisasi sebesar Rp. 1.221.000 atau sebesar 96,52%.
- ✓ Belanja Makanan dan Minuman aktivitas lapangan terealisasi sebesar Rp. 20.910.000 atau sebesar 99,29%.
- ✓ Belanja Jasa Tenaga Laboratorium telah terealisasi senilai 650.000,00 dan masih tersisa senilai 2.350.000,00 hal ini disebabkan jumlah sampel sampah atau limbah yang diuji ternyata lebih sedikit dari perencanaan, maka biaya jasa tenaga laboratorium otomatis berkurang.
- ✓ Belanja Jasa Tenaga Kebersihan masih tersisa senilai 436.500.000,00, hal ini disebabkan karena adanya penambahan jasa tenaga kebersihan akan tetapi belum sepenuhnya terekrut berdasarkan target kebutuhan tenaga kebersihan.
- ✓ Belanja jasa Tenaga Keamanan telah sesuai dengan Anggaran realisasi 100%
- ✓ Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan masih tersisa senilai 1.019.296,00, hal ini sebabkan oleh adanya selisih perhitungan antara estimasi tarif pajak atau retribusi dalam anggaran dengan nilai real yang diterbitkan.
- ✓ Belanja Lembur terealisasi sebesar Rp. 88.127.000 atau sebesar 99,93%

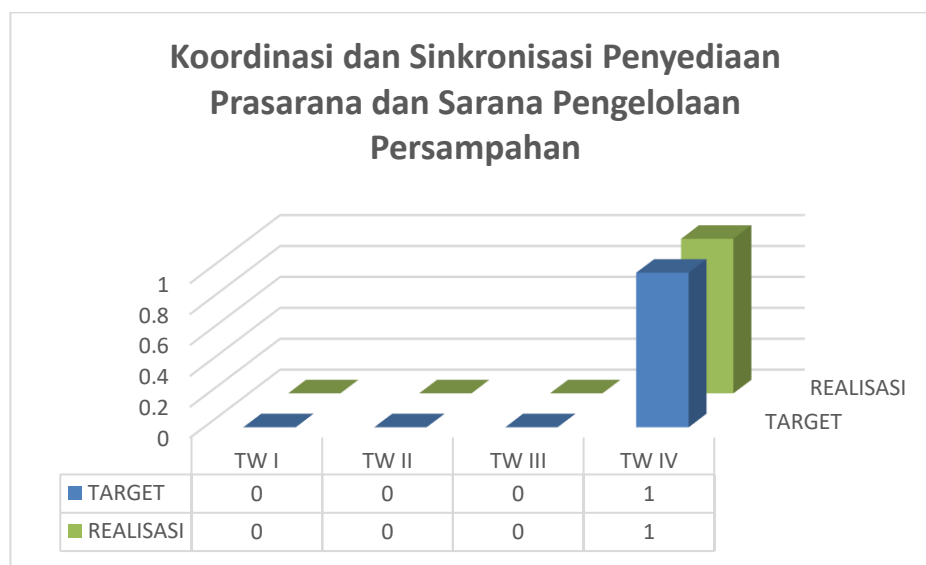
- ✓ Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional dan telah terealisasi sesuai dengan pertriwulan.
- ✓ Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional dan telah terealisasi sesuai dengan pertriwulan.
- ✓ Belanja pemeliharaan Alat Besar- masih tersisa senilai 1.221.888,00, hal ini disebabkan karena sudah tidak adanya kerusakan berat dan tidak memerlukan perbaikan besar hingga akhir tahun anggaran.
- ✓ Belanja pemeliharaan Alat Besar-Loader realisasi 99,99%.
- ✓ Belanja pemeliharaan Alat Besar darat Lainnya masih tersisa senilai 5.251.252,00 hal ini disebabkan karena sudah tidak adanya kerusakan berat dan tidak memerlukan perbaikan besar hingga akhir tahun anggaran.
- ✓ Belanja pemeliharaan Alat Angkutan-kendaraan Bermotor Penumpang masih tersisa senilai 1.085.400,00, hal ini disebabkan karena sudah tidak adanya kerusakan berat dan tidak memerlukan perbaikan besar hingga akhir tahun anggaran.
- ✓ Belanja pemeliharaan Alat Angkutan-kendaraan Bermotor Beroda Tiga masih tersisa senilai 16.500.000,00, hal ini disebabkan karena sudah tidak adanya kerusakan berat dan tidak memerlukan perbaikan besar hingga akhir tahun anggaran.
- ✓ Belanja pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Timbangan/Biara masih tersisa senilai 3.965.000,00, hal ini disebabkan karena sudah tidak adanya kerusakan berat dan tidak memerlukan perbaikan besar hingga akhir tahun anggaran.
- ✓ Belanja pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah tangga- Alat kantor Lainnya realisasi sebesar 99,09%
- ✓ Belanja Perjalanan Dinas Biasa realisasi sebesar 99,62%

Dokumentasi Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota.



- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang disediakan. Pelaksanaan sub kegiatan ini telah terlaksana dan memenuhi target kinerja 1 dokumen.



Grafik 3. 29

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
Sub Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini yakni 83,37%. Terdapat belanja modal perkakas bengkel kayu dan belanja modal alat pembersih yang tidak

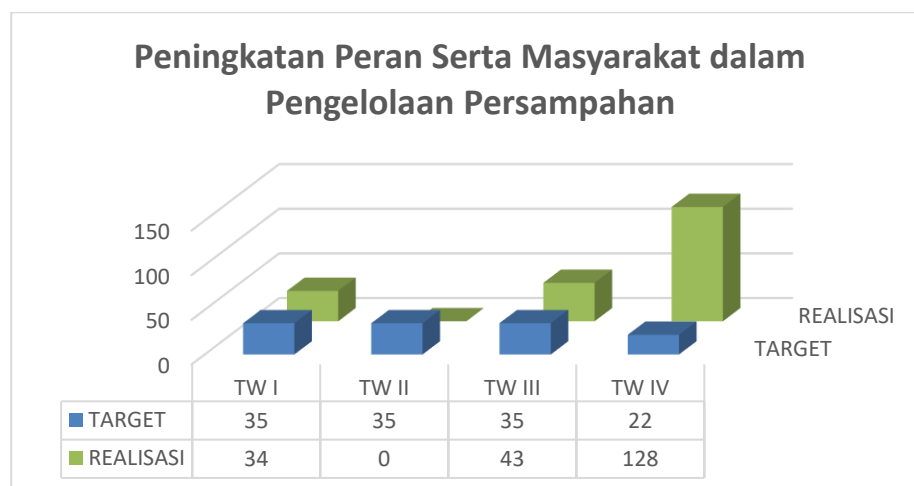
dibelanjakan dikarenakan adanya keterlambatan proses pengadaan karena terjadi perubahan rincian belanja yang akan dibelanjakan.

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan



- d. Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, dimana target pada tahunan adalah 127 kelompok, dimana untuk realisasi ada 205 kelompok Bank Sampah di Desa maupun sekolah yang mendapat pembinaan dalam pengelolaan sampah yang telah dibina.



Grafik 3. 30

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan peningkatan peran serta

Kegiatan ini memuat antara lain berupa Sosialisasi maupun pembinaan Bank Sampah di Desa/Kelurahan maupun sekolah-sekolah,

Pada sub kegiatan ini total anggaran sebesar Rp 103,280,090.00 dan telah terealisasi sebesar 87.04 % dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Alat Tulis Kantor terealisasi 85.22% dikarenakan terdapat penyesuaian harga pada saat negosiasi melalui Inaproc
- ✓ Belanja Kertas dan Cover terealisasi 88.71 % dikarenakan terdapat penyesuaian harga pada saat negosiasi melalui Inaproc.
- ✓ Belanja bahan cetak terealisasi 94.35 % dikarenakan terdapat penyesuaian harga pada saat negosiasi melalui Inaproc.
- ✓ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer masih 91.70% dikarenakan terdapat penyesuaian harga pada saat negosiasi melalui Inaproc
- ✓ Belanja makan minum rapat terealisasi 34.67 %, kurangnya realisasi dikarenakan anggaran disiapkan untuk makan minum rapat kegiatan persiapan lomba kebersihan namun tidak direalisasikan.
- ✓ Belanja makan minum aktivitas lapangan terealisasi 66%, anggaran disediakan untuk persiapan peringatan hari lingkungan namun tidak dilaksanakan
- ✓ Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia terealisasi 67,65% anggaran disediakan untuk persiapan peringatan hari lingkungan namun tidak dilaksanakan
- ✓ Belanja Jasa Tenaga Administrasi telah terealisasi 100%
- ✓ Belanja Perjalanan Dinas Biasa telah terealisasi 99.94 %.

Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.



1.8 KESIMPULAN

- ❖ Capaian Kinerja Sasaran “Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah” diperoleh dari rumus perhitungan :

$$\begin{aligned} & \text{Realisasi Kinerja} \\ & = \frac{\text{Target Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \\ & = \frac{11}{13,12} \times 100 \\ & = 83,84 \end{aligned}$$

- ❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada dokumen DPPA – SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun anggaran 2025 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : Rp. 11.201.553.588,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.573.056.891,- atau sebesar 89,09%.
- ❖ Pemilahan dari sumber (hulu); wajib memilah sampah organik (basah) dan anorganik (kering) di tingkat rumah tangga atau komersial untuk mempermudah pemrosesan.
- ❖ Optimalisasi teknologi pengolahan sampah untuk sampah organik

(pengomposan, *Black Soldier Fly* (BSF) untuk hasil yang cepat dan sampah anorganik (daur ulang, pencacahan plastik, dan pemadatan sampah kertas/karton).

- ❖ Penguatan peran Bank Sampah untuk mendaur ulang sampah anorganik bernilai ekonomis dan TPS3R/TPST/fasilitas lainnya untuk mereduksi sampah sebelum ke TPA.
- ❖ Kerjasama dengan sektor swasta (produsen) melalui program *Extended Producer Responsibility* (EPR) untuk pengelolaan sampah kemasan, seperti PET botol dan plastik fleksibel.
- ❖ Penerapan peraturan daerah (Perbup/Perwali) terkait pembatasan plastik sekali pakai dan insentif bagi industri daur ulang.
- ❖ Upgrade peralatan pengolahan sampah di fasilitas untuk meningkatkan efisiensi.
- ❖ Pelaksanaan sosialisasi terkait pemilahan sampah dari sumber kepada masyarakat.

Tabel 3. 49
Capaian Indikator Kinerja Program Teknis

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter indeks kualitas air	82,6	82.60	100
		Persentase titik pantau udara dengan status memenuhi parameter indeks kualitas udara	9,09	9.09	100
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen lingkungan yang dihasilkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen Uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan laut	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
b	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	100.00%

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Tersedianya luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	37	37	100
1	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Luas lahan yang direhabilitasi	37 Ha	37 Ha	100%
a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas Area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	37 Ha	37 Ha	100%
No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH yang tertangani dengan baik	100%	100	100
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Jumlah RTH yang tertangani dengan baik	15 RTH	15 RTH	160%
a	Pengelolaan ruang terbuka hijau	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	15 Ha	19,64 Ha	130,93%
No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	100	100	100
1	Penyimpanan sementara Limbah B3	Usaha yang taat pengelolaan limbah B3	45 Usaha/ kegiatan	45 Usaha/ kegiatan	100
a	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan / Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik	50 dokumen	50 dokumen	100%

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	100	100	100
1	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	Jumlah usaha atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan (usaha/kegiatan)	30 Usaha/ Kegiatan	35 Usaha/ Kegiatan	116.67%
a	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	15 Usaha/ Kegiatan	21 Usaha/ Kegiatan	140%
b	Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah Badan Usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi	30 badan usaha	35 badan usaha	116.67%
No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	3	0	0
1	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah data/dokumen terkait PPMHA	16 MHA	0 MHA	0.00%
a	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA Kearifan Lokal ataupun pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	1 dokumen	1 dokumen	100%

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	100	100	100
1	penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina	11 kelompok	11 kelompok	100%
a	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	100%
No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	100	100
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Penghargaan yang diberikan	100%	100%	100%
a	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan /Filantropi yang dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	3 Entitas	100%
No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	100	100	100
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan peneglolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase masalah lingkungan yang Teregistrasi	100%	100%	100%

a	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pegaduan permasalahan, pencemaran da perusaskan lingkungan hidup tingkat kabupaten/ kota yang ditindaklanjuti	4 Pengaduan	14 Pengaduan	150%
b	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjafdi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Perkara	1 Perkara	100%
No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	74%	65,47%	88,47%
1	Pengelolaan sampah	Persentase sampah yang dikelola	74%	65,47%	88,47%
a	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat atau Para Pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah Berbasis Masyarakat	127 Kelompok	205 Kelompok	161,42%
b	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain diluar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota, pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada jakstrada	1 dokumen	1 dokumen	100%
c	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atu TPA/TPST Regional	24.888 Ton	27.982,94 Ton	112,44%

SASARAN STRATEGIS 2 (SASARAN PENDUKUNG)

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Pendukung “Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah” tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

5. NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Tabel 3. 50
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung

Sasaran Pendukung	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Nilai AKIP	76,50	76,35	99,80

Berdasarkan tabel diatas, target indikator sasaran Nilai AKIP untuk Tahun 2025 adalah 76,50 dan realisasi kinerja adalah 76,35 atau capaian sebesar 99,80%.

2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 51
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran 1	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah								
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nilai AKIP	60,57	79,5	131,25%	60,58	81,20	134,04%	76,50	76,35	99,80

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023, 2024 dengan tahun 2025. Terdapat peningkatan nilai AKIP pada tahun 2024 dan penurunan nilai AKIP di tahun 2025. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya penurunan nilai AKIP pada tahun 2025 adalah:

- Pegawai belum seluruhnya memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- evaluasi internal baik ditingkat bidang maupun tingkat OPD tidak dilengkapi dengan kertas kerja;
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan teknologi informasi (Aplikasi);
- Peningkatan konsistensi data laporan kinerja dengan system monitoring internal untuk memastikan akurat data.

3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3. 52
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap
Target Jangka Menengah (2025 - 2029)

Sasaran 2	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah			Target Akhir Renstra 2029	% Capaian s/d 2025 terhadap target
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024	Tahun 2025	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2025		akhir Renstra 2029
Nilai AKIP	81,20	76,35	78,76	77,30	98,15

Berdasarkan tabel di atas, dapat terbaca perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir jangka menengah, Persentase capaian 2025 terhadap target akhir renstra 2029 adalah 98,15%.

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

- ❖ Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran yaitu:
- Telah dilakukan perbaikan penjelasan kinerja tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra Perangkat Daerah
 - Telah dilakukan perbaikan Penjenjangan Kinerja dengan melengkapi Crosscutting lintas OPD dalam pencapaian kinerja sasaran OPD.
 - Telah dilakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja secara periodik
 - Peningkatan kualitas LKj dengan memperdalam analisis informasi dalam pencapaian kinerja dan dilengkapi dengan bukti dukung dan

terdapat perbandingan dengan daerah lain/nasional untuk indikator kinerja yang sejenis.

- Bahwa setiap indikator kinerja telah dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra dan PK OPD.

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Pegawai belum seluruhnya memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- evaluasi internal baik ditingkat bidang maupun tingkat OPD tidak dilengkapi dengan kertas kerja;
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan teknologi informasi (Aplikasi);
- Peningkatan konsistensi data laporan kinerja dengan system monitoring internal untuk memastikan akurat data

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- Melakukan sosialisasi ke pegawai untuk merumuskan dan menetapkan target kinerja;
- Melengkapi kertas kerja untuk setiap evaluasi kinerja yang dilakukan;
- Tingkatkan konsistensi laporan kinerja dengan monitoring internal.

6. ANALISIS ATAS EFISIENASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

a. Efisiensi Anggaran

Telah dilakukan efisiensi anggaran pada beberapa sub kegiatan belanja pada program ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025

b. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perkantoran, sehingga terjadi penghematan anggaran surat-menyurat, koordinasi tanpa mengurangi kualitas layanan administrasi

c. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3. 53
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	76,50	76,35	99,80			
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar				12.573.056.891	11.201.553.588	89,09 %

Tabel 3. 54
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%
c	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%
d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Laporan	10 Laporan	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100%	89%	89%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 orang	73 orang	135,19%
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	18 dokumen	18 dokumen	100%
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadministrasikan sesuai standar	100%	100%	100%
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	104.55%	105%

a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	100%
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	3 orang	50%
c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 orang	18 orang	105.88%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dokumen	3 dokumen	100%
e	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	259 Laporan	259 Laporan	100%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	66.28%	66.28%
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	87 Unit	87 unit	100%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%

b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	100%	100%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan Perizinannya	10 unit	10 unit	100%
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 unit	34 unit	100%
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	100%

5) ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

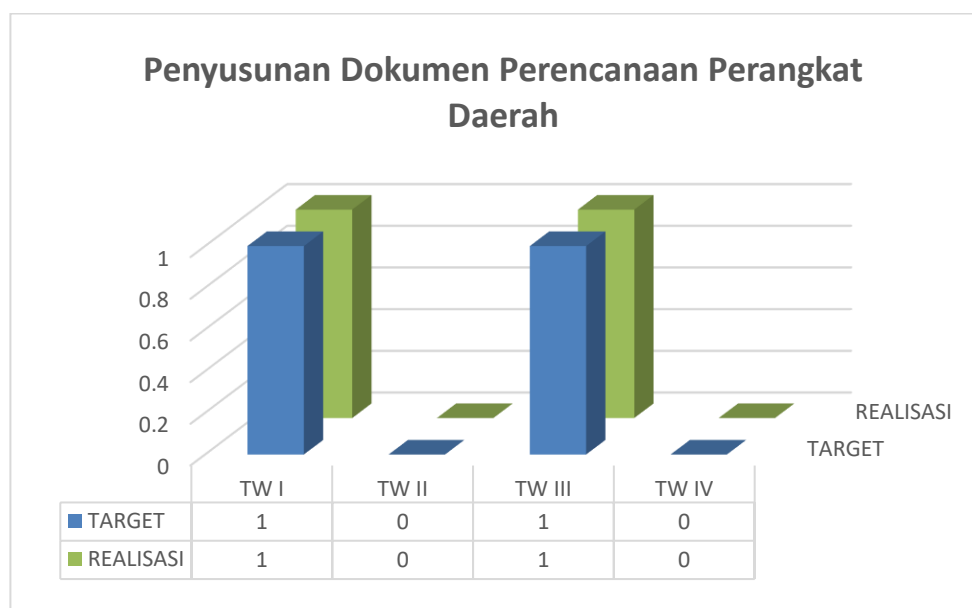
Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan

formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali seratus.

Pencapaian Kinerja Program didukung oleh 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



Grafik 3. 31
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

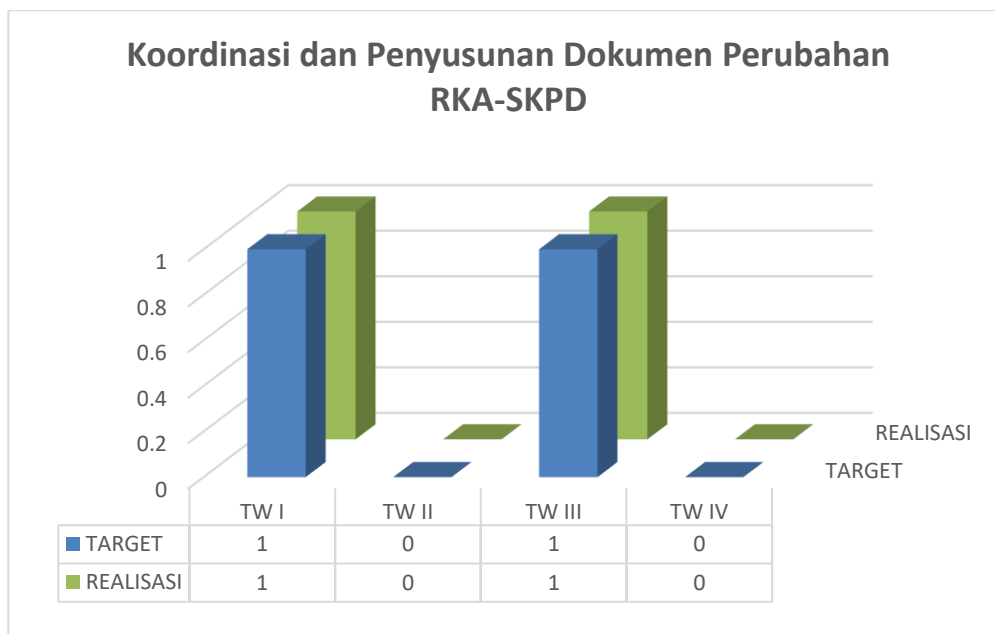
Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (Dokumen) ,dimana target tahun 2025 sebanyak 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen yakni:

1. Dokumen Renja Pokok;
2. Dokumen Renja Perubahan.

Pada sub kegiatan ini total anggaran sebesar Rp 31.681210,- dan telah terealisasi sebesar 90,04% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Alat Tulis Kantor terealisasi 89,37% sisa anggaran karena sisa negosiasi pejabat pengadaan
- ✓ Belanja Kertas dan Cover terealisasi 96,01%.
- ✓ Belanja bahan cetak terealisasi 91,13%.
- ✓ Belanja bahan komputer terealisasi 92,66%.
- ✓ Belanja jasa tenaga administrasi terealisasi 100%
- ✓ Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan (Honorarium Perencana SKPD) terealisasi 100%
- ✓ Belanja perjalanan dinas terealisasi 70,51% Sisa anggaran karena anggaran bersifat disediakan

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD



Grafik 3. 32
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan penyusunan RKA

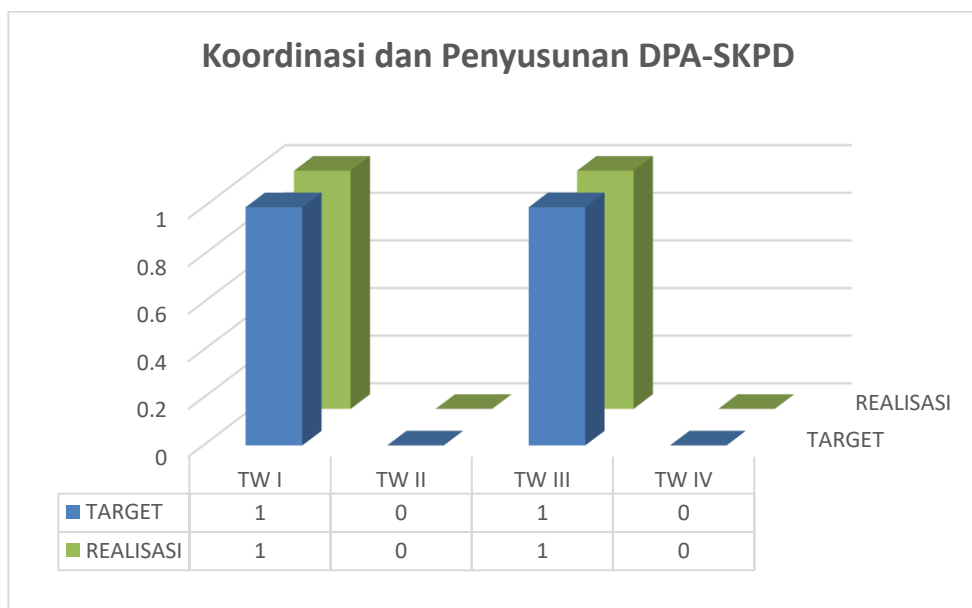
Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen), dimana target kinerja tahun 2025 sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen yakni:

1. RKA Pokok;
2. RKA Perubahan.

Pada sub kegiatan ini total anggaran sebesar Rp 9.262.910,- dan telah terealisasi sebesar 85,13% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Alat Tulis Kantor terealisasi 89,37%, sisa anggaran karena sisa negosiasi pejabat pengadaan.
- ✓ Belanja Kertas dan Cover terealisasi 96,01%.
- ✓ Belanja bahan cetak terealisasi 91,13%.
- ✓ Belanja bahan komputer terealisasi 92,66%.
- ✓ Belanja perjalanan dinas terealisasi 84,00% Sisa anggaran karena anggaran bersifat disediakan

c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD



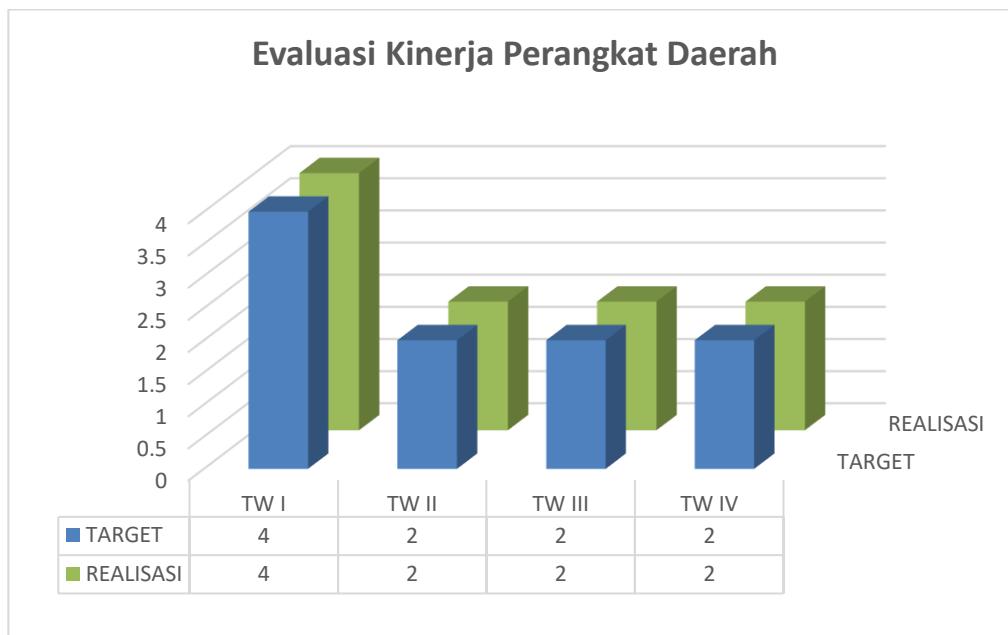
Grafik 3. 33
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan penyusunan RKA

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen), Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen), dimana target kinerja tahun 2025 sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen yakni:

1. DPA Pokok;
2. DPA Perubahan.

Pada sub kegiatan ini total anggaran sebesar Rp 1.517.380,- dan telah terealisasi sebesar 94,11% dengan rincian Belanja bahan cetak terealisasi 94,11%.

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



Grafik 3. 34
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (Dokumen), dimana target kinerja tahun 2025 adalah 10 dokumen dan terealisasi sebanyak 10 dokumen diantaranya:

1. RKPD 2026;
2. LKPJ 2025;
3. LAKIP 2025;
4. Lap. Evaluasi kinerja Tw. IV tahun 2025;
5. Lap. Evaluasi kinerja Tw. I Tahun 2025;
6. Laporan Berjenjang Tw I tahun 2025;
7. Lap. Evaluasi kinerja Tw. II Tahun 2025;
8. Laporan Berjenjang Tw II tahun 2025;
9. Lap. Evaluasi kinerja Tw. III Tahun 2025;
10. Laporan Berjenjang Tw III tahun 2025.

Pada sub kegiatan ini total anggaran sebesar Rp 29.418.999,- dan telah terealisasi sebesar 95,34% dengan rincian sebagai berikut :

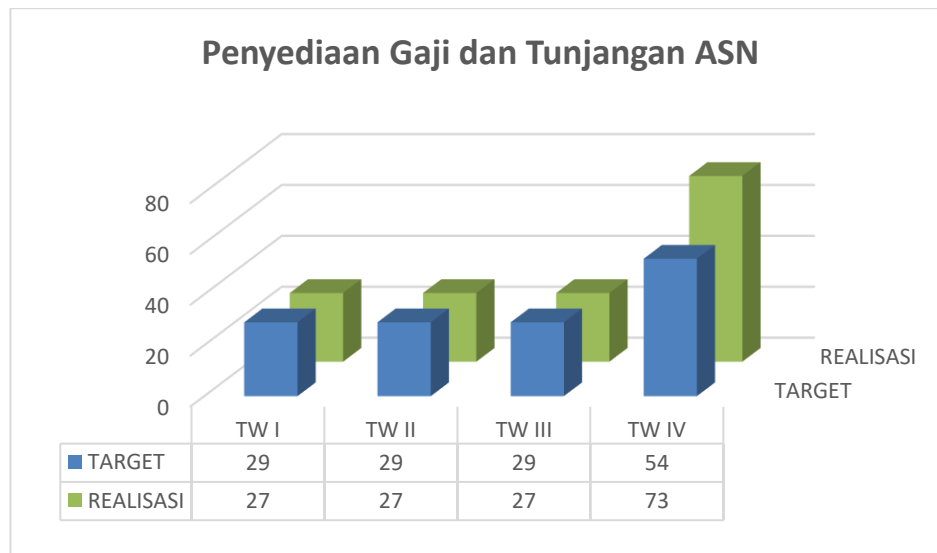
- ✓ Belanja Alat Tulis Kantor terealisasi 80,14%, sisa anggaran karena sisa negosiasi pejabat pengadaan.

- ✓ Belanja Kertas dan Cover terealisasi 91,57%.
- ✓ Belanja bahan cetak terealisasi 72,50%, sisa anggaran karena sisa negosiasi pejabat pengadaan.
- ✓ Belanja makan minum rapat terealisasi 78,60%, sisa anggaran karena sisa negosiasi pejabat pengadaan.
- ✓ Belanja perjalanan dinas terealisasi 97,18%.

Dokumentasi Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



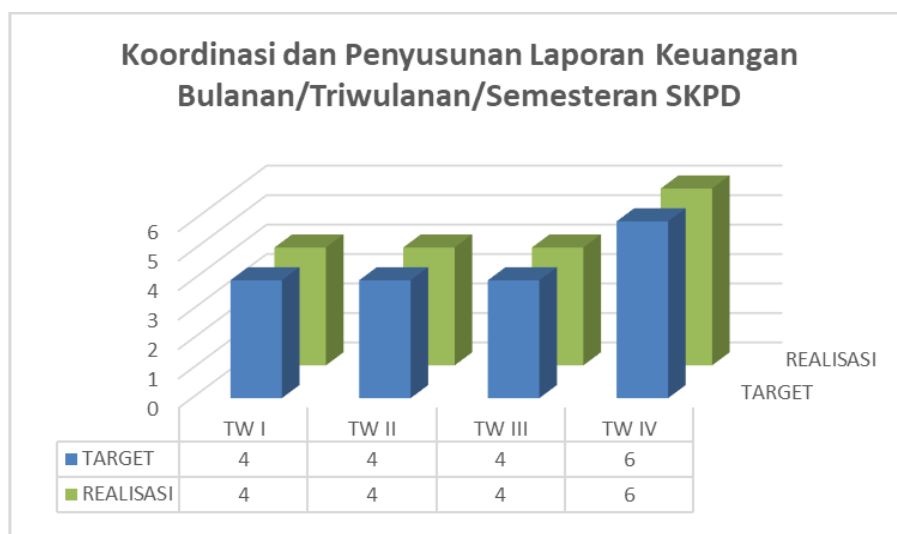
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



Grafik 3. 35
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan penyediaan gaji

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, dimana target pada triwulan IV sebanyak 54 orang dan telah terealisasi 73 orang. Diantaranya: 1 orang eselon II, 4 orang eselon III, 4 orang eselon IV, 6 orang fungsional, 39 orang pelaksana dan 19 orang PPPK

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD



Grafik 3. 36
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 18 dokumen dan terealisasi 18 dokumen yaitu tersusunnya

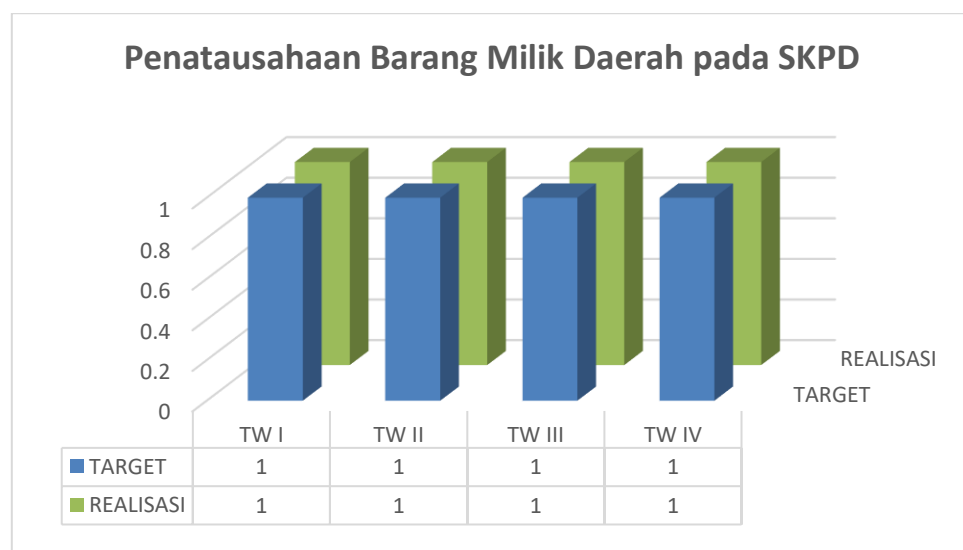
- Laporan Realisasi Keuangan Bulan Januari s/d Desember 2025;
- Laporan Keuangan Triwulan IV;
- Laporan Semester II Tahun 2025; dan
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025 dengan capaian kinerja 100%.

Disediakan anggaran sebesar Rp 98.912.430,- dengan realisasi keuangan Rp. 94.427.439,- atau capaian 95,47% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Kertas dan Cover terealisasi 89,45%, sisa anggaran karena sisa negosiasi pejabat pengadaan.
- ✓ Belanja bahan cetak terealisasi 74,46%, sisa anggaran karena sisa negosiasi pejabat pengadaan.
- ✓ Belanja bahan komputer terealisasi 91,70%.
- ✓ Belanja jasa tenaga administrasi terealisasi 100%
- ✓ Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan terealisasi 100%
- ✓ Belanja perjalanan dinas terealisasi 87,19%, sisa anggaran karena anggaran bersifat disediakan

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD



Grafik 3. 37
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan penatausahaan BMD

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah laporan penatusahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen yaitu tersusunnya laporan penatausahaan BMD triwulan I s/d Triwulan IV tahun 2025 dengan capaian kinerja 100%.

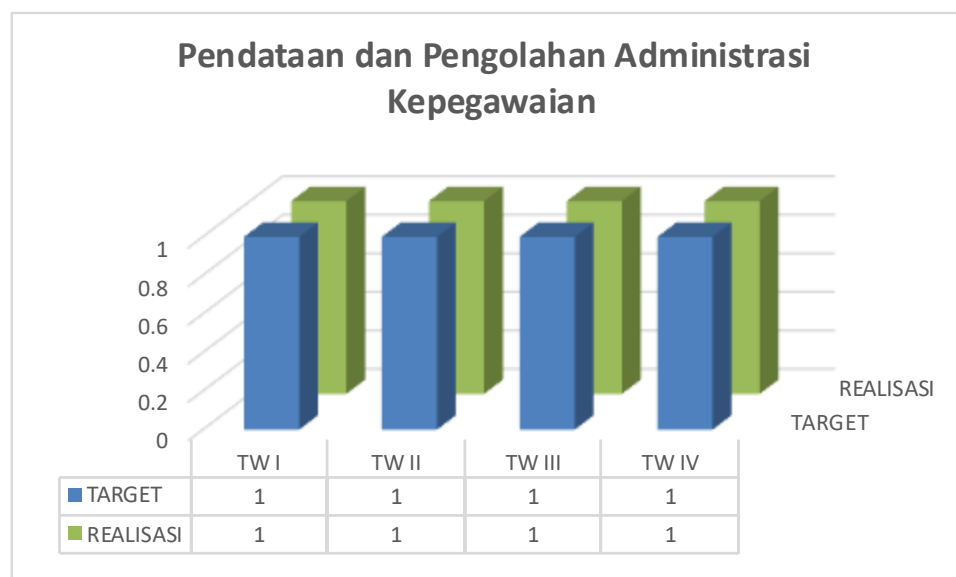
Disediakan anggaran sebesar Rp 23.956.750,- dengan realisasi keuangan Rp. 19.916.640,- atau capaian 83,14%.

dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Alat Tulis Kantor terealisasi 87,77%, sisa anggaran karena sisa negosiasi pejabat pengadaan.
- ✓ Belanja Kertas dan Cover terealisasi 94,77%.
- ✓ Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan (Honorarium pejabat pengurus barang) terealisasi 94,57%
- ✓ Belanja perjalanan dinas terealisasi 51,88%, sisa anggaran karena anggaran bersifat disediakan

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian



Grafik 3. 38

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan Administrasi Kepegawaian

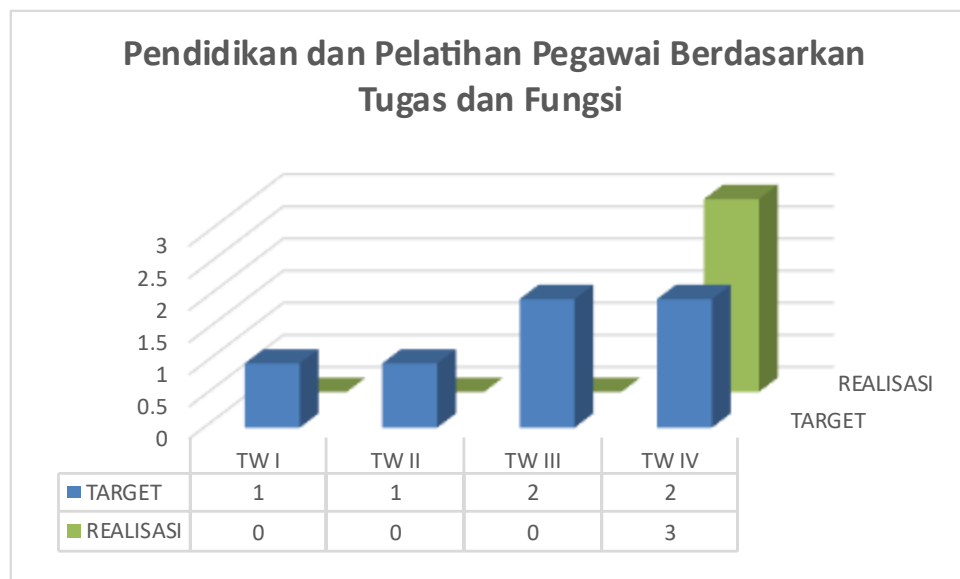
Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan , dimana target pada triwulan IV sebanyak 1 dokumen dan telah terealisasi 1 dokumen. Yaitu Dokumen administrasi kepegawaian. Adapun administrasi kepegawaian yang dilaksanakan dalam tahun 2025 adalah:

- Penyusunan SK penempatan ASN dan Non ASN;
- KP4 ASN;
- KGB ASN;
- SKP ASN;
- Usulan Karis/Karsu ASN;
- Usulan kenaikan Pangkat;
- Usulan Pencantuman Gelar;
- Usulan Satya Lencana;
- Usulan pemetaan PPPK tahap 1 dan tahap 2;
- Usulan kenaikan pangkat;
- Usulan pencantuman gelar;
- Usulan cuti pegawai.

Pada sub kegiatan ini total anggaran sebesar Rp 16.226.750,- dan telah terealisasi sebesar 97,38% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja Alat Tulis Kantor terealisasi 93,04%
- ✓ Belanja Kertas dan Cover terealisasi 96,87%
- ✓ Belanja jasa tenaga administrasi terealisasi 100%.
- ✓ Belanja perjalanan dinas terealisasi 87,76%, sisa anggaran sisa anggaran karena anggaran bersifat disediakan

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



Grafik 3. 39
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan tugas dan fungsi

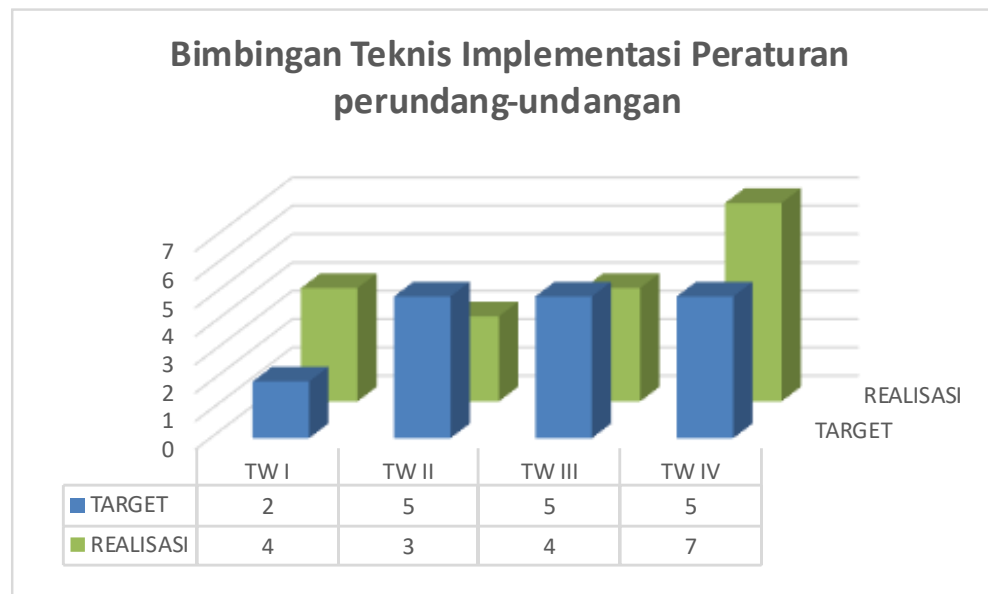
Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dimana target Tahun 2025 sebanyak 6 orang dan terealisasi 3 orang atau capaian 50%.

Disediakan anggaran sebesar Rp 62.622.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 31.555.804,- (50,36%). Terdapat sisa anggaran pada biaya kursus singkat/pelatihan karena anggaran bersifat disediakan apabila ada kegiatan bimtek yang harus membayar kontribusi bimtek.

Pada sub kegiatan ini total anggaran sebesar Rp Rp 62.622.000,- dan telah terealisasi sebesar 50,36% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja kursus singkat/pelatihan terealisasi 50%, Anggaran bersifat disediakan
- ✓ Belanja perjalanan dinas terealisasi 50,53%, Anggaran bersifat disediakan

c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



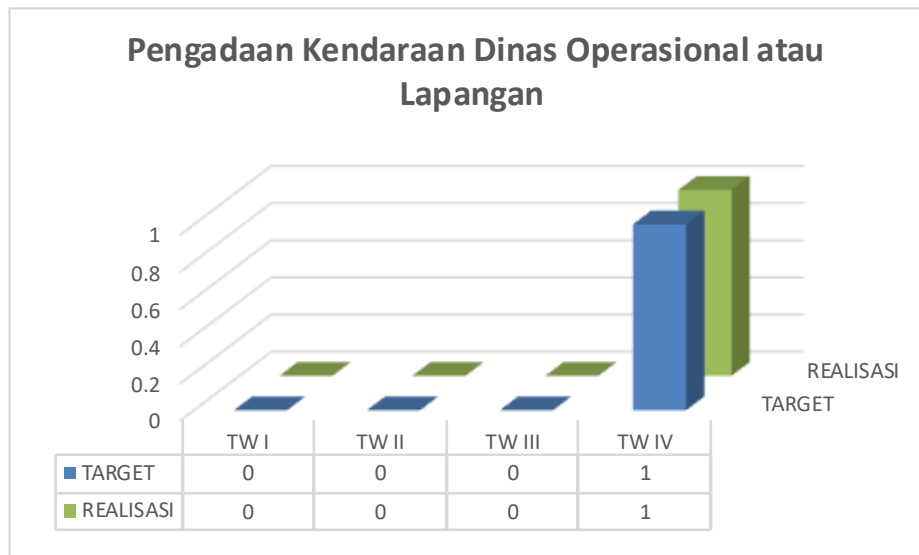
Grafik 3. 40
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV sub kegiatan BIMTEK

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan, dimana target Tahun 2025 sebanyak 17 orang yang mengikuti Bimtek dan terealisasi 18 orang yang mengikuti bimtek.

Pada sub kegiatan ini total anggaran sebesar Rp 97.674.000,- dan telah terealisasi sebesar 88,21% dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja kursus singkat/pelatihan terealisasi 81,95%, Anggaran bersifat disediakan untuk bimtek yang memerlukan pembayaran biaya kontribusi bimtek
- ✓ Belanja perjalanan dinas terealisasi 96,28%.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



Grafik 3. 41
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas

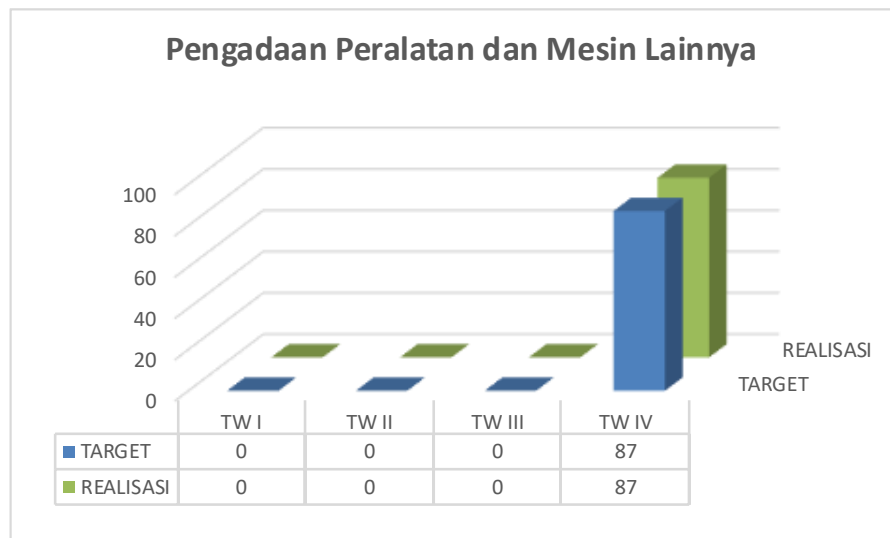
Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan, dimana target Tahun 2025 sebanyak 1 unit dan realisasi 1 unit atau capaian 100%.

Pada sub kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 586.696.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 565.600.000,- (96,40%).

Dokumentasi Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas



b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



Grafik 3. 42
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan pengadaan mesin

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan, dengan target sebanyak 87 unit dan terealisasi 87 Unit dengan capaian kinerja 100%.

Pada sub kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 273.200.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 239.688.600,- atau capaian 87,73%. Terdapat sisa anggaran karena sisa negosiasi pejabat pengadaan.

Dokumentasi Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor****Grafik 3. 43**

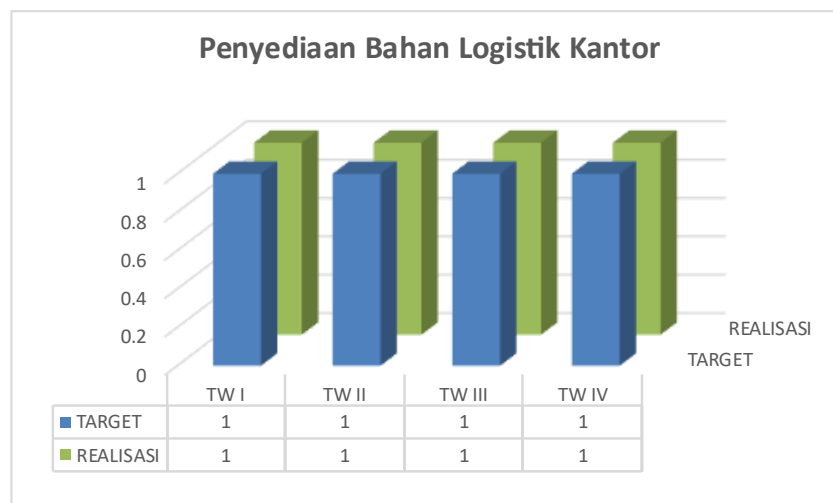
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, dengan target sebanyak 1 paket dan terealisasi 1 paket dengan capaian kinerja 100%.

Pada sub kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 14.445.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 14.418. 883,- atau capaian 99,82%, dengan rincian dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja alat listrik terealisasi 99,79%
- ✓ Belanja jasa pemasangan instalasi telpon, air, dan listrik terealisasi 100%.

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

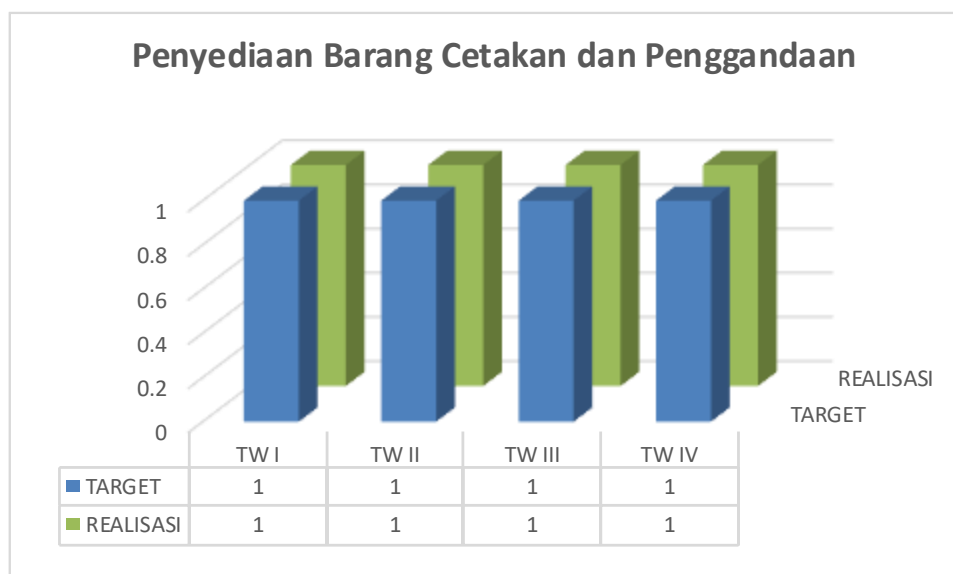


Grafik 3. 44

Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan penyediaan bahan logistik

Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan, dengan target sebanyak 1 paket dan terealisasi 1 p a k e t dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 4.668.640,- dengan realisasi keuangan Rp. 3.707.000,- atau capaian 79,40%.

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



Grafik 3. 45

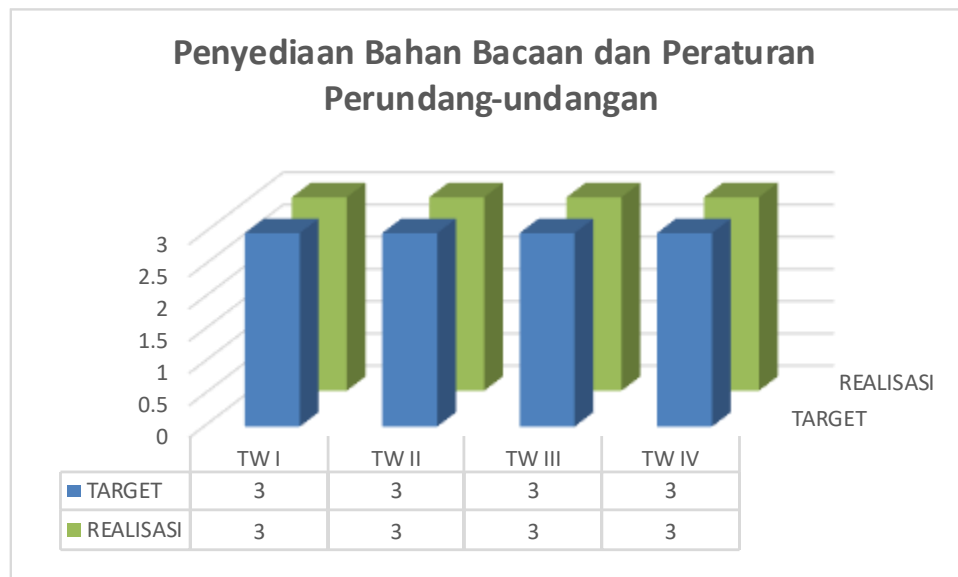
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan penyediaan barang cetak

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan, dimana target pada tahun 2025

sebanyak 1 paket dan telah terealisasi 1 paket, yaitu cetak dan penggandaan dengan capaian kinerja 100%.

Pada sub kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 5.159.500,- dengan realisasi keuangan Rp. 3.598.911,- atau capaian 69,75% , sisa anggaran karena sisa negosiasi pejabat pengadaan.

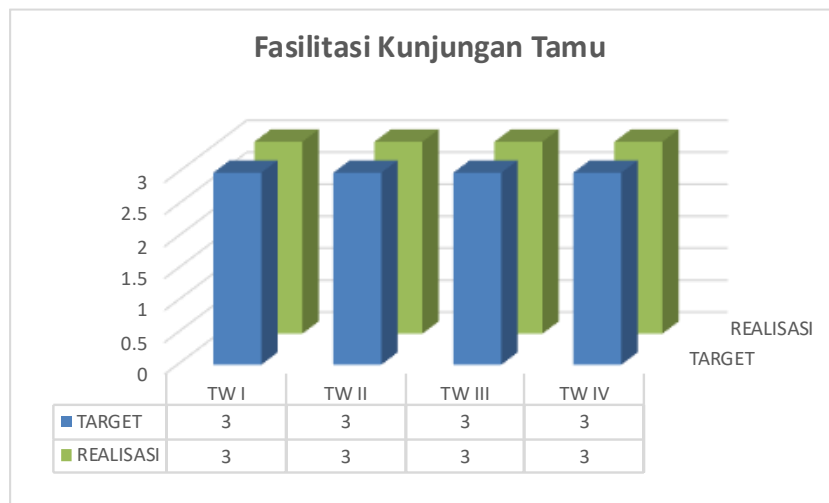
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



Grafik 3. 46
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan penyediaan bahan bacaan

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, dimana target sebanyak 3 dokumen dan telah terealisasi 3 dokumen. Diantaranya: Koran Radar, Sindo dan Palopo Pos. Disediakan anggaran sebesar Rp 4.500.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 3.900.000,- (86,67%), sisa anggaran karena sisa negosiasi pejabat pengadaan.

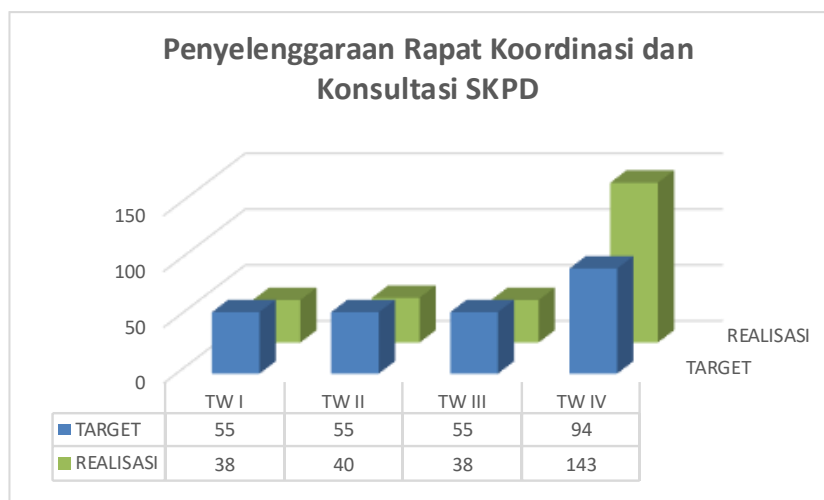
e. Fasilitas Kunjungan Tamu



Grafik 3. 47
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan fasilitas kunjungan tamu

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu, dimana target sebanyak 12 laporan dan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 30.000.000,- dengan realisasi keuangan RP. 26.509.000,- atau capaian 88,36%, sisa anggaran karena sisa negosiasi pejabat pengadaan.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



Grafik 3. 48
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan Rakor

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dimana target sebanyak 259 laporan dan telah terealisasi 259 laporan. Diantaranya: laporan penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi dalam daerah, luar daerah dan luar provinsi dengan capaian kinerja 100%.

Pada sub kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 340.280.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 337.974.559,- atau capaian 99,32%, dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja jasa tenaga supir terealisasi 95,45%
- ✓ Belanja PPPK terealisasi 100%.
- ✓ Belanja perjalanan dinas terealisasi 99,74%.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Grafik 3. 49
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan surat menyurat

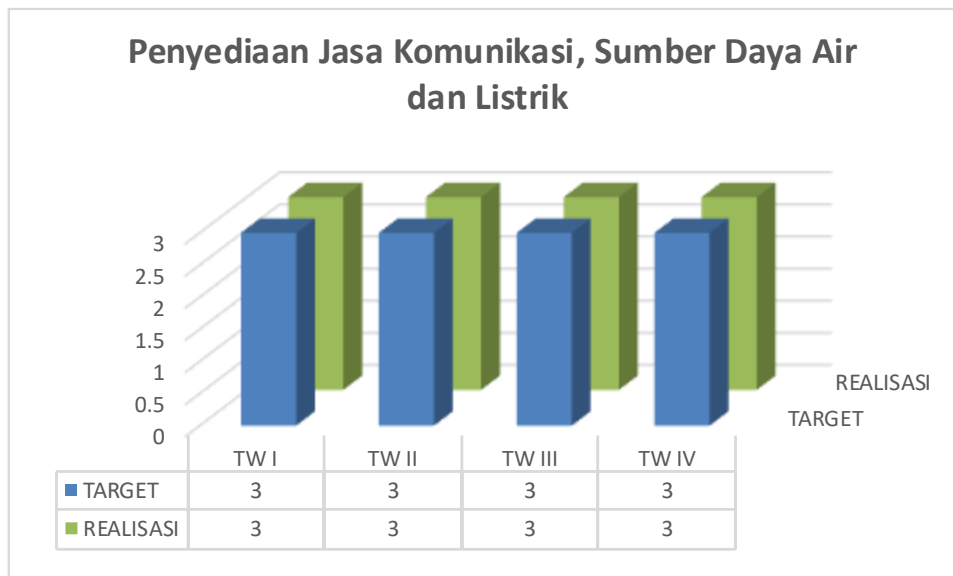
Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, dimana target sebanyak 12 laporan dan telah terealisasi 12 Laporan dengan capaian kinerja 100%.

Pada sub kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 1.809.350,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.685.599,- atau capaian 93,22%, dengan

rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja alat tulis kantor terealisasi 95,14%
- ✓ Belanja kertas dan cover terealisasi 90,23%.
- ✓ Belanja benda pos terealisasi 100%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



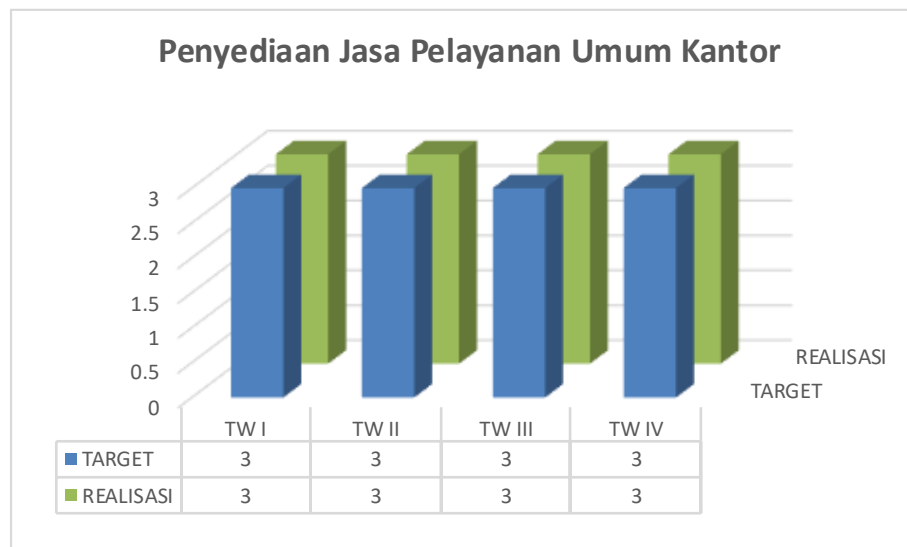
Grafik 3. 50
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan jasa komunikasi

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik yang disediakan, dimana target sebanyak 12 laporan dan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian kinerja 100%.

Pada sub kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 107.700.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 97.008.310,- atau capaian 90,07%, dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja tagihan air terealisasi 92,36%
- ✓ Belanja tagihan listrik terealisasi 89,89%.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

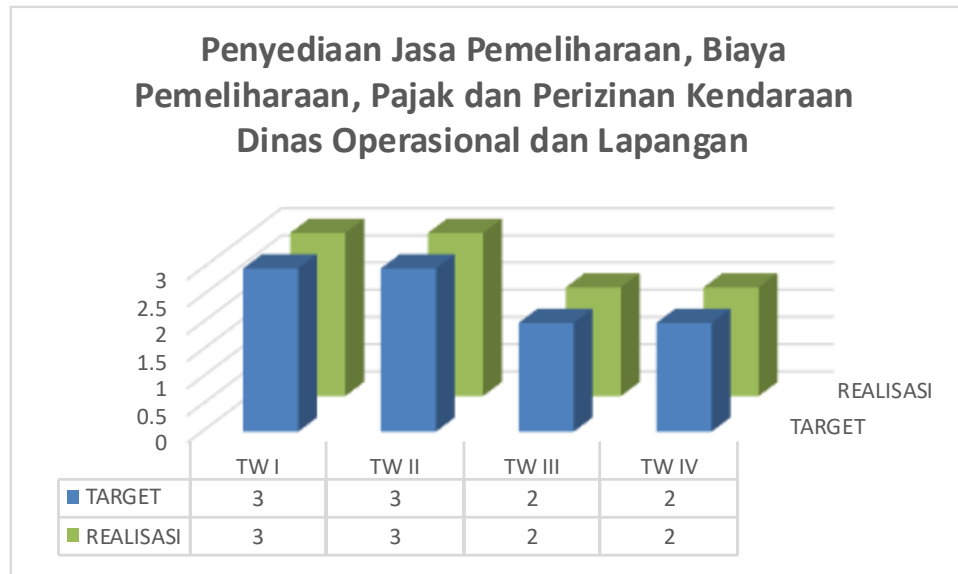


Grafik 3. 51
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan jasa pelayanan umum

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan, dimana target sebanyak 12 laporan dan telah terealisasi 12 laporan dengan capaian kinerja 100%. Disediakan anggaran sebesar Rp 51.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 51.000.000,- (100%), dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja tenaga pelayanan umum terealisasi 100%
- ✓ Belanja tenaga keamanan terealisasi 100%.
- ✓ Belanja PPPK terealisasi 100%.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



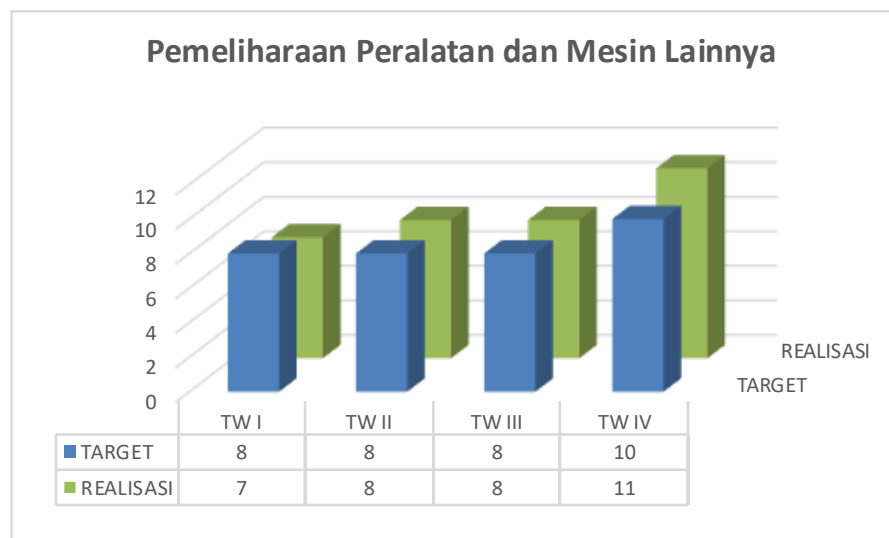
Grafik 3. 52
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan jasa pemeliharaan

Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, dengan target sebanyak 10 unit dan terealisasi 10 unit dengan capaian kinerja 100%.

Pada sub kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 119.660.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 77.999.014,- atau capaian 65,18%, dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Belanja bahan bakar dan pelumas terealisasi 100%
- ✓ Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan terealisasi 82,78%.
- ✓ Belanja pemeliharaan kendaraan dinas bermotor perorangan terealisasi 10,52%. Kurangnya realisasi kendaraan roda dua, dikarenakan masing-masing penanggungjawab kendaraan dinas (roda dua) melakukan perbaikan secara mandiri.
- ✓ Belanja pemeliharaan kendaraan dinas bermotor penumpang terealisasi 70,08%.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

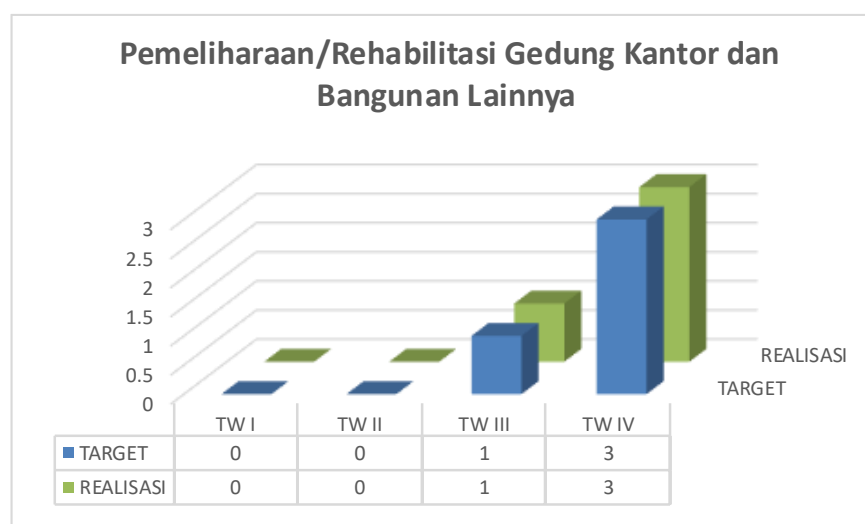


Grafik 3. 53
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan pemeliharaan peralatan

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, dimana target sebanyak 34 unit dan telah terealisasi 34 unit dengan capaian kinerja 100%.

Pada sub kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 13.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 11.090.000,- atau capaian 85,31%, terdapat sisa anggaran karena anggaran bersifat disediakan.

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



Grafik 3. 54
Perbandingan target dan realisasi Tw. I,II,III & IV
sub kegiatan rehabilitasi gedung

Indikator kinerja sub Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi, dengan target sebanyak 4 unit dan terealisasi 4 unit dengan capaian kinerja 100%. Diantaranya:

- 1) Kantor DLH
- 2) Kantor Laboratorium
- 3) Kantor Nurseri
- 4) Kantor TPA Ussu

Pada sub kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 66.146.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 62.608.114,- (94,65%).

3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 adalah sebesar sebesar Rp. 12.573.056.901,- (*Dua belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh enam ribu sembilan ratus satu rupiah*), terdiri dari belanja operasi Rp. 11.656.760.901,- dan belanja modal Rp 916.296.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 11 program, 18 kegiatan serta 40 sub kegiatan.

Rincian realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. 55
Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			(RP)	(%)	(RP)	(%)
1	2	4	6	7 (6/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50,000,000	57,432,000	114.86	(7,432,000)	- 14.86
4.1.02	Retribusi Daerah	50,000,000	57,432,000	114.86	(7,432,000)	- 14.86
4.0.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	50,000,000	57,432,000	114.86	(7,432,000)	- 14.86

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			(RP)	(%)	(RP)	(%)
1	2	4	6	7 (6/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,254,930,812	5,584,608,077	89.28	610,311,835	9.76
2.11.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	71,880,490	65,886,218	91.66	5,994,272	8.34
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31,681,210	28,524,463	457.65	3,156,747	9.96
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	1,877,250	1,677,765	-	199,485	10.63
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	2,837,160	2,723,940	96.01	113,220	3.99
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak	2,209,800	2,013,718	91.13	196,082	8.87
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer	1,035,000	959,040	-	75,960	7.34
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6,000,000	6,000,000	100.00	-	-
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan (Honorarium Perencana SKPD)	9,000,000	9,000,000	100.00	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,722,000	6,150,000	70.51	2,572,000	29.49
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9,262,910	7,885,402	85.13	1,377,508	14.87
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	76,880	53,058	-	23,822	30.99
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	636,030	576,090	-	59,940	9.42
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak	931,000	856,254	-	74,746	8.03
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,619,000	6,400,000	84.00	1,219,000	16.00

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			(RP)	(%)	(RP)	(%)
1	2	4	6	7 (6/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,517,380	1,428,004	94.11	89,376	5.89
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak	1,517,380	1,428,004	94.11	89,376	5.89
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,418,990	28,048,349	95.34	1,370,641	4.66
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	48,480	38,850	80.14	9,630	19.86
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	638,250	584,415	-	53,835	8.43
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak	1,262,260	915,084	-	347,176	27.50
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,000,000	786,000	78.60	214,000	21.40
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,470,000	25,724,000	97.18	746,000	2.82
2.11.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4,364,266,332	3,868,499,004	88.64	495,767,328	11.36
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,265,353,902	3,774,071,565	88.48	491,282,337	11.52
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok ASN	1,627,356,439	1,502,703,060	92.34	124,653,379	7.66
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	328,542,527	234,221,066	71.29	94,321,461	28.71
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	190,150,107	146,433,468	77.01	43,716,639	22.99
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	45,081,991	24,407,571	54.14	20,674,420	45.86
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	120,124,875	104,115,000	86.67	16,009,875	13.33
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	121,432,000	99,448,000	81.90	21,984,000	18.10
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	33,817,000	33,817,000	100.00	-	-
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	18,972,520	14,449,166	76.16	4,523,354	23.84
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras ASN	109,922,697	87,193,680	79.32	22,729,017	20.68

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			(RP)	(%)	(RP)	(%)
1	2	4	6	7 (6/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	28,674,849	17,410,975	60.72	11,263,874	39.28
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3,140,157	1,906,103	60.70	1,234,054	39.30
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2,000,000	-	-	2,000,000	100.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji ASN	381,028	21,636	5.68	359,392	94.32
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	149,712	5,312	3.55	144,400	96.45
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	1,612,858,000	1,485,284,682	92.09	127,573,318	7.91
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK	22,750,000	22,654,846	99.58	95,154	0.42
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	98,912,430	94,427,439	95.47	4,484,991	4.53
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	1,346,430	1,204,350	-	142,080	10.55
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak	544,000	405,039	-	138,961	25.54
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer	1,035,000	949,050	-	85,950	8.30
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18,000,000	18,000,000	100.00	-	-
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	37,680,000	37,680,000	100.00	-	-
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000	8,160,000	100.00	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32,147,000	28,029,000	87.19	4,118,000	12.81
2.11.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	23,956,750	19,916,640	83.1358	1,202,110	5.02
2.11.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23,956,750	19,916,640	277	1,202,110	5.02

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			(RP)	(%)	(RP)	(%)
1	2	4	6	7 (6/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	3,277,200	2,876,460	87.77	400,740	12.23
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	981,550	930,180	94.77	51,370	5.23
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	13,800,000	13,050,000	94.57	750,000	5.43
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,898,000	3,060,000	51.88	2,838,000	48.12
2.11.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	176,562,750	133,517,234	466.52	43,045,516	64.05
2.11.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16,226,750	15,801,230	187.76	425,520	2.62
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	639,500	594,960	-	44,540	6.96
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	638,250	618,270	-	19,980	3.13
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12,000,000	12,000,000	100.00	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,949,000	2,588,000	87.76	361,000	12.24
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	62,662,000	31,555,804	100.53	31,106,196	49.64
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	20,000,000	10,000,000	50.00	10,000,000	50.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42,662,000	21,555,804	50.53	21,106,196	49.47
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	97,674,000	86,160,200	178.23	11,513,800	11.79
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	55,000,000	45,075,000	81.95	9,925,000	18.05
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42,674,000	41,085,200	96.28	1,588,800	3.72
2.11.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	399,053,140	390,108,353	97.76	8,944,787	2.24

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			(RP)	(%)	(RP)	(%)
1	2	4	6	7 (6/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,445,000	14,418,883	99.82	26,117	0.18
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik	12,445,000	12,418,883	99.79	26,117	0.21
5.1.02.02.01.0041	Belanja jasa Pemasangan Instalasi Telepon,Air dan Listrik	2,000,000	2,000,000	100.00	-	-
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4,668,640	3,707,000	79.40	961,640	20.60
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-bahan lainnya	4,668,640	3,707,000	79.40	961,640	20.60
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,159,500	3,598,911	69.75	1,560,589	30.25
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,159,500	3,598,911	69.75	1,560,589	30.25
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,500,000	3,900,000	86.67	600,000	13.33
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4,500,000	3,900,000	86.67	600,000	13.33
2.11.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	30,000,000	26,509,000	88.36	3,491,000	11.64
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30,000,000	26,509,000	88.36	3,491,000	11.64
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340,280,000	337,974,559	99.32	2,305,441	0.68
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Sopir	33,000,000	31,500,000	95.45	1,500,000	4.55
5.1.02.02.01.0088	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasioal	3,000,000	3,000,000	100.00	-	-

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			(RP)	(%)	(RP)	(%)
1	2	4	6	7 (6/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	304,280,000	303,474,559	99.74	805,441	0.26
2.11.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	859,896,000	805,288,600	93.65	77,318,265	8.99
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	586,696,000	565,600,000	96.40	76,604,580	13.06
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Bermotor Penumpang	586,696,000	565,600,000	96.40	21,096,000	3.60
2.11.01.2.07.0006	pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	273,200,000	239,688,600	87.73	11,059,970	4.05
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	10,000,000	6,300,000	63.00	3,700,000	37.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	24,200,000	23,676,300	97.84	523,700	2.16
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	59,450,000	56,421,300	94.91	3,028,700	5.09
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja pejabat	52,450,000	30,358,500	57.88	22,091,500	42.12
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal lemari dan Arsip Pejabat	5,200,000	4,440,000	85.38	760,000	14.62
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal personal Computer	105,000,000	103,230,000	98.31	1,770,000	1.69
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal peralatan Personal Computer	16,900,000	15,262,500	90.31	1,637,500	9.69
2.11.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	160,509,350	149,694,900	93.26	10,814,450	6.74
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,809,350	1,686,590	93.22	122,760	6.78
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	105,000	99,900	95.14	5,100	4.86

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			(RP)	(%)	(RP)	(%)
1	2	4	6	7 (6/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	1,204,350	1,086,690	90.23	117,660	9.77
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos	500,000	500,000	100.00	-	-
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107,700,000	97,008,310	90.07	10,691,690	9.93
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	7,800,000	7,203,975	92.36	596,025	7.64
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	99,900,000	89,804,335	89.89	10,095,665	10.11
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51,000,000	51,000,000	100.00	-	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	27,500,000	27,500,000	100.00	-	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Tenaga Keamanan	21,000,000	21,000,000	100.00	-	-
5.1.02.02.01.0088	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan Operator Lyanan Operasional	2,500,000	2,500,000	100.00	-	-
2.11.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH	198,806,000	151,697,128	76.30	44,543,372	22.41
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	119,660,000	77,999,014	65.18	41,660,986	34.82
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	10,400,000	5,817,998	55.94	4,582,002	44.06
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7,660,000	6,341,091	82.78	1,318,909	17.22
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9,000,000	947,044	10.52	8,052,956	89.48
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	92,600,000	64,892,881	70.08	27,707,119	29.92
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,000,000	11,090,000	85.31	1,910,000	14.69

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			(RP)	(%)	(RP)	(%)
1	2	4	6	7 (6/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	13,000,000	11,090,000	85.31	1,910,000	14.69
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66,146,000	62,608,114	-	972,386	1.47
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	19,646,000	17,080,500	-	2,565,500	13.06
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Temoat Kerja Lainnya	46,500,000	45,527,614	-	972,386	2.09
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA	477,041,186	347,740,811	72.90	129,300,375	27.10
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	457,337,616	329,604,101	72.07	127,733,515	27.93
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	120,006,880	96,628,976	80.52	23,377,904	19.48
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	400,000	339,216	84.80	60,784	15.20
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	563,880	497,280	88.19	66,600	11.81
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,260,000	1,118,880	-	141,120	11.20
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	345,000	316,350	91.70	28,650	8.30
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,720,000	2,720,000	-	-	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,760,000	3,703,600	-	56,400	1.50
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	65,320,000	45,353,150	-	19,966,850	30.57
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untu Penumpang	4,000,000	2,800,000	-	1,200,000	30.00

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			(RP)	(%)	(RP)	(%)
1	2	4	6	7 (6/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41,638,000	39,780,500	95.54	1,857,500	4.46
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium LH Kabupaten	337,330,736	232,975,125	69.06	104,355,611	30.94
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	154,151,836	69,849,830	45.31	84,302,006	54.69
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan ATK	3,710,400	2,736,755	73.76	973,645	26.24
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	2,830,500	2,580,750	91.18	249,750	8.82
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	625,000	581,640	93.06	43,360	6.94
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,400,000	5,319,000	98.50	81,000	1.50
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	54,000,000	54,000,000	100.00	-	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18,000,000	18,000,000	-	-	-
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1,500,000	1,500,000	-	-	-
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	15,350,000	11,280,000	-	4,070,000	26.51
5.1.02.03.02.0250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	35,000,000	21,108,850	60.31	13,891,150	39.69
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46,763,000	46,018,300	98.41	744,700	1.59
2.11.03.2.03	PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH KABUPATEN/KOTA	19,703,570	18,136,710	92.05	1,566,860	7.95
2.11.03.2.03.04	Pelaksanaan Rehabilitasi	19,703,570	18,136,710	92.05	1,566,860	7.95
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-	-	-

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			(RP)	(%)	(RP)	(%)
1	2	4	6	7 (6/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan ATK	334,300	247,530	74.04	86,770	25.96
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	279,720	253,080	-	26,640	9.52
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	270,550	240,248	-	30,302	11.20
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	-	-	-	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,819,000	17,395,852	92.44	1,423,148	7.56
2.11.04	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	129,774,820	105,564,993	81.34	24,209,827	18.66
2.11.04.2.01	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	129,774,820	105,564,993	81.34	24,209,827	18.66
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	129,774,820	105,564,993	81.34	24,209,827	18.66
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4,700,000	4,700,000	100.00	-	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5,000,000	5,000,000	100.00	-	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8,080,000	-	-	8,080,000	100.00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	10,000,000	10,000,000	-	-	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	38,250,000	34,750,000	90.85	3,500,000	9.15
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	227,800	210,789	92.53	17,011	7.47
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	424,020	375,180	88.48	48,840	11.52
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	336,000	309,024	91.97	26,976	8.03
5.1.02.02.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200,000	200,000	100.00	-	-

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			(RP)	(%)	(RP)	(%)
1	2	4	6	7 (6/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,920,000	-	-	1,920,000	100.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5,250,000	-	-	5,250,000	100.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24,000,000	24,000,000	100.00	-	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Lembur	5,200,000	-	-	5,200,000	100.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator layanan Operasional	3,000,000	3,000,000	100.00	-	-
5.1.02.02.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23,187,000	23,020,000	99.28	167,000	0.72
2.11.05	PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	17,837,500	16,233,155	91.01	1,604,345	8.99
2.11.05.2.01	PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	17,837,500	16,233,155	91.01	1,604,345	8.99
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	17,837,500	16,233,155	91.01	1,604,345	8.99
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	95,000	87,135	91.72	7,865	8.28
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	242,000	215,895	89.21	26,105	10.79
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	262,500	241,425	91.97	21,075	8.03
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,440,000	-	-	1,440,000	100.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6,000,000	6,000,000	100.00	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,798,000	9,688,700	98.88	109,300	1.12

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			(RP)	(%)	(RP)	(%)
1	2	4	6	7 (6/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	54,050,540	53,584,910	99.14	465,630	0.86
2.11.06.2.01	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	54,050,540	53,584,910	99.14	465,630	0.86
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	27,911,630	27,806,690	99.62	104,940	0.38
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	128,880	128,205	99.48	675	0.52
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	360,750	347,985	96.46	12,765	3.54
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,422,000	27,330,500	99.67	91,500	0.33
2.11.06.2.01.05	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi & Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup	26,138,910	25,778,220	98.62	360,690	1.38
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	249,910	224,220	89.72	25,690	10.28
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,040,000	1,024,000	98.46	16,000	1.54

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			(RP)	(%)	(RP)	(%)
1	2	4	6	7 (6/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,849,000	24,530,000	98.72	319,000	1.28
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	15,226,190	8,224,423	54.01	7,001,767	45.99
2.11.07.2.01	PENGAKUAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	15,226,190	8,224,423	54.01	7,001,767	45.99
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	15,226,190	8,224,423	54.01	7,001,767	45.99
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	162,750	120,213	73.86	42,537	26.14
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	703,740	619,380	88.01	84,360	11.99
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	791,700	703,030	-	88,670	11.20
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	460,000	421,800	91.70	38,200	8.30
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,400,000	-	-	5,400,000	100.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,708,000	6,360,000	82.51	1,348,000	17.49
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	31,188,430	29,527,640	94.67	1,660,790	5.33
2.11.08.2.01	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LH UNTUK LEMABAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	31,188,430	29,527,640	94.67	1,660,790	5.33
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	31,188,430	29,527,640	94.67	1,660,790	5.33

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			(RP)	(%)	(RP)	(%)
1	2	4	6	7 (6/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	108,000	87,690	81.19	20,310	18.81
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	69,930	63,270	90.48	6,660	9.52
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	282,500	253,080	-	29,420	10.41
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,280,000	7,200,500	98.91	79,500	1.09
5.1.02.04.01.0001	Belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang	450,000	-	-	450,000	100.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,998,000	21,923,100	95.33	1,074,900	4.67
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	281,748,650	259,549,672	92.12	13,878,978	4.93
2.11.09.2.01	PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	281,748,650	259,549,672	92.12	13,878,978	4.93
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	281,748,650	259,549,672	92.12	13,878,978	4.93
5.1.02.01.01.0024	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	19,200,000	10,880,000	56.67	8,320,000	43.33
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	172,000	103,230	60.02	68,770	39.98
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	349,650	316,350	90.48	33,300	9.52
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,819,000	1,701,992	-	1,117,008	39.62
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17,400,000	17,266,000	99.23	134,000	0.77
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66,808,000	54,282,100	81.25	12,525,900	18.75
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan	175,000,000	175,000,000	-	-	-

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			(RP)	(%)	(RP)	(%)
1	2	4	6	7 (6/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	137,456,600	121,527,220	88.41	15,929,380	11.59
2.11.10.2.01	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	137,456,600	121,527,220	88.41	15,929,380	11.59
2.11.10.2.01.04	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	27,537,600	15,454,800	56.12	12,082,800	43.88
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	288,600	277,500	96.15	11,100	3.85
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18,000,000	6,000,000	33.33	12,000,000	66.67
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,249,000	9,177,300	99.22	71,700	0.78
2.11.10.2.01.05	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Yang Ditangani Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	109,919,000	106,072,420	96.50	3,846,580	3.50
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	180,000	163,170	90.65	16,830	9.35
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	105,000,000	101,419,250	96.59	3,580,750	3.41
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,739,000	4,490,000	94.75	249,000	5.25
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5,173,802,163	4,674,992,687	90.36	485,101,586	9.38
2.11.11.2.01	PENGELOLAAN SAMPAH	5,173,802,163	4,674,992,687	90.36	485,101,586	9.38
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	103,280,090	89,890,600	87.04	13,389,490	12.96
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	155,000	132,090	85.22	22,910	14.78
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	354,090	314,130	88.71	39,960	11.29
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,145,000	1,080,330	94.35	64,670	5.65

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			(RP)	(%)	(RP)	(%)
1	2	4	6	7 (6/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	805,000	738,150	91.70	66,850	8.30
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,000,000	4,160,500	34.67	7,839,500	65.33
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10,800,000	7,128,000	66.00	3,672,000	34.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	5,100,000	3,450,000	67.65	1,650,000	32.35
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12,000,000	12,000,000	100.00	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60,921,000	60,887,400	99.94	33,600	0.06
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	160,130,000	144,883,860	-	1,538,250	0.96
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	103,730,000	90,022,110	-	13,707,890	13.21
5.1.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	56,400,000	54,861,750	-	1,538,250	2.73
2.11.11.2.01.20	Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	4,910,392,073	4,440,218,227	90.42	470,173,846	9.58
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	581,690,000	581,580,400	99.98	109,600	0.02
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	944,400	784,770	83.10	159,630	16.90
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	1,477,410	1,346,430	91.13	130,980	8.87
5.1.02.01.01.0029	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1,265,000	1,221,000	96.52	44,000	3.48
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	21,060,000	20,910,000	99.29	150,000	0.71

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			(RP)	(%)	(RP)	(%)
1	2	4	6	7 (6/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	3,000,000	650,000	21.67	2,350,000	78.33
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3,341,100,000	2,904,600,000	86.94	436,500,000	13.06
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21,000,000	21,000,000	100.00	-	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	52,228,000	51,208,704	98.05	1,019,296	1.95
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	88,192,000	88,127,000	99.93	65,000	0.07
5.1.02.03.02.0003	Belanja Jasa Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	3,000,000	1,500,000	50.00	1,500,000	50.00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Jasa Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	18,600,000	18,600,000	100.00	-	-
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Besar Darat-Excavator	87,536,263	86,314,375	98.60	1,221,888	1.40
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Besar Darat-Loader	49,870,000	49,865,000	99.99	5,000	0.01
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	197,000,000	191,748,748	-	5,251,252	2.67
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	269,650,000	268,564,600	99.60	1,085,400	0.40
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	66,100,000	49,600,000	75.04	16,500,000	24.96
5.1.02.03.02.0091	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	80,000,000	76,035,000	-	3,965,000	4.96
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Alat Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2,750,000	2,725,000	99.09	25,000	0.91
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23,929,000	23,837,200	99.62	91,800	0.38
JUMLAH		12,573,056,891	11,201,553,588	89.09	1,289,464,513	10.26

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			(RP)	(%)	(RP)	(%)
1	2	4	6	7 (6/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)
5.1.02.01.01.0025	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	1.075.000	993.450	92,41	81.550	7,59
5.1.02.01.01.0026	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak	1.970.000	1.771.560	89,93	198.440	10,07
5.1.02.01.01.0029	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Komputer	625.000	555.000	88,80	70.000	11,20
5.1.02.02.01.0026	Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	24.000.000	100,00	-	-
5.1.02.04.01.0001	Perjalanan Dinas Biasa	13.690.000	5.080.000	37,11	8.610.000	62,89
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.415.000	11.334.570	65,09	6.080.430	34,91
5.1.02.01.01.0024	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor	80.000	77.700	97,13	2.300	2,88
5.1.02.01.01.0025	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	725.000	274.170	37,82	450.830	62,18
5.1.02.01.01.0026	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak	1.190.000	1.132.200	95,14	57.800	4,86
5.1.02.01.01.0029	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Komputer	500.000	-	-	500.000	100,00
5.1.02.01.01.0052	Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000	798.000	49,88	802.000	50,13
5.1.02.04.01.0001	Perjalanan Dinas Biasa	13.320.000	9.052.500	67,96	4.267.500	32,04
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.840.000	1.625.040	88,32	214.960	11,68
5.1.02.01.01.0026	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak	1.840.000	1.625.040	88,32	214.960	11,68
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.031.000	60.226.509	60,82	38.804.491	39,18
5.1.02.01.01.0024	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor	991.000	133.200	13,44	857.800	86,56

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			(RP)	(%)	(RP)	(%)
1	2	4	6	7	10	11
				(6/5x100)	(4-6)	(10/4x100)
5.1.02.01.01.0025	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	1.335.000	671.550	50,30	663.450	49,70
5.1.02.01.01.0026	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak	1.845.000	1.698.300	92,05	146.700	7,95
5.1.02.01.01.0029	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer	500.000		-	500.000	100,00
5.1.02.01.01.0052	Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	2.992.500	99,75	7.500	0,25
5.1.02.04.01.0001	Perjalanan Dinas Biasa	91.360.000	54.730.959	59,91	36.629.041	40,09
2.11.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.473.221.582	3.360.692.593	96,76	112.528.989	3,24
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.348.291.582	3.238.321.143	96,72	109.970.439	3,28
5.1.01.01.01.0001	Gaji Pokok ASN	1.370.000.000	1.331.395.695	97,18	38.604.305	2,82
5.1.01.01.01.0002	Gaji Pokok PPPK	13.200.000	-	-	13.200.000	100,00
5.1.01.01.02.0001	Tunjangan Keluarga ASN	146.000.000	140.597.496	96,30	5.402.504	3,70
5.1.01.01.02.0002	Tunjangan Keluarga PPPK	1.800.000	-	-	1.800.000	100,00
5.1.01.01.03.0001	Tunjangan Jabatan ASN	132.000.000	126.570.000	95,89	5.430.000	4,11
5.1.01.01.04.0001	Tunjangan Fungsional ASN	160.000.000	155.120.000	96,95	4.880.000	3,05
5.1.01.01.04.0002	Tunjangan Fungsional PPPK	2.300.000	-	-	2.300.000	100,00
5.1.01.01.05.0001	Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.000.000	27.010.000	96,46	990.000	3,54
5.1.01.01.05.0002	Tunjangan Fungsional Umum PPPK	800.000	-	-	800.000	100,00
5.1.01.01.06.0001	Tunjangan Beras ASN	81.000.000	78.068.760	96,38	2.931.240	3,62
5.1.01.01.06.0002	Tunjangan Beras PPPK	1.100.000	-	-	1.100.000	100,00

5.1.01.01.07.0001	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.033.400	14.118.443	70,47	5.914.957	29,53
5.1.01.01.08.0001	Pembulatan Gaji ASN	126.208	17.021	13,49	109.187	86,51
5.1.01.01.08.0002	Pembulatan Gaji PPPK	5.000	-	-	5.000	100,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	1.376.026.974	1.349.625.096	98,08	26.401.878	1,92
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK	15.900.000	15.798.632	99,36	101.368	0,64
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	124.930.000	122.371.450	97,95	2.558.550	2,05
5.1.01.03.07.0001	Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	36.180.000	35.700.000	98,67	480.000	1,33
5.1.02.01.01.0026	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak	590.000	492.840	83,53	97.160	16,47
5.1.02.02.01.0026	Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	24.000.000	100,00	-	-
5.1.02.04.01.0001	Perjalanan Dinas Biasa	64.160.000	62.178.610	96,91	1.981.390	3,09
2.11.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	19.155.000	17.959.640	93,76	1.195.360	6,24
2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.155.000	17.959.640	93,76	1.195.360	6,24
5.1.01.03.07.0001	Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan (Honorarium Pengurus Barang)	13.800.000	13.800.000	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0024	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	3.930.000	2.846.510	72,43	1.083.490	27,57
5.1.02.01.01.0025	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	1.425.000	1.313.130	92,15	111.870	7,85
2.11.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN					

	PERANGKAT DAERAH	272.854.900	134.135.090	49,16	138.719.810	50,84
2.11.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	85.654.900	66.592.700	77,75	19.062.200	22,25
5.1.02.01.01.002 4	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor	1.045.000	808.080	77,33	236.920	22,67
5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	1.160.000	1.074.480	92,63	85.520	7,37
5.1.02.01.01.002 6	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan cetak	879.900	-	-	879.900	100,00
5.1.02.01.01.005 2	Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000	1.200.000	80,00	300.000	20,00
5.1.02.02.01.000 3	Honorium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.500.000	13.500.000	100,00	-	-
5.1.02.02.01.002 6	Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000	12.000.000	100,00	-	-
5.1.02.04.01.000 1	Perjalanan Dinas Biasa	55.570.000	38.010.140	68,40	17.559.860	31,60
2.11.01.2.05.001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	187.200.000	67.542.390	36,08	119.657.610	63,92
5.1.02.02.12.000 1	Kursus Singkat/Pelatihan	87.000.000	25.000.000	28,74	62.000.000	71,26
5.1.02.04.01.000 1	Perjalanan Dinas Biasa	100.200.000	42.542.390	42,46	57.657.610	57,54
2.11.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	487.917.500	416.371.998	85,34	71.545.502	14,66
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.325.000	4.791.000	75,75	1.534.000	24,25
5.1.02.01.01.003 1	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Alat Listrik	6.325.000	4.791.000	75,75	1.534.000	24,25
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.168.000	4.168.000	100,00	-	-
5.1.02.01.01.001 2	Bahan-bahan lainnya	4.168.000	4.168.000	100,00	-	-

2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.899.500	4.690.450	79,51	1.209.050	20,49
5.1.02.01.01.002 6	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.899.500	4.690.450	79,51	1.209.050	20,49
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000	3.900.000	86,67	600.000	13,33
5.1.02.02.01.006 2	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.500.000	3.900.000	86,67	600.000	13,33
2.11.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.125.000	15.077.900	99,69	47.100	0,31
5.1.02.01.01.005 3	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.125.000	15.077.900	99,69	47.100	0,31
2.11.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	451.900.000	383.744.648	84,92	68.155.352	15,08
5.1.02.02.01.003 3	Jasa Tenaga Sopir	36.000.000	33.000.000	91,67	3.000.000	8,33
5.1.02.04.01.000 1	Perjalanan Dinas Biasa	415.900.000	350.744.648	84,33	65.155.352	15,67
2.11.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	276.865.000	118.795.000	42,91	158.070.000	57,09
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	88.825.000	51.325.000	57,78	37.500.000	42,22
5.2.02.05.03.000 2	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	30.000.000	-	-	30.000.000	100,00
5.2.02.05.03.000 4	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	41.925.000	41.925.000	100,00	-	-
5.2.02.05.03.000 7	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	16.900.000	9.400.000	55,62	7.500.000	44,38
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	188.040.000	67.470.000	35,88	120.570.000	64,12
5.1.02.01.01.003 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.000.000	-	-	5.000.000	100,00

5.2.02.01.03.000 5	Belanja Modal Pompa	1.300.000	1.300.000	100,00	-	-
5.2.02.05.02.000 4	Belanja Modal Alat Pendingin	13.000.000	12.950.000	99,62	50.000	0,38
5.2.02.05.02.000 6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.000.000	-	-	20.000.000	100,00
5.2.02.06.01.000 1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	7.500.000	-	-	7.500.000	100,00
5.2.02.10.01.000 2	Belanja Modal Personal Komputer	1.500.000	-	-	1.500.000	100,00
5.2.02.10.01.000 3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	102.000.000	29.950.000	29,36	72.050.000	70,64
5.2.02.10.02.000 3	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	37.740.000	23.270.000	61,66	14.470.000	38,34
2.11.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	164.609.368	154.195.810	93,67	10.413.558	6,33
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.770.000	6.027.790	89,04	742.210	10,96
5.1.02.01.01.002 4	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor	5.450.000	4.724.650	86,69	725.350	13,31
5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	210.000	193.140	91,97	16.860	8,03
5.1.02.01.01.002 7	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Benda Pos	1.110.000	1.110.000	100,00	-	-
2.11.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.039.368	92.368.020	90,52	9.671.348	9,48
5.1.02.02.01.006 0	Belanja Tagihan Air	3.060.000	2.778.600	90,80	281.400	9,20
5.1.02.02.01.006 1	Belanja Tagihan Listrik	98.979.368	89.589.420	90,51	9.389.948	9,49
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.800.000	55.800.000	100,00	-	-
5.1.01.03.07.000 2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.800.000	4.800.000	100,00	-	-

5.1.02.02.01.002 8	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	30.000.000	30.000.000	100,00	-	-
5.1.02.02.01.003 1	Jasa Tenaga Tenaga Keamanan	21.000.000	21.000.000	100,00	-	-
2.11.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH	187.706.000	165.596.940	88,22	22.109.060	11,78
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	62.060.000	41.326.940	66,59	20.733.060	33,41
5.1.02.01.01.000 4	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	7.400.000	2.028.000	27,41	5.372.000	72,59
5.1.02.03.02.003 5	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.660.000	3.397.940	35,18	6.262.060	64,82
5.1.02.03.02.003 6	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	45.000.000	35.901.000	79,78	9.099.000	20,22
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000	15.310.000	95,69	690.000	4,31
5.1.02.03.02.011 7	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	16.000.000	15.310.000	95,69	690.000	4,31
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.646.000	108.960.000	99,37	686.000	0,63
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	69.646.000	68.960.000	99,02	686.000	0,98
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Kolam Lindi TPA	40.000.000	40.000.000	100,00	-	-
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN					

	LINGKUNGAN HIDUP	395.036.690	364.864.619	92,36	30.172.071	7,64
2.11.02.2.02	PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	395.036.690	364.864.619	92,36	30.172.071	7,64
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	202.965.000	190.240.303	93,73	12.724.697	6,27
5.1.02.01.01.002 4	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.175.000	851.750	72,49	323.250	27,51
5.1.02.01.01.002 6	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.170.000	3.170.000	100,00	-	-
5.1.02.01.01.002 9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	750.000	660.000	88,00	90.000	12,00
5.1.02.01.01.005 2	Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000	7.146.000	99,25	54.000	0,75
5.1.02.02.01.000 3	Honorium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	135.000.000	132.000.000	97,78	3.000.000	2,22
5.1.02.02.04.003 6	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000	3.600.000	100,00	-	-
5.1.02.02.05.000 9	Sewa Bangunan Gedung dan Tempat Pertemuan	3.000.000	3.000.000	100,00	-	-
5.1.02.02.05.004 3	Sewa Hotel	4.200.000	4.200.000	100,00	-	-
5.1.02.04.01.000 1	Perjalanan Dinas Biasa	44.870.000	35.612.553	79,37	9.257.447	20,63
2.11.02.2.02.05	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	192.071.690	174.624.316	90,92	17.447.374	9,08
5.1.02.01.01.002 4	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	916.140	749.250	81,78	166.890	18,22
5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	1.200.000	1.118.880	93,24	81.120	6,76
5.1.02.01.01.002 6	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.125.550	2.125.550	100,00	-	-
5.1.02.01.01.002 9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500.000	444.000	88,80	56.000	11,20
5.1.02.01.01.005 2	Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000	9.726.500	67,55	4.673.500	32,45

5.1.02.02.01.000 3	Honorium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	120.000.000	120.000.000	100,00	-	-
5.1.02.02.04.003 6	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000	1.800.000	50,00	1.800.000	50,00
5.1.02.02.05.000 9	Sewa Bangunan Gedung dan Tempat Pertemuan	3.000.000	-	-	3.000.000	100,00
5.1.02.02.05.004 3	Sewa Hotel	4.200.000	2.100.000	50,00	2.100.000	50,00
5.1.02.04.01.000 1	Perjalanan Dinas Biasa	42.130.000	36.560.136	86,78	5.569.864	13,22
2.11.03	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA	682.594.575	564.878.914	82,75	117.715.661	17,25
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	586.199.625	470.284.384	80,23	115.915.241	19,77
2.11.03.2.01.000 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	161.684.100	145.326.532	89,88	16.357.568	10,12
5.1.02.01.01.002 4	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	350.000	310.800	88,80	39.200	11,20
5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	515.000	478.410	92,90	36.590	7,10
5.1.02.01.01.002 6	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.409.100	664.950	47,19	744.150	52,81
5.1.02.01.01.002 9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500.000	444.000	88,80	56.000	11,20
5.1.02.01.01.003 6	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.360.000	1.110.000	81,62	250.000	18,38
5.1.02.01.01.005 2	Makanan dan Minuman Rapat	4.240.000	2.590.250	61,09	1.649.750	38,91
5.1.02.02.01.001 5	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	51.320.000	41.874.410	81,59	9.445.590	18,41
5.1.02.02.04.004	Sewa Alat Angkutan Apung					

9	Bermotor Untuk Penumpang	2.000.000	1.000.000	50,00	1.000.000	50,00
5.1.02.04.01.000 1	Perjalanan Dinas Biasa	99.990.000	96.853.712	96,86	3.136.288	3,14
2.11.03.2.01.001 5	Pengelolaan Laboratorium LH Kabupaten	424.515.525	324.957.852	76,55	99.557.673	23,45
5.1.02.01.01.000 2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	126.912.000	58.073.000	45,76	68.839.000	54,24
5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan ATK	4.408.525	4.136.970	93,84	271.555	6,16
5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	3.045.000	2.820.510	92,63	224.490	7,37
5.1.02.01.01.002 9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	750.000	666.000	88,80	84.000	11,20
5.1.02.01.01.005 2	Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	5.107.200	85,12	892.800	14,88
5.1.02.02.01.001 5	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	90.000.000	90.000.000	100,00	-	-
5.1.02.02.01.002 6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000	12.000.000	100,00	-	-
5.1.02.02.01.005 0	Belanja Jasa Kalibrasi	14.200.000	10.420.000	73,38	3.780.000	26,62
5.1.02.02.04.005 8	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Udara Lainnya	15.200.000	11.783.690	77,52	3.416.310	22,48
5.1.02.02.05.004 3	Sewa Hotel	2.000.000	1.503.000	75,15	497.000	24,85
5.1.02.04.01.000 1	Perjalanan Dinas Biasa	89.500.000	78.024.582	87,18	11.475.418	12,82
5.2.02.05.02.000 1	Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga	60.500.000	50.422.900	83,34	10.077.100	16,66
2.11.03.2.03	PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH KABUPATEN/KOTA	96.394.950	94.594.530	98,13	1.800.420	1,87
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan Rehabilitasi	96.394.950	94.594.530	98,13	1.800.420	1,87
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan ATK	410.000	310.800	75,80	99.200	24,20

5.1.02.01.01.0025	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	365.000	338.550	92,75	26.450	7,25
5.1.02.01.01.0026	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	299.950	282.810	94,29	17.140	5,71
5.1.02.01.01.0058	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.200.000	3.200.000	100,00	-	-
5.1.02.02.04.0036	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.400.000	5.400.000	100,00	-	-
5.1.02.02.05.0043	Sewa Hotel	9.000.000	8.280.000	92,00	720.000	8,00
5.1.02.04.01.0001	Perjalanan Dinas Biasa	45.720.000	44.782.370	97,95	937.630	2,05
5.1.02.05.02.0001	Jasa Yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	32.000.000	32.000.000	100,00	-	-
2.11.04	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	177.547.810	161.905.765	91,19	15.642.045	8,81
2.11.04.2.01	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	177.547.810	161.905.765	91,19	15.642.045	8,81
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	177.547.810	161.905.765	91,19	15.642.045	8,81
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	56.056.000	56.056.000	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.000.000	5.000.000	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.360.000	-	-	2.360.000	100,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	10.000.000	10.000.000	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.000.000	5.000.000	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	74.060	59.700	80,61	14.360	19,39
5.1.02.01.01.0025	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	710.000	631.300	88,92	78.700	11,08
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.182.750	3.294.765	63,57	1.887.985	36,43

5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000	200.000	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.475.000	5.475.000	100,00	-	-
5.1.02.01.01.0052	Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000	1.594.000	28,46	4.006.000	71,54
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.500.000	10.500.000	100,00	-	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	36.000.000	36.000.000	100,00	-	-
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.900.000		-	3.900.000	100,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.490.000	28.095.000	89,22	3.395.000	10,78
2.11.05	PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	44.804.010	43.257.020	96,55	1.546.990	3,45
2.11.05.2.01	PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	44.804.010	43.257.020	96,55	1.546.990	3,45
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	44.804.010	43.257.020	96,55	1.546.990	3,45
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	74.060	58.900	79,53	15.160	20,47
5.1.02.01.01.0025	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	290.000	259.400	89,45	30.600	10,55
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	299.950	282.810	94,29	17.140	5,71
5.1.02.01.01.0052	Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	2.391.000	99,63	9.000	0,38

5.1.02.02.01.002 6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000	12.000.000	100,00	-	-
5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.740.000	28.264.910	95,04	1.475.090	4,96
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	97.425.000	77.813.212	79,87	19.611.788	20,13
2.11.06.2.01	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	97.425.000	77.813.212	79,87	19.611.788	20,13
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	55.065.000	39.664.622	72,03	15.400.378	27,97
5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	425.000	283.050	66,60	141.950	33,40
5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	300.000	279.720	93,24	20.280	6,76
5.1.02.01.01.002 9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500.000	444.000	88,80	56.000	11,20
5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.840.000	38.657.852	71,80	15.182.148	28,20
2.11.06.2.01.05	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi & Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup	42.360.000	38.148.590	90,06	4.211.410	9,94

5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	225.000	209.790	93,24	15.210	6,76
5.1.02.01.01.002 9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	125.000	111.000	88,80	14.000	11,20
5.1.02.01.01.005 2	Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000	1.756.800	54,90	1.443.200	45,10
5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.810.000	36.071.000	92,94	2.739.000	7,06
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	45.289.900	39.079.807	86,29	6.210.093	13,71
2.11.07.2.01	PENGAKUAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	45.289.900	39.079.807	86,29	6.210.093	13,71
2.11.07.2.01.000 1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	45.289.900	39.079.807	86,29	6.210.093	13,71
5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	140.000	116.550	83,25	23.450	16,75
5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	725.000	671.550	92,63	53.450	7,37
5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	879.900	-	-	879.900	100,00
5.1.02.01.01.002 9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	625.000	555.000	88,80	70.000	11,20
5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	-	-	1.200.000	100,00
5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.720.000	37.736.707	90,45	3.983.293	9,55

2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	26.759.950	24.798.780	92,67	1.961.170	7,33
2.11.08.2.01	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LH UNTUK LEMABAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.759.950	24.798.780	92,67	1.961.170	7,33
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	26.759.950	24.798.780	92,67	1.961.170	7,33
5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	55.000	38.850	70,64	16.150	29,36
5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	665.000	618.270	92,97	46.730	7,03
5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	319.950	302.410	94,52	17.540	5,48
5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.320.000	8.169.250	98,19	150.750	1,81
5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.400.000	15.670.000	90,06	1.730.000	9,94
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	70.044.950	59.352.500	84,73	10.692.450	15,27
2.11.09.2.01	PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.044.950	59.352.500	84,73	10.692.450	15,27
2.11.09.2.01.000 1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	70.044.950	59.352.500	84,73	10.692.450	15,27
5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	285.000	223.110	78,28	61.890	21,72

5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	290.000	268.620	92,63	21.380	7,37
5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	399.950	380.810	95,21	19.140	4,79
5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	-	-	6.000.000	100,00
5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63.070.000	58.479.960	92,72	4.590.040	7,28
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	57.488.000	42.935.910	74,69	14.552.090	25,31
2.11.10.2.01	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	57.488.000	42.935.910	74,69	14.552.090	25,31
2.11.10.2.01.04	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	40.818.000	33.142.830	81,20	7.675.170	18,80
5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	68.000	58.830	86,51	9.170	13,49
5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000	397.000	99,25	3.000	0,75
5.1.02.02.01.002 6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	24.000.000	100,00	-	-
5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.350.000	8.687.000	53,13	7.663.000	46,87
2.11.10.2.01.05	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Yang Ditangani Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	16.670.000	9.793.080	58,75	6.876.920	41,25
5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	750.000	699.300	93,24	50.700	6,76
5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000	397.000	99,25	3.000	0,75

5.1.02.02.01.001 5	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	5.000.000	3.211.780	64,24	1.788.220	35,76
5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.520.000	5.485.000	52,14	5.035.000	47,86
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.974.094.83 0	3.718.839.44 5	93,58	255.255.385	6,42
2.11.11.2.01	PENGELOLAAN SAMPAH	3.974.094.83 0	3.718.839.44 5	93,58	255.255.385	6,42
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	84.718.610	80.384.265	94,88	4.334.345	5,12
5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	74.060	59.700	80,61	14.360	19,39
5.1.02.01.01.002 5	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	290.000	259.400	89,45	30.600	10,55
5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	494.550	464.580	93,94	29.970	6,06
5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000	3.188.000	99,63	12.000	0,38
5.1.02.02.01.000 3	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	2.000.000	-	-	2.000.000	100,00
5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.660.000	76.412.585	97,14	2.247.415	2,86
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	155.730.000	129.838.710	83,37	25.891.290	16,63
5.1.02.01.01.001 2	Belanja Bahan-bahan Lainnya	118.730.000	117.838.710	99,25	891.290	0,75
5.2.02.03.01.000 6	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	10.000.000	-	-	10.000.000	100,00
5.2.02.05.02.000 3	Belanja Modal Alat Pembersih	27.000.000	12.000.000	44,44	15.000.000	55,56

2.11.11.2.01.20	Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	3.733.646.220	3.508.616.470	93,97	225.029.750	6,03
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	527.290.000	499.743.700	94,78	27.546.300	5,22
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.614.220	854.500	52,94	759.720	47,06
5.1.02.01.01.0025	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	1.670.000	1.515.600	90,75	154.400	9,25
5.1.02.01.01.0029	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.210.000	1.199.000	99,09	11.000	0,91
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.430.000	15.518.100	66,23	7.911.900	33,77
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	3.000.000	1.964.000	65,47	1.036.000	34,53
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000	12.000.000	100,00	-	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.479.600.000	2.384.500.000	96,16	95.100.000	3,84
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.000.000	21.000.000	100,00	-	-
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	98.592.000	75.296.000	76,37	23.296.000	23,63
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Besar Darat-Axcavator	62.000.000	61.877.000	99,80	123.000	0,20
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Besar Darat-Loader	62.000.000	36.937.000	59,58	25.063.000	40,42
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	10.000.000	9.685.000	96,85	315.000	3,15
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	302.000.000	282.588.760	93,57	19.411.240	6,43
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	52.600.000	40.490.500	76,98	12.109.500	23,02

	Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.750.000	2.645.000	96,18	105.000	3,82
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.890.000	47.031.210	98,21	858.790	1,79
5.2.04.03.08.0002	Belanja Modal Instalasi Jaringan Pipa Gas	25.000.000	13.771.100	55,08	11.228.900	44,92
JUMLAH		10.622.061.065	9.580.059.172	90,19	1.042.001.893	9,81

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kab Luwu Timur telah menyajikan hasil atas pencapaian Penyusunan dokumen Air, dokumen udara, dokumen tutupan lahan. kinerja untuk Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (ITL).Capaian kinerja indikator sasaran tidak memenuhi atau masih kurang dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti limbah dari rumah tangga, limbah industri, sampah, penggundulan hutan dan penggunaan bahan kimia seperti pestisida dan insektisida, emisi dari kendaraan bermotor, limbah asap industri, kebakaran hutan dan pembakaran sampah serta meningkatnya bukaan lahan yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur.

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut :
- Nilai IKA dijadikan sebagai dasar perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta sebagai referensi dalam menentukan kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (sesuai Undang-undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- Tingkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait (Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pelaku Usaha dan/atau kegiatan) untuk bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Perkuat pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap baku mutu air dan udara bagi industri, pertambangan dan usaha lain yang berpotensi menjadi sumber pencemar.
- Tingkatkan pengelolaan limbah domestik melalui penyediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana sanitasi, terutama di wilayah permukiman yang berada di

sekitar badan air.

- Meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar dalam masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai komponen IKLH yakni IKA, IKU dan IKL.
- Pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan baik kepada Lembaga Masyarakat, Dunia Pendidikan dan Dunia Usaha dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
- Menggalakkan kegiatan penanaman pohon di pekarangan atau lahan di sekitar lingkungan rumah dan tempat kerja dapat meningkatkan luasan ruang terbuka hijau.
- Melakukan penambahan ruang lingkup akreditasi untuk parameter yang dibutuhkan dalam pengujian sampel air sungai, air danau bahkan air limbah di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, sehingga bisa mempercepat hasil pengujian dan tidak menghambat dalam proses penyusunan Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

- pemantauan kualitas air pada 7 sungai dan 2 danau adalah 24,92 sedangkan target IKA pada tahun 2023 sebesar 28.00. Nilai IKA yang diperoleh belum memenuhi target yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan rumus, bobot pengali setiap indeks dan perubahan jumlah parameter yang dipersyaratkan. Perhitungan IKA pada tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pada aturan baru tersebut ditentukan bahwa nilai maksimum IKA adalah 70 (Lampiran 1 Permen KLHK No 27 Tahun 2021).
- Pengujian Sampel air sungai dan danau dilakukan di 2 Laboratorium yakni Laboratorium Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Selatan dan Laboratorium di UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dengan 25 parameter sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk proses pembuatan laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
- Keterlambatan pengiriman data hasil pengukuran kualitas udara ambien metode *Passive Sampler* dari Direktorat Pengendalian Pencemaran yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara (IKU).
- Kurangnya data mengenai lingkungan hidup Kabupaten Luwu Timur.

- Fungsi koordinasi yang belum optimal antar instansi terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan sehingga terkadang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak berjalan sesuai rencana.
 - Pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu sehingga beberapa kegiatan mengalami keterlambatan yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran.
 - Sarana dan prasarana pendukung belum lengkap.
 - Terbatasnya aparatur Dinas Lingkungan Hidup baik dari segi kualitas dan kuantitas.
- Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut :
- Meningkatkan Pengawasan kegiatan Usaha yang berdampak pada lingkungan seperti pertambangan, perkebunan, industri dll.
 - Meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar dalam masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai komponen IKLH yakni IKA, IKU dan IKL.
 - Menggalakkan kegiatan penanaman pohon di pekarangan atau lahan di sekitar lingkungan rumah dan tempat kerja dapat meningkatkan luasan ruang terbuka hijau yang baru.
 - Melakukan penambahan ruang lingkup akreditasi untuk parameter yang dibutuhkan dalam pengujian sampel air sungai, air danau bahkan air limbah di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, sehingga bisa mempercepat hasil pengujian dan tidak menghambat dalam proses penyusunan laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
 - Pemantauan kualitas udara dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, serta data satelit pm 2,5 diinput dalam aplikasi SITALA.
 - Memaksimalkan penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan
 - Mengoptimalkan peran ruang terbuka hijau dan vegetasi penyerap polutan disekitar wilayah permukiman dan terminal sebagai upaya mitigasi pencemaran udara.

- Mendorong penerapan upaya pengendalian emisi, seperti pengaturan lalu lintas, uji emisi kendaraan bermotor, serta mendorong penggunaan bahan bakar berkualitas yang cenderung menghasilkan emisi SO₂ dan NO₂ yang lebih rendah.
- Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara bertahap pada ruas-ruas jalan yang masih berupa tanah atau kerikil untuk mengurangi pembentukan debu dan partikel tersuspensi.
- Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perilaku ramah lingkungan, khususnya dalam penggunaan kendaraan bermotor dan upaya menjaga kualitas udara ambien.

Tindak lanjut terhadap hasil rekomendasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Tabel 4. 1

Tindak lanjut terhadap hasil rekomendasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2024

NO	Rekomendasi evaluasi AKIP Tahun 2024	Tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP Tahun 2024
1	2	3
1	Menyempurnakan indikator kinerja agar lebih spesifik teratur dan memiliki baseline yang jelas	Indikator kinerja yang digunakan, mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Matriks Renstra DLH Tahun 2021-2026 dan telah memiliki baseline yang jelas
2	Pegawai belum seluruhnya memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Seluruh pegawai telah memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, terbukti dengan seluruh pegawai telah membuat SKP Tahun 2024 dan evaluasi berjenjang setiap triwulan.
3	Dalam melakukan evaluasi internal baik ditingkat bidang maupun tingkat OPD lengkapi dengan kertas kerja	telah dilengkapi kertas kerja saat melakukan evaluasi internal berpa daftar hadir, dokumentasi dan undangan
4	Meningkatkan konsistensi data laporan kinerja dengan system monitoring internal untuk memastikan akurat data	Telah membuat laporan kinerja setiap triwulan dan tahunan
5	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan belum digunakan teknologi informasi (Aplikasi)	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan teknologi informasi (aplikasi), DLH mengoptimalkan dengan pengiriman file evaluasi kinerja via email dan whatsapp
6	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai untuk merumuskan dan menetapkan perencanaan	Telah melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai yang dilakukan

	kinerja yang ingin dicapai sehingga seluruh pegawai memahami, peduli dan berkomitmen untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan	bersamaan saat evaluasi kinerja berkala dan berjenjang setiap triwulan.
7	Memformalkan pedoman teknis/SOP pengukuran kinerja dalam bentuk SK Kepala OPD	Telah dilengkapi dengan SK Kepala DLH tentang penetapan SOP pengukuran kinerja
8	Publikasikan lakip tepat waktu pada website PPID	LAKIP DLH tahun 2024 telah di publikasikan pada PPID Kab. Luwu Timur

Dengan adanya kendala dan strategi pemecahan masalah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur kedepannya sehingga semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Malili, 31 Januari 2026



UMAR HASAN DALLE, S.STP.,M.Si

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19810204 199912 1 001

